



2024



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
KELAS 1B

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B



## LAPORAN KINERJA

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B  
JL. PB Sudirman No.97 Karangasem, Patoan, Kec. Situbondo,  
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telp/Fax : (0338) 671397 , 671545 672 700



[itpnsitubondo@gmail.com](mailto:itpnsitubondo@gmail.com)



@Negeri Situbondo



[www.pn-situbondo.go.id](http://www.pn-situbondo.go.id)



pengadilannegrisitubondo



[www.pn-situbondo.go.id](http://www.pn-situbondo.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024,



yang intinya memuat laporan capaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo selama kurun waktu satu tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, yang berpendoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo di tahun 2024 merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, program – program yang telah dilaksanakan dimaksud sebagai bentuk peran aktif Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka mewujudkan *good govermence*, diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Situbondo dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi untuk Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Situbondo yang telah melaksnakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini , semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melimpah rahmat dan hidayatnya kepada kita semua , Amiin

Situbondo, 14 Februari 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Achmad Rasjid



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2024 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2024

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan perkembangan dan capaian kinerja selama tahun 2024 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Situbondo. Penyusunan LKjIP tahun 2024 merupakan implementasi tahun kedua dalam Renstra 2020 - 2024 yang memuat 8 (Delapan) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
6. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang baik
7. Mewujudkan pelayanan kesekrearian yang prima
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Situbondo adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun capaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat



meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Situbondo, tahun 2024. Program tersebut adalah :

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebesar 98,52 %.

Reviu capaian kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		Perdata	70 %	41,07%	58,67%
		Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	1 %	0 %	0 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %	83%	96,8 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi :	91 %	99,1%	108,9%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %	33,3 %	333%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	96,10	105,6		
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	2,43%	24,3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100 %	112%	112%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50 %	54,5 %	109%
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %	100 %	111%



	dan berkesinambungan	b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %	100 %	100 %		
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal " BB "	75	71,20	94,9		
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	0 %	0 %		
		c. Nilai IPK	92	98,36	106,9		
		d. Nilai IKM	92	96,90	105,3		
		e. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	783,81 Utama	783,81 Utama	100%		
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %	100 %	100 %		
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %	99,56 %	101,5%		
		h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu	100 %	100 %	100%		
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %	82,91%	86,35%		
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100 %	100 %	100%		
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %	0 %	0 %		
		7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	100%
				b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100 Mpbs	100 Mpbs	100%
c. Prosestase distribusi surat	100 %			100 %	100%		
d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98%			100 %	102%		
e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100 %			100 %	100%		
f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	5			8	160 %		
g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	35			25	71 %		
h. Jumlah layanan di Pengadilan	5			5	100%		
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Orang			279 Orang	139,5 %		
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126 org			145 org	115%		
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %			100 %	100 %		
l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2			1/ 1540 M2	100 %		
m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7/884 m2			7 / 884 M2	100 %		
n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	638 Unit			638 Unit	100 %		



		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan	12 bulan layanan	100%
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %	70 %	87,5%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja</b>					<b>98,52%</b>

**Table : Prosentase capaian kinerja Tahun 2024**

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam tiga tahun terakhir. Target perkara yang diselesaikan tepat waktu ditetapkan adalah untuk Perkara Perdata 70% dan untuk Perkara Pidana 100%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah Perkara Perdata 58,67% dan untuk Perkara Pidana Perkara 100 %

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara Tahun 2024 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 99,45 %, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 99,62 %.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	4.030.382.000,00	4,006,344,612,00	99.40 %	24,037,388,00	<b>0,6 %</b>
Barang	1,518,337,000,00	1,511,713,658,00	99.56 %	6,623,342,00	<b>0,44 %</b>
Modal	0	0		0	
<b>Total</b>	<b>5,548,719,000</b>	<b>5,518,058,270</b>	<b>99.45 %</b>	<b>30,660,730</b>	<b>(1,04%)</b>

**Realisasi Anggaran DIPA 01**

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	58,440,000,00	58,105,995,00	99.43 %	334,005,00	<b>0,38%</b>
Kimwasmal	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	<b>0 %</b>
Pos Bankum	28.000.000,00	28.000.000,00	100 %	0	<b>0 %</b>
<b>Total</b>	<b>87,940,000,00</b>	<b>87,605,995,00</b>	<b>99.62%</b>	<b>334,005,00</b>	<b>0,38%</b>

**Realisasi Anggaran DIPA 03**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>17</b>
A. Visi dan Misi .....	17
B. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	20
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2024 .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>28</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	28
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	41
C. Realisasi Anggaran .....	131
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>144</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	



Daftar Tabel			
No	Tabel	Uraian	hal
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>			
1	Tabel 1	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo	3 - 4
2	Tabel 2	Gedung Pengadilan Negeri Situbondo	5
3	Tabel 3	Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Situbondo	5 - 6
4	Tabel 4	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	6
5	Tabel 5	Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Situbondo	6 - 7
<b>BAB II PERENCANAAN KERJA</b>			
6	Tabel 6	Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	19 - 20
7	Tabel 7	Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo	20 - 22
8	Tabel 8	Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	22 - 23
9	Tabel 9	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo	24 - 26
10	Tabel 10	Anggaran dan realisasi DIPA 03 tahun 2023	26
11	Tabel 11	Anggaran dan realisasi DIPA 01	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
12	Tabel 12	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024	29
13	Tabel 13	Prosentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024	30 - 32
14	Tabel 14	Tabel Skala Nilai Ordinal Capaian Kinerja	32
15	Tabel 15	Kategori Penilaian Capaian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo	33 - 35
16	Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja TH 2022- 2024	35 - 37
17	Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target akhir jangka menengah tahun 2025 – 2029	37- 38
18	Tabel 18	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia)	38 - 39
19	Tabel 19	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	42 - 43
20	Tabel 20	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	43 - 44
21	Tabel 21	Perbandingan capaian kinerja tepat waktu	44
22	Tabel 22	Persentase capaian Kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	46
23	Tabel 23	Prosentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2022 – 2024	47
24	Tabel 24	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024	48
25	Tabel 25	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	48
26	Tabel 26	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2024	49
27	Tabel 27	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50
28	Tabel 28	Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	51
29	Tabel 29	Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	51
30	Tabel 30	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	52
31	Tabel 31	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024	52





32	Tabel 32	Perbandingan Capaian Kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	53
33	Tabel 33	Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2	54
34	Tabel 34	Prosentase Capaian salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	55
35	Tabel 35	Perbandingan Capaian Prosentase salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu	55
36	Tabel 36	Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi	57
37	Tabel 37	Perbandingan Capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi	57
38	Tabel 38	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3	57
39	Tabel 39	Persentase Capaian perkara prodeo yang diselesaikan	58
40	Tabel 40	Perbandingan capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan	58
41	Tabel 41	Persentase Capaian perkara perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan	59
42	Tabel 42	Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan	59 - 60
43	Tabel 43	Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu	60 - 61
44	Tabel 44	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2024	61
45	Tabel 45	Perbandingan Capaian Kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	61
46	Tabel 46	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4	62
47	Tabel 47	Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	63
48	Tabel 48	Perbandingan capaian Kinerja putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	63
49	Tabel 49	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 5	64
50	Tabel 50	Nama Tabel Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial	65
51	Tabel 51	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	66
52	Tabel 52	Persentase Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	67
53	Tabel 53	Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2024	68
54	Tabel 54	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	68
55	Tabel 55	Perbandingan capaian layanan kenaikan pangkat tepat waktu	69
56	Tabel 56	Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2024	70
57	Tabel 57	Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023	70
58	Tabel 58	Perbandingan Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu	70
59	Tabel 59	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6	71
60	Tabel 60	Persentase capaian Nilai LKJiP	72
61	Tabel 61	Perbandingan Persentase capaian Nilai LKJiP	73



62	Tabel 62	Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM	74
63	Tabel 63	Perbandingan Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM	74
64	Tabel 64	Persentase capaian Nilai IPK	75
65	Tabel 65	Persentase capaian Nilai IPK	76
66	Tabel 66	Perbandingan Persentase capaian Nilai IPK	76
67	Tabel 67	HASIL IKM e –Survey Badilum Tahun 2024	77
68	Tabel 68	Persentase capaian Nilai IKM	78
69	Tabel 69	Perbandingan Persentase capaian Nilai IKM	78
70	Tabel 70	Prosentase Capaian Kinerja Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh)	79
71	Tabel 71	Persentase Perbandingan capaian Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) atau Predikat (APM)	81
72	Tabel 72	Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	81 - 82
73	Tabel 73	Persentase Perbandingan Realisasi PNBP	82
74	Tabel 74	Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Situbondo Th 2024	83
75	Tabel 75	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Th. 2024	83
76	Tabel 76	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024	84
77	Tabel 77	Jumlah ASN Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024	84 – 85
78	Tabel 78	Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2024	85
79	Tabel 79	Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2022-2024	86
80	Tabel 80	Persentase Nilai Kinerja Anggaran	86
81	Tabel 81	Nilai Kinerja Anggran Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022 – 2024	87
82	Tabel 82	Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Situbondo Tahun 2024	88
83	Tabel 83	Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2024	88 – 89
84	Tabel 84	Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024	90
85	Tabel 85	Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2024	90
86	Tabel 86	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7	91
87	Tabel 87	Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024	92
88	Tabel 88	Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2024	93
89	Tabel 89	Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2024	94
90	Tabel 90	Jumlah Pendistribusian Surat Masuk di Pengadilan Negeri Situbondo TH 2022- 2024	95
91	Tabel 91	Capaian Kinerja Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu TH. 2023	96
92	Tabel 92	Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2024	97



93	Tabel 93	Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2024	99
94	Tabel 94	Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2024	100
95	Tabel 95	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2024	101
96	Tabel 95	Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan 2024	103
97	Tabel 96	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan TH 2022 – 2024	103
98	Tabel 97	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum TH 2024	104
99	Tabel 98	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 – 2024	104
100	Tabel 99	Persentase Capaian Kinerja Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2024	105
101	Tabel 100	Persentase Realisasi Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2022 - 2024	105
102	Tabel 101	Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung TH 2024	106
103	Tabel 102	Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas TH 2024	107
104	Tabel 103	Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor Tahun 2024	108
105	Tabel 104	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2024	109
106	Tabel 105	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	110
107	Tabel 106	Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2024	110
108		Benchmark Kinerja Rekapitulasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2023	112 - 121
109		Benchmark Kinerja Rekapitulasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2024	122 - 130
110	Tabel 107	Realisasi Belanja DIPA 01	133 - 134
111	Tabel 108	Realisasi Belanja DIPA 03	134
112	Tabel 109	Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01	134 - 140
113	Tabel 110	Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 03	141 - 143

## DAFTAR GAMBAR

NO	Gambar	Uraian	Hal
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>			
1	Gambar 1	Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo	3



2	Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>			
3	Gambar 3	Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo (Lampiran)	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KERJA</b>			
4	Gambar 4	Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021	40
5	Gambar 5	Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas	40
6	Gambar 6	Nilai AKIP Tahun 2022 Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya	40
7	Gambar 7	Nilai AKIP Tahun 2023 Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya	41
8	Gambar 8	Piagam Penghargaan (EIS) Evaluasi Implementasi SIIP dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Peringkat Ke-1 Bulan Januari – Oktober 2023 Pengadilan Kelas I B Kategori 1 s/d 500 perkara	45
9	Gambar 9	Aplkasi SIKEP	66
10	Gambar 10	Monitoring Kelengkapan E – DOC SIKEP	67
11	Gambar 11	Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas	72
12	Gambar 12	Nilai AKIP tatahun 2022 dari Pengadilan Tinggi Surabaya	72
13	Gambar 13	Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021	72
14	Gambar 14	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019	74
15	Gambar 15	Nilai IPK Terwulan I Si Super	75
16	Gambar 16	Nilai IPK Terwulan II Si Super	75
17	Gambar 17	Nilai IPK Terwulan III Si Super	76
18	Gambar 18	Nilai IPK Terwulan IV Si Super	76
19	Gambar 19	Nilai SKM Terwulan I Si Super	77
20	Gambar 20	Nilai SKM Terwulan II Si Super	77
21	Gambar 21	Nilai SKM Terwulan III Si Super	78
22	Gambar 22	Nilai SKM Terwulan IV Si Super	78
23	Gambar 23	Sertifikat Predikat APM tahun 2022	79
24	Gambar 24	Assesment Survelence Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Tahun 2024	80
25	Gambar 25	Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2024	85
26	Gambar 26	IKPA DIPA 01	87
27	Gambar 27	IKPA DIPA 03	87
28	Gambar 28	Tampilan aplikasi SIPKAN	93
29	Gambar 29	Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2024	94
30	Gambar 30	Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP +	95
31	Gambar 31	TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +	96
32	Gambar 32	Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +	97
33	Gambar 33	Register Surat Keluar Pada Aplikasi PTSP +	98
34	Gambar 34	Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Tiap Bagian	98
35	Gambar 35	Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri	101



		Situbondo	
<b>36</b>	Gambar 36	Ruang PTSP Pengadilan Negeri Situbondo	102
<b>37</b>	Gambar 37	Register Tamu PTSP + Pengadilan Negeri Situbondo	103
<b>38</b>	Gambar 38	Data Sakti BMN Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2024	108



# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Situbondo merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari birokrasi , kerana merupakan salah satu dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Situbondo dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Situbondo dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Situbondo memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misinya.



Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Situbondo berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Pengadilan Negeri Situbondo yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Situbondo, Provinsi Jawa Timur, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2024

Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan - laporan tersebut adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Permenpan No. 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Situbondo terletak di Ibukota Provinsi Jawa Timur , beralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 97 Situbondo, wilayah hukum terdiri dari : 17 Kecamatan , 132 Desa , 4 Kelurahan .

#### a. Letak Geografis

Kabupaten Situbondo terletak antara 7° 35' – 7° 44' LS dan 113° 30' – 114° 32' BT, dimana disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura,



sebelah Timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Sebelah barat berbatasan dengan Probolinggo



Gambar 1 : Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

**b. Wilayah Hukum**

Secara administrasi kabupaten Situbondo terdiri dari : 17 Kecamatan , 132 Desa , 4 Kelurahan adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Arjasa		8	Desa	Arjasa , Bayeman, Curah Tatal, Jatisari, Kayumas,Kedungdowo, KetowanLamongan
Asembagus		10	Desa	Asembagus,Awar-awar, Bantal,Gudang,Kedunglo,Kertosari,Mojosari,Parante, Trigonco,Wringin Anom
Kapongan		10	Desa	Curah Cottok,Gebangan, Kandang,Kapongan,Kesambi Rampak,Landangan,Peleyan, Pokaan,Seletreng,Wonokoyo
Kendit		7	Desa	Balung,Bugeman,Kendit, Klatakan,Kukusan,Rajekwesi, Tambak Ukir
Mangaran		6	Desa	Mangaran,Semiring,Tanjung Glugur,Tanjung Kamal, Tanjung Pecinan,Trebungan





Mlandingan		7	Desa	Alas Bayur,Campoan, Mlandingan Kulon, Selomukti,Sumberanyar, Sumber Pinang,Trebungan
Panarukan		8	Desa	Alasmalang,Duwet,Gelung, Kilensari,Paowan,Peleyan, Sumberkolak,Wringinanom
Panji		10	Desa	Battal,Curah Jeru,Juglangan, Kayu Putih,Klampokan, Panji Kidul,Panji Lor,Sliwung, Tenggir,Tokelan
Panji	2		Kelurahan	Ardirejo,Mimbaan
Situbondo		4	Desa	Kalibagor,Kotakan,Olean, Talkandang
Situbondo	2		Kelurahan	Dawuhan,Patokan
Suboh		8	Desa	Buduan,Cemara,Dawuan, Gunung Malang,Gunung Putri, Ketah,Mojodungkol,Suboh
Banyuglugur		7	Desa	Banyuglugur,Kalianget,Kalisari, Lubawang,Selobanteng, Telempong,Tepos
Banyuputih		5	Desa	Banyuputih,Sumberanyar, Sumberejo,Sumberwaru, Wonorejo
Besuki		10	Desa	Besuki,Blimbing,Bloro,Demung, Jetis,Kalimas,Langkap,Pesisir, Sumberejo,Widoropayung
Bungatan		7	Desa	Bletok,Bungatan,Mlandingan Wetan,Pasir Putih,Patemon, Selowogo,Sumbertengah
Jangkar		8	Desa	Agel,CurahKalak,Gadingan, Jangkar,Kumbangsari,Palangan ,Pesanggrahan,Sopet
Jatibanteng		8	Desa	Curahsuri,Jatibanteng, Kembangsari,Pategalan, Patemon,Semambung, Sumberanyar,Wringinanom
Sumber Malang		9	Desa	Alastengah,Baderan,Kalirejo, Plalangan,Sumberargo,Taman, Tamankursi,Tamansari, Tlogosari
17	4	132		

Tabel 1 : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 3 (tiga) buah gedung yang terletak pada Gedung Pengadilan Negeri Situbondo Gedung utama



yang dibangun pada tahun 1985 telah mengalami aksi kerusuhan 10 Oktober 1996 sehingga menimbulkan Gedung Pengadilan Negeri Situbondo rusak total yang tersisa hanya gedungnya , kemudian saat itu dilaksanakan renovasi beserta mebelernya. Adapun jumlah sarana dan prasarana gedung dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Lokasi Tanah	Luas Tanah ( M2 )	Keterangan
1.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	7715	Tanah Kantor Bersertifikat No.32/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
2.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	753	Tanah Gedung Kantor ( Lantai 1 )
3.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	153	Tanah Gedung Kantor ( Lantai 2 )
4.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	1480	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 6/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
5.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Asembagus
6.	Jl.Desada dan Kec. Besuki, Kab.Situbondo	1080	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 13/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI.
7.	Jl.Desada dan Kec. Besuki, Kab.Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Besuki

Tabel 2 : Gedung Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk menunjang kesejahteraan Hakim maupun pegawai Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 7 (tujuh) rumah Negara namun sebagian mengalami kerusakan diatas 40% sesuai dengan penilaian ambang batas kerusakan gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Situbondo pada tahun 2019. Sehingga hanya beberapa rumah yang layak dihuni oleh pimpinan dan para Hakim. Adapun jumlah rumah negara dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Alamat	Kondisi	Luas Tanah & Bangunan	Peruntukan	Sertifikat	Keterangan
1.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	285 / 197	KPN	MARI	Ditempati / Type 45
2.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323/ 68	WKPN	MARI	Ditempati/ Type 36
3.	Jl.PB.Sudirman No. 97	Baik	323 / 68	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36
4.	Jl.Argopuro No.18	Rusak Berat	420/191,25	Kosong	MARI	Kosong/ Type 45
5.	Jl.Santana No.1	Rusak Ringan	390/ 123,5	Panitera	MARI	Ditempati/ Type 45



6.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lambung 1	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati / Type 36
7.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lambung 2	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36

Tabel 3 : Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk menunjang mobilitas rutin pimpinan maupun operasional kantor, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 4 (Empat ) unit kendaraan bermotor roda 4 dan 6 (enam) kendaraan bermotor roda 2 yang digunakan untuk operasional pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera dan Sekretaris unit kendaraan roda 4 dan 1 (satu) merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2017. Adapun jumlah sarana kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis/Merk	Tahun	No.Pol	Kondisi	Asal Perolehan
1.	K. Innova	2017	P1218 EP	Baik	Pinj.Pakai
2.	K. Innova E.xw4	2009	P 1327 EP	Baik	APBN
3.	D. Terrios TX	2012	P 1439 EP	Baik	APBN
4.	D. Terrios TS	2011	P 1435 EP	Baik	APBN
5.	Honda NF 125D	2008	P 5592 EP	Baik	APBN
6.	Honda NF 125 TD	2008	P 2446 EP	Baik	APBN
7.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5784 EP	Baik	APBN
8.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5783 EP	Baik	APBN
9	Honda GL.Max125	2003	P 3041 EP	Baik	APBN
10	Suzuki RC.100	1996	P 5890 EP	R. Berat	APBN

Tabel 4 : Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

Pada periode 31 Desember 2024 jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 43 orang, jumlah tersebut jauh dari standar ideal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan buku pedoman administrasi peradilan tahun 2007. Adapun rincian jumlah sumber daya manusia pada tahun 2024 sebagai berikut

No	Jabatan	Jumlah	
		Laki – laki	Perempuan
1	Ketua	1	-
2	Wakil Ketua	1	-
3	Hakim	4	-
4	Panitera	1	-
	Sekretaris	-	-
5	Panmud Perdata	1	-
6	Panmud Pidana	-	1
7	Panmud Hukum	1	-
8	Ka.Sub Bag. Keegawaian dan Ortala	-	1
9	Ka.Sub Bag. Perencanaan, Tehnologi Informatikan dan Pelaporan	1	-
10	Ka.Sub Bag. Umum dan Keuangan	-	1



11	Panitera Pengganti	1	1
12	Jurusita	1	-
13	Jurusita Pengganti	1	3
14	Staf. Kepaniteraan	3	1
15	Arsiparis	0	0
16	Pustakawan	0	0
17	Staf Kesekretariatan	-	-
18	Pengelola BMN	-	1
19	Pranata Komputer	-	-
20	Klerek Analis Perkara peradilan /Cakim	8	1
21	Tenaga PMPN	9	-
	Jumlah	33	10

Tabel 5 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Situbondo

## 2. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Wewenang dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

### 1. KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri nganjuk sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 Yaitu :

- a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.(pasal 2)
- b. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.(pasal 3 ayat 1)
- c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan umum berpuncak



pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. (pasal 3 ayat 2)

## 2. WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai *Judicial Power*, adalah :

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

## 3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

- 1) FUNGSI PERADILAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004)
  - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
  - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
  - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) FUNGSI NASEHAT
  - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
  - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) FUNGSI ADMINISTRATIF



Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

#### 4) FUNGSI LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan informasi melalui website Pengadilan negeri Situbondo yang dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

### 3. STUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2019. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. Ketua Pengadilan Negeri**

Ketua Pengadilan Negeri bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita di daerah hukumnya, dan melaporkan Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan dapat memberikan keterangan hukum kepada Instansi Pemerintah daerahnya, apabila diminta, atau sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;
- d. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan;
- e. Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan;



- f. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- g. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya;
- h. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

## 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas atau yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya Atau sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian-nya;
- b. Mewakili ketua bila berhalangan;
- c. delegasi wewenang dari ketua

## 3. Hakim

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa , memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana maupun Perkara Perdata di tingkat pertama serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

## 4. Panitera

Panitera Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dalam melaksanakan tugas Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata.
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Khusus
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, menyajikan data perkara dan transparansi perkara.
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dari APBN dalam





program teknis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, monitoring, evaluasi, minutas, dan administrasi kepaniteraan

- g. Pelaksanaan Mediasi.
- h. Pembinaan teknis kepanitera dan kejurusitaan dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

## 5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan keuangan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- f. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- g. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, dan
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo

## 6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas pidana
- b. Pelaksanaan register perkara pidana
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.



- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik .
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi .
- h. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir .
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

## 7. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas perdata
- b. Pelaksanaan register perkara perdata
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi.
- e. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan Kembali.
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan salinan putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan risalah penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- i. Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- k. Pelaksanaan penyimpanan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan



n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

#### **8. Panitera Muda Hukum**

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

#### **9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana**

Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

#### **10. Kepala Sub Bagian Perencanaan , Tehnologi Informasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### **11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

#### **12. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti mempunyai tugas:



- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/ berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

### 13. Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

## 4. PERMASALAH UTAMA ( Stategis Issued) ISSU INTERNAL

### 1. Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya kekurangan tenaga Staf untuk menangani administrasi perkara dan umumnya para Staf yang ada juga merangkap jabatan lain, selain itu tenaga honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;
- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Situbondo

### 3. Aspek Sarana Dan Prasarana

Terdapat beberapa fasilitas yang kurang memadai mendukung dalam



memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan Pengadilan dan masyarakat pencari keadilan

## ISSU EKTERNAL

### 1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan pada umumnya.
- b. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
- c. Masih ada permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi serta nilai-nilai peradilan yang *excellent* belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di peradilan.
- d. Kurangnya pemahaman pengguna layanan pengadilan dan masyarakat pencari keadilan dan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara secara elektronik ;
- e. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan Aparatur Sipil Negara peradilan yang kurang memadai serta belum merata ;
- b. Adanya rangkap pekerjaan antara jurusita pengganti dan staf;

### 3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) , Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) yang dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yang menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart Pelayanan yang telah ditetapkan.



# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antarlain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.

Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur Negara pada RPJMN 2020 - 2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Situbondo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program - program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo.

## A.VISI dan MISI

### a. VISI

Visi adalah Suatu gambaran yang dituangkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu :

**“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung ”**

### b. MISI

Misi adalah Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud



dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan **misi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo.

## C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo .

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Situbondo yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

### b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 – 2024 , Reviu sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:



1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Kepercayaan public atas layanan Peradilan	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</li> <li>b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung.</li> <li>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.</li> <li>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</li> </ol>
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.</li> </ol>
Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</li> <li>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</li> <li>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum).</li> </ol>
Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase layanan umum dan peningkatan ASN
	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase layanan perkantoran dan pendukung kinerja</li> <li>b. Gaji dan Tunjangan</li> <li>c. Pengelolaan SDM</li> </ol>





	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Pelayanan terhadap pengguna layanan peradilan</li> <li>b. Operasional dan Pemeliharaan kantor</li> </ul>
	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Tabel 6 : Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, maka ditetapkanlah sebuah rencana kegiatan tahunan. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase putusan perkara	50 %



	Terhadap Putusan Pengadilan	perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJip Minimal “ BB “	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK
		c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	“ A “
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100 Mpbs
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98%
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit



		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Tabel 7 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

## REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja tahun 2024 dilakukan Reviu untuk menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan agar tingkat keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		Perdata	75 %
		Pidana	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91 %		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi	90 %



	dan berkesinambungan	jabatan menajerial	
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJip Minimal “ BB “	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK
		c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	783,81 Utama
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100 %
		l. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		m. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100 %
		n. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100 Mbps
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98%
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/ mesin kantor	638 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %



Tabel 8 : Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuandan sasaran Pengadilan Negeri Situbondo , menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo. Dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo , sebagai berikut.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	<b>100 %</b>
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	<b>1 %</b>
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	<b>86 %</b>
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<b>91 %</b>
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	<b>10 %</b>
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<b>91 %</b>
<b>2</b>	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	<b>100 %</b>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<b>10 %</b>
<b>3</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	<b>1%</b>
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	<b>1 %</b>
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat	<b>100 %</b>



		layanan bantuan hukum (Posbakum)	
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal “ BB “	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK
		c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	“ A “
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwirth yang memadai	100 Mbps
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98%
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan / mesin kantor	94 Unit
o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan		



8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %
---	---	--	------

Tabel 9 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut diatas, didukung oleh pagu anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi, dengan rincian program sebagai berikut.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 87.605.995,00
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 5.548.719.000,00

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	58,440,000,00	58,105,995,00	99.43 %	334,005,00	<b>0,38%</b>
Kimwasmat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	<b>0 %</b>
Pos Bankum	28.000.000,00	28.000.000,00	100 %	0	<b>0 %</b>
<b>Total</b>	<b>87,940,000,00</b>	<b>87,605,995,00</b>	<b>99.62%</b>	<b>334,005,00</b>	<b>0,38%</b>

Table 10 : Anggaran dan realisasi DIPA 03

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	4.030.382.000,00	4,006,344,612,00	99.40 %	24,037,388,00	<b>0,6 %</b>
Barang	1,518,337,000,00	1,511,713,658,00	99.56 %	6,623,342,00	<b>0,44 %</b>
Modal	0	0		0	
<b>Total</b>	<b>5,548,719,000</b>	<b>5,518,058,270</b>	<b>99.45 %</b>	<b>30,660,730</b>	<b>(1,04%)</b>

Table 11 : Anggaran dan realisasi DIPA 01

## POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawalstruktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output dan outcome yang diinginkan. Dengan adanya pohon kinerja dapat diketahui analisis proses bisnis yang menggambarkan pola koordinasi antar



stakeholders (pemangku kebijakan) yang terlibat dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan penyusunan Pohon Kinerja yang mengacu pada Sasaran Strategis Organisasi. Pohon kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah memuat Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo yang telah diselaraskan dengan Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran Mahkamah Agung RI.

Dalam pohon kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah memuat Sasaran Strategis serta indikator tiap sasaran, juga terdapat strategi yang akan dilaksanakan dalam merealisasikan tiap-tiap sasaran strategis. Dalam pelaksanaan tujuan organisasi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo didukung oleh anggaran dalam 2 (dua) DIPA dengan program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut aparatur Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun proses bisnis serta pola koordinasi antar *stakeholders* Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada dalam lampiran Laporan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo.





# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Situbondo merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2024. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

### A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian Kinerja dilihat dari Pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target dengan capaian/ realisasi kinerja selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode.

Hal ini untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target yang telah



ditetapkan satu tahun dalam rangka capaian rencana/sasaran jangka menengah

### A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dari 13 (tiga belas) indikator untuk 4 (empat) sasaran strategis, yang dinyatakan berhasil mencapai target bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan yaitu 13 (tiga belas) indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	
		Perdata	70 %
		Pidana	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	1 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91%
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %



Tabel 11 : Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir Tahun 2024 di satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo

Dari tabel akan terlihat prosentase capaian kinerja atau keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		Perdata	70 %	41,07%	58,67%
		Pidana	100 %	100 %	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	1 %	0 %	0 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %	83%	96,8 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi :	91 %	99,1%	108,9%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %	33,3 %	333%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	96,10	105,6		
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	2,43%	24,3%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100 %	112%	112%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50 %	54,5 %	109%
5	Mewujudkan Manajemen	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar	90 %	100 %	111%



	SDM yang professional dan berkesinambungan	kompentensi jabatan menajerial					
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %	100 %	100 %		
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %		
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minamal “ BB “	75	71,20	94,9		
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	0 %	0 %		
		c. Nilai IPK	92	98,36	106,9		
		d. Nilai IKM	92	96,90	105,3		
		e. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	783,81 Utama	783,81 Utama	100%		
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %	100 %	100 %		
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %	99,56 %	101,5%		
		h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu	100 %	100 %	100%		
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %	82,91%	86,35%		
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100 %	100 %	100%		
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %	0 %	0 %		
		7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	100%
				b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100 Mpbs	100 Mpbs	100%
c. Prosestase distribusi surat	100 %			100 %	100%		
d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98%			100 %	102%		
e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100 %			100 %	100%		
f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	5			8	160 %		
g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	35			25	71 %		
h. Jumlah layanan di Pengadilan	5			5	100%		
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Orang			279 Orang	139,5 %		
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126 org			145 org	115%		
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %			100 %	100 %		



		I. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2	1/1540 M2	100 %
		m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7/884 m2	7 / 884 M2	100 %
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	638 Unit	638 Unit	100 %
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layan an	12 bulan layanan	100%
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %	70 %	87,5%
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja</b>					<b>98,52%</b>

Tabel 12 : Prosentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

Berikut penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan dari tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan dari tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna Pada Aplikasi SIMONEV LAKIP
1.	> 125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100% - 125%	Berhasil	Hijau
3.	75% - 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30% - 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5.	0% - 29,99%	Tidak Berhasi	Merah

Tabel 13 : Tabel Skala Nilai Ordinal Capaian Kinerja



No	Sasaran	Indikator	Rata – rata Capaian %	Katagori Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:		
		Perdata	58,67%	Kurang Berhasil
		Pidana	100 %	Berhasil
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	0 %	Tidak berhasil
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	96,8 %	Cukup Berhasil
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	108,9%	Berhasil
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	333%	Sangat Berhasil
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	105,6	Berhasil		
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Berhasil
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	24,3%	Tidak Berhasil
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	Tidak Berhasil
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	Tidak Berhasil
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	112%	Berhasil
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	109%	Berhasil
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	111%	Berhasil
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %	Berhasil
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	Berhasil
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	Berhasil



6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal “ BB “	94,9	Cukup Berhasil
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	0 %	Tidak Berhasil
		c. Nilai IPK	106,9	Berhasil
		d. Nilai IKM	105,3	Berhasil
		e. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	100%	Berhasil
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %	Berhasil
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	101,5%	Berhasil
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%	Berhasil
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	86,35%	Cukup Berhasil
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100%	Berhasil
		k. Pelanggaran Disiplin	0 %	Tidak Berhasil
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	100%	Berhasil
		b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100%	Berhasil
		c. Prosestase distribusi surat	100%	Berhasil
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	102%	Berhasil
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	Berhasil
		f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	160 %	Sangat Berhasil
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	71 %	Kurang Berhasil
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	100%	Berhasil
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	139,5 %	Sangat Berhasil
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	115%	Sangat Berhasil
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %	Berhasil
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	100 %	Berhasil
		m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	100 %	Berhasil
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	100 %	Berhasil
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	100%	Berhasil



8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. <b>Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan</b>	87,5%	Cukup Berhasil
---	---	--	-------	----------------

Tabel 14 : Kategori Penilaian Capaian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja dari 8 (Delapan) sasaran strategis indikator kinerja di Pengadilan Negeri Situbondo jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tergolong baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun hal-hal yang tidak memenuhi target akan dianalisa pada bagian lain dalam Bab ini. Dari hasil persentase capaian seluruh indikator sebanyak 8 (Delapan) indikator dengan kategori berhasil dan 3 (tiga) indikator sangat berhasil berhasil serta 3 (tiga) indikator tidak berhasil berhasil

### A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo 2024 merupakan tahun terakhir dalam dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama periode tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

No	Sasaran	Indikator	2024			2023			2022		
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:				100	100	100	100	100	100
		Perdata	70	58,67 %	58,67%	-	-	-	-	-	-
		Pidana	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	0 %	0 %	0 %	20	0	0	20	0	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86	96,8 %	96,8 %	85	96	113	85	95	198,8
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	108,9%	108,9 %	108,9%	90	124,5	116,8	91	105,1	116,8
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	333%	333%	333%	10	0	0	10	0	0
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	105,6	105,6	105,6	90	98,30	105,5	91	92	105,5		
2	Meningkatnya efektifitas	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100





	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	24,3%	24,3%	24,3%	10	125	125	20	25	125
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %	0	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %	0	0	0	0	0	0
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	112%	112%	112%	100	100	100	100	85,2	85,2
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	109%	109%	109%	50	100	200	50	100	200
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	111%	111%	111%	90	100	111	90	100	111
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %	100 %	100 %	97	100	103	97	100	103
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %	100 %	97	100	100	100	100	100
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal “ BB “	94,9	94,9	94,9	75	70	93	75	77	102
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	0 %	0 %	0 %	WBK	0	0	WBK	0	0
		c. Nilai IPK	106,9	106,9	106,9	92	97,06	105	92	97,06	105
		d. Nilai IKM	105,3	105,3	105,3	92	98,30	103,5	92	97,06	105
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu/ Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Pengadilan Kis IB	100%	100%	100%	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	101,5%	101,5 %	101,5%	98	102,4	104,4	98	102,4	104,4
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100%	100%	100%	98	100	102	98	100	102
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	86,35%	86,35 %	86,35%	95	93,51	97,90	95	93,51	97,90
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100%	100%	100%	97	100	103	97	100	103
		k. Pelanggaran Disiplin	0 %	0 %	0 %	1	0	0	1	0	0
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	c. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	1	1	100	1	1	100
		a. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100%	100%	100%	50 Mpbs	100 Mpbs	200	50 Mpbs	80 Mpbs	160
		b. Prosestase distribusi surat	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
		c. Prosestase tindaklanjuti surat tepat waktu	102%	102%	102%	98	100	102	98	100	102
		d. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100%	100%	100%	98	100	102	98	100	102
		e. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	160 %	160 %	160 %	3	8	260	3	5	166
		f. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	71 %	71 %	71 %	35	81	230	35	50	142,8
		g. Jumlah layanan di Pengadilan	100%	100%	100%	5	6	120	5	6	120
		h. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	139,5 %	139,5 %	139,5 %	200 Org	1211 Org	655	240 org	339 Org	141
		i. Jumlah layanan Bantuan Hukum	115%	115%	115%	34 Org	98 Org	288	34 Org	29 org	85,2
		j. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	94	100	106	100	100	100
		k. Jumlah Pemeliharaan gedung	100 %	100 %	100 %	1/ 1540 M2	1/ 1540 M2	100	1/ 1540 M2	1/1540 M2	100
		l. Jumlah Pemeliharaan rumah dinas	100 %	100 %	100 %	7 /884 M2	7 / 884 M2	100	7 /884 M2	7 /884 M2	100
		m. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	100 %	100 %	100 %	94 Unit	94 Unit	100	94 Unit	94 Unit	100
n. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	100%	100%	100%	12 bln layn	12 bln layn	100	12 bln layn	12 bln layn	100		
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	87,5%	87,5%	87,5%	80	80	100	80	80	100

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja TH 2022- 2024



Hasil perhitungan capaian kinerja diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun.

### A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dokumene Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo yang dituangkan dala dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2015 – 2019 telah berakhir pada tahun 2019. Selanjutnya target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo yang baru dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2020 – 2024. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama periode jangka menengah tahun 2015 – 2019 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (2025)%	Target 2024 (%)	Realisasi 2024(%)	Capaian 2024 (%)	Ket
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:					Tercapai
		Perdata	80	70 %	41,07%	58,67%	Tidak Tercapai
		Pidana	100	100 %	100 %	100 %	Tercapai
		b. Jumlah Putusan Pendekatan keadilan restorative	1	1 %	0 %	0 %	Tidak Tercapai
		c. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	75	86 %	83%	96,8 %	Tercapai
		d. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	95	91 %	99,1%	108,9%	Tercapai
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	10 %	33,3 %	333%	Melebihi Target i
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	91	96,10	105,6	Melebihi Target		



2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100 %	100%	100%	Tercapai
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3	10 %	2,43%	24,3%	Melebihi Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1	1%	0 %	0 %	Tidak Tercapai
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1	1 %	0 %	0 %	Tidak Tercapai
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100 %	112%	112%	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50	50 %	54,5 %	109%	Melebihi Target

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target akhir jangka menengah tahun 2025 – 2029

#### A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Republik Indonesia )

Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2024 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, juga mengacu kepada standar target kinerja dan Rancangan Rencana Strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2025 – 2029.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 dengan target kinerja pada Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Mari (2024)%	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024 (%)	Ket
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100	100	70,53	79,33	Tidak Tercapai
		Perdata		70	41,07	58,67	Tidak Tercapai
		Pidana		100	100	100	Tercapai
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	15	1	0	0	Tidak Tercapai
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	50	86	83	96,8	Tercapai
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50	91	99,1	108,9	Tercapai
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	25	10	33,3	333	Tidak Tercapai
f. Index responden	80					Tercapai	



		pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		91	96,10	105,6	
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	20	100	100	100	Tercapai
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	10	2,38	23,8	Tercapai
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	30	1	0	0	Tercapai
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	1	0	0	Tidak Tercapai
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	Tercapai
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	75	50	54,5	109	Tercapai

Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Hasil perhitungan capaian kinerja pada table diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan data pada tabel hasil realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 – 2024.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 2024 nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tergolong Sangat Baik.



Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Wilayah	Nama Satker	Tingkat	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
					Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	
11	0500	098104	Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Surabaya	Tingkat Banding	72.67	BB	58.60	CC	62.34	B	63.81	B	65.76	B	70.60	BB
12	0500	098111	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Surabaya	Tingkat Pertama	69.68	B	72.24	BB	76.19	BB	79.53	BB	79.54	BB	78.00	BB
3	0500	098125	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bojonegoro	Tingkat Pertama	69.68	B	70.33	BB	72.50	BB	80.30	A	80.25	A	76.00	BB
4	0500	098132	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Tuban	Tingkat Pertama	68.50	B	71.11	BB	70.48	BB	77.46	BB	77.45	BB	77.00	BB
5	0500	098146	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Lamongan	Tingkat Pertama	69.59	B	72.82	BB	72.82	BB	77.88	BB	77.85	BB	77.00	BB
6	0500	098150	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Gresik	Tingkat Pertama	69.26	B	72.67	BB	73.42	BB	78.58	BB	78.55	BB	77.00	BB
7	0500	098167	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Tingkat Pertama	68.04	B	72.81	BB	72.81	BB	77.88	BB	77.85	BB	80.00	BB
8	0500	098171	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Mojokerto	Tingkat Pertama	69.94	B	70.33	BB	79.46	BB	82.13	A	82.05	A	83.00	A
9	0500	098188	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Jombang	Tingkat Pertama	70.22	BB	72.92	BB	79.28	BB	80.31	A	80.25	A	76.00	BB
10	0500	098192	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bondowoso	Tingkat Pertama	68.12	B	66.04	B	79.42	BB	82.28	A	82.23	A	79.00	BB
11	0500	098200	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Jember	Tingkat Pertama	69.76	B	71.65	BB	80.57	A	82.57	A	81.54	A	86.00	A
12	0500	098214	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bluwangi	Tingkat Pertama	69.66	B	69.68	B	79.59	BB	82.28	A	82.25	A	84.00	A
13	0500	098221	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Situbondo	Tingkat Pertama	68.86	B	71.65	BB	79.28	BB	82.03	A	83.50	A	77.00	BB
14	0500	098235	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kediri	Tingkat Pertama	70.48	BB	83.98	A	84.05	A	84.51	A	84.50	A	81.00	A
15	0500	098242	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Nganjuk	Tingkat Pertama	68.77	B	71.17	BB	72.75	BB	75.45	BB	75.35	BB	77.00	BB
16	0500	098256	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Tulungagung	Tingkat Pertama	70.28	BB	75.07	BB	75.23	BB	88.65	A	88.62	A	83.00	A
17	0500	098260	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Trenggalek	Tingkat Pertama	68.34	B	70.60	BB	70.70	BB	80.30	A	80.03	A	78.00	BB
18	0500	098277	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Blitar	Tingkat Pertama	70.45	BB	71.83	BB	71.90	BB	75.79	BB	75.78	BB	77.00	BB
19	0500	098281	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Malang	Tingkat Pertama	69.84	B	70.04	BB	71.51	BB	76.34	BB	76.50	BB	88.00	A
20	0500	098288	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pasuruan	Tingkat Pertama	70.55	BB	81.65	A	71.41	BB	80.30	A	80.25	A	83.00	A
21	0500	098303	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Probolinggo	Tingkat Pertama	70.01	BB	71.70	BB	72.04	BB	72.32	BB	72.31	BB	89.00	A
22	0500	098310	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Lumajang	Tingkat Pertama	68.85	B	71.19	BB	72.45	BB	75.90	BB	75.78	BB	76.00	BB
23	0500	098324	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bangli	Tingkat Pertama	68.92	B	70.99	BB	71.51	BB	77.96	BB	76.65	BB	82.00	A
24	0500	098331	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kraksaan	Tingkat Pertama	68.16	B	69.68	B	72.15	BB	80.05	A	80.02	A	80.00	BB
25	0500	098345	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Madiun	Tingkat Pertama	70.60	BB	64.62	B	69.51	B	79.51	BB	79.50	BB	76.00	BB
26	0500	098352	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Ponorogo	Tingkat Pertama	69.42	B	72.27	BB	68.81	B	80.30	A	80.05	A	76.00	BB
27	0500	098366	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pacitan	Tingkat Pertama	69.27	B	72.42	BB	62.95	B	80.30	A	80.05	A	79.00	BB
28	0500	098370	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Ngawi	Tingkat Pertama	69.21	B	71.17	BB	62.95	B	72.31	BB	72.30	BB	73.00	BB
29	0500	098387	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Magetan	Tingkat Pertama	70.09	BB	71.13	BB	65.85	B	80.30	A	80.03	A	80.00	BB
30	0500	098391	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pamekasan	Tingkat Pertama	70.07	BB	71.40	BB	73.29	BB	80.30	A	80.25	A	76.00	BB
31	0500	098409	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sumenep	Tingkat Pertama	69.50	B	72.27	BB	75.66	BB	74.12	BB	74.15	BB	78.00	BB
32	0500	098413	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bangkalan	Tingkat Pertama	70.10	BB	69.68	B	75.54	BB	77.53	BB	77.50	BB	70.00	B
33	0500	098420	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sampang	Tingkat Pertama	69.37	B	71.65	BB	76.46	BB	79.44	BB	78.55	BB	76.00	BB
34	0500	400580	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Tingkat Pertama	70.33	BB	81.65	A	81.67	A	80.30	A	80.25	A	86.00	A
35	0500	400596	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	Tingkat Pertama	70.60	BB	73.60	BB	69.15	B	77.46	BB	79.52	BB	84.00	A

Gambar 4 Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Situbondo Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021

#	Satker/Wilayah	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2017
1.	Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur	BB	BB	A	A	BB	BB

Gambar 5 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas

3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **70,6** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24

Gambar 6 : Nilai AKIP Tahun 2022 Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERALIHAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

JALAN HUMBATA NO. 42 SURABAYA 60132  
TELEP. (031) 250408 HUBUNG, 2504095, FAX (031) 2504042, 2504055

Nomor : 4640/KPT/W/14-U/OT/01.2/8/2023  
Lampiran :  
Hal :  
Surabaya, 8 Agustus 2023

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Situbondo

Vib.  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo  
di:  
**SITUBONDO**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.1/SK/OT/01.1/05/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Penugasan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pengadilan Tinggi Surabaya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dimaksudkan untuk:
  - Mempertahankan inferansi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - Mengidentifikasi kelemahan kinerja;
  - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - Memastikan tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar 70,6 atau **BB (Sangat Baik)**

4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori/Sub-kategori/kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24

\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA RI, dan telah terverifikasi menggunakan teknologi tanda tangan elektronik.

2. Perencanaan Kinerja	30,00	22,5
3. Pelaporan Kinerja	15,00	9,15
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>70,6</b>
		<b>BB (Sangat Baik)</b>

Gambar 7 : Nilai AKIP Tahun 2023 Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

N o	Tahun	Komponen/Sub. Komponen/Kreteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas	Skor	Ket
1	2016				68.86	B
2	2017				71.65	BB
3	2018				79.28	BB
4	2019				82.03	A
5	2020				83.50	A
6	2021				77.00	BB
7	2022	1. Perencanaan Kinerja	30,00	24		
		2. Pengukuran Kinerja	30,00	22,5		
		3. Pelaporan Kinerja	15,00	9,15		
		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15		
		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>70,6</b>	<b>BB</b>	<b>Sangat Baik</b>
8	2023	1. Perencanaan Kinerja	30,00	21,60		
		2. Pengukuran Kinerja	30,00	21,60		
		3. Pelaporan Kinerja	15,00	10,50		
		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50		
		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>71,20</b>	<b>BB</b>	<b>Sangat Baik</b>

**Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Situbondo**

**A. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja



tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

## SASARAN STRATEGIS 1

### Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pengadilan Negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 128 / SK.KPN/I/ 2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo , sasaran strategis ini diukur melalui 8 (Delapan) indikator kinerja utama sebagai berikut.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretaraiatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Adapun realisasi dan capaian target Kinerja Strategis 1 :

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut mempunyai 6 ( Enam ) indikator kinerja diantaranya :

No	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
	Perdata	70 %	41,07%	58,67%
	Pidana	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1 %	0 %	0 %
3	Persentase perkara yang tidak	86 %	83%	96,8 %



	mengajukan upaya hukum Banding			
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %	99,1%	108,9%
5	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %	33,3 %	333%
6	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	96,10	105,6
<b>RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA</b>				<b>114,71%</b>

Tabel 19 : Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

**1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

- Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan perhitugan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Untuk perkara perdata dari 80 ( sisa 23 dan masuk 57) maka ada 49 jumlah perkara yang diselesaikan dan 27 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2024 sebesar 58,67% tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk perkara pidana dari 248 (sisa 36 dan masuk 212) jumlah perkara yang diselesaikan 226 dan 226 perkara diselesaikan tapat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan Capaian kinerja digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	70%	41,07%	58,67%





Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 20 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselsaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	49	27	70 %	41,07%	58,67%
	Pidana	246	246	100%	100%	100%
2023	Perdata	192	192	100%	100%	100%
	Pidana	191	191	100%	100%	100%
2022	Perdata	218	218	100%	100%	100%
	Pidana	181	181	100%	100%	100%

Tabel 21 : Perbandingan capaian kinerja tepat waktu

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut :

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sampai dengan 2024 mencapai 70,53 %. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dihitung sejak mediasi gagal atau semenjak gugatan dibacakan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi khususnya pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding . Pada tahun 2024 semua perkara pidana diselesaikan tepat waktu sedangkan perdata masih



sebagian yang diselesaikan tepat waktu . Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo berjalan dengan baik.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo yaitu diantaranya :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA grub setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo
3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-rapat insidentil, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo selalu menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku.
4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.

Hasil kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah terbukti sangat baik dan pada tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan berupa : Piagam penghargaan EIS SIPP dari Pengadilan Tinggi Surabaya Peringkat I Katagori Pengadilan Negeri Kelas I 1 s/d 500 Perkara

5. Namun ditahun 2024 tidak memperoleh penghargaan EIS SIPP dari Pengadilan Tinggi Surabaya



*Gambar 7.  
Piagam Penghargaan (EIS) Evaluasi Implementasi SIPP dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Peringkat Ke- 1 Bulan Januari – Oktober 2023 Pengadilan Kelas I B Kategori 1 s/d 500 perkara*

**2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif**

- Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbandingan



antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.

- Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice .
- Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Situbondo tidak terdapat perkara yang diajukan melalui pendekatan restorative justice, jadi realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah 0%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	0%

Tabel 22 : Persentase capaian Kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Penerapan Restoratif justice di Pengadilan belum ada petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Agung terkait penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/ 12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice. Dan Perma 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan restorative dimana system pemidaan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan (terdakwa) melainkan mengarah pada pencapaian keadilan kepada perbaikan dan kepentingan pemulihan korban serta pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative atau Restorative Justice

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative waktu tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada table berikut :



Tahun	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2024	1%	0%	0%
2023	0%	0%	0%
2022	0%	0%	0%

Tabel 23: Prosentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2022 – 2024

Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata prosentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tidak ada perubahan atau diatas 0% , jika dilihat prosentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif hampir tidak pernah ada

**3. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,**

- Indikator prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Untuk perkara perdata 49 perkara yang diputus 21 perkara menyatakan banding, jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 28 perkara. Dan Untuk perkara pidana 226 perkara Pidana yang putus, 25 perkara menyatakan banding, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 201 perkara. Target pada indikator ini adalah 86 %, sedangkan realisasinya adalah 83 %,

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 250 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 229. Target pada indikator ini adalah 86%, sedangkan



realisasinya adalah 83%, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 96,8 % Capaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	86 %	83%	96,8 %

Tabel 24: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024

Perbandingan target realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2024	275	229	86%	83 %	96,8 %
2023	321	310	85 %	97 %	114 %
2022	382	351	85%	108,8 %,	120,8 %

Tabel 25: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan tidak mencapai target .

Jika dilihat jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding angkanya akan meningkat jika dibandingkan dengan perkara yang putus berarti masyarakat kurang menunjukkan apresiasi yang baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo

**4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.**

- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.



- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunutasi pada tahun berjalan pada peradilan tingkat dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara yang diputus bebas murni , Perkara Niaga , sengketa Pemilu , PHI dan perkara permohonan perkara Perdata

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Untuk perkara pidana 226 perkara yang diputus ada 2 perkara pidana yang diputus bebas dan menyatakan Kasasi yaitu :

1. Perkara Nomer : 127/PID.SUS/2024/PN.Sit atas nama Terdakwa Moh Sholeh als. Pak Indah Bin Satun Alm.
2. Nomer :128/PID.SUS/2024/PN.Sit, atas nama Terdakwa Herno als. Pak Astutik Bin Pak Busiman Alm

Maka perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 224 perkara. Target pada indikator ini adalah 91%, sedangkan realisasinya adalah 99,1 %, Sedangkan untuk perkara Perdata Permohonan ada 66 Perkara namun yang menyatakan Kasasi Nihil

Target pada indikator ini adalah 91%, sedangkan realisasinya adalah 99,1%, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 108,9%,. Capaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	91 %	99,1%	108,9%

Tabel 26 : Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2024

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 3 tahun terakhir:



Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2024	292	290	91 %	99,1 %	108 %
2023	321	317	90 %	99 %	101 %
2022	382	363	90 %	105,14%	116,8 %

Tabel 27: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan atau diatas 100%, Jika dilihat jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sangat kecil, jika dibandingkan dengan perkara yang putus masyarakat menunjukkan apresiasi yang baik terhadap Pengadilan Negeri Situbondo.

5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

- Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.
- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2024, perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo, sebanyak 10 perkara. Dan 3 perkara pidana anak yang diajukan diversi , **ada 1 Perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan Diversi Nomer : 2 /PID.Sus-Anak/2024/PN.Sit atas nama Terdakwa Akbar Maulana Ishaq bin Suharsono dan 2 perkara anak yang tidak berhasil .**

Pengadilan Negeri Situbondo, dan perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, Target yang hendak dicapai adalah 10% maka hanya 1 perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, Capaian target indikator ini



digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %	33,3 %	333%

Tabel 28: Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja prosentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi 3 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara diversifikasi	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2024	10	3	10%	33,3%,	333%,
2023	3	0	10%	0%,	0%,
2022	2	0	10%	0%,	0%,

Tabel 29: Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator prosentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi capaian kinerjanya sudah tercapai dan melebihi Target, namun apabila dilihat dari jumlah perkara anak yang masuk masih sedikit dan sudah tercapai diselesaikan dengan diversifikasi, hal ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya:

1. Penyelesaian perkara diversifikasi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi.

Syarat Diversifikasi pada Pasal 7 UU SPPA:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk penyelesaian perkara dengan diversifikasi adalah sebagai berikut :





1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.

**6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.**

- Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan PERMENPAN No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- Nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus > 80. Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Peroide	Jumlah Responden	Hasil Survei	Keterangan
1	Triwulan I ( Januari – Maret)	50	95,83 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
2	Triwulan II ( April – Juni)	41	96,07 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
3	Triwulan III ( Juli – September)	154	96,87 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
4	Triwulan IV ( Oktober- Desember)	109	98,75 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
<b>Total</b>		354	96,88%	

Tabel 30 : Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	91	96,88	106,4

Tabel 31 : Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2024 adalah 91, sedangkan realisasinya adalah 96,88 sehingga Capaian kinerja



untuk indikator ini adalah sebesar 106,4

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	91	96,88,	106,4
2023	90	95,68	106,3
2022	90	95,27,	105,5

**Tabel 32 : Perbandingan Capaian Kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Table diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan maupun pelayanan PTSP diantaranya:

1. Petugas PTSP mengikuti pelatihan tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia cabang Situbondo .
2. Tersedianya pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara melalui E-court
3. Tersedianya mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara perdata dan PNPB
4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Situbondo
5. Ada kompensasi pelayanan bagi pengguna pengadilan apabila layanan yang diberikan pada PTSP + tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
6. Adanya sarana dan prasarana penyandang difabel.
7. Tersedianya ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan
8. Tersedianya ruang tamu terbuka yang nyaman bagi tamu
9. Tersedia Jaringan Internal yang didapat diakses oleh pengunjung PTSP dan pengguna layanan Pengadilan.



## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mengetahui capaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara terdapat 2 (Dua) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	2,43%	24,3%
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				62,15%

Tabel 33: Prosentase Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2

#### 1. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

- Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan kepara pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 487/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan perkara
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tetap waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi tahun berjalan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan SEMA Nomor : 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan perkara Perdata

Dengan perhitungan sebagai berikut:

*Laporan Kinerja Tahun 2024 – Pengadilan Negeri Situbondo*



**Jumlah Salinan Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu**

**Jumlah Putusan**

**x 100%**

Tahun 2024 terdapat 49 perkara Perdata dan 226 perkara Pidana yang putus, salinan putusnya semuanya telah dikirimkan tepat waktu, sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang putus baik perkara Perdata 49 dan pidana 226 Total 275 berkas, salinan putusan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%, Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

**Tabel 34 : Prosentase Capaian salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu**

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2024	Perdata	49	49	100%	100%	100%
	Pidana	226	226	100%	100%	100%
2023	Perdata	192	192	100%	100%	100%
	Pidana	127	127	100%	100%	100%
2022	Perdata	218	218	100%	100%	100%
	Pidana	181	181	100%	100%	100%

**Tabel 35: Perbandingan Capaian Prosentase salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu**

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2024, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Situbondo dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi. Semua ini tidak



terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu meningkatkan kredibilitasnya dalam hal penyampaian salinan putusan dan upaya yang dilakukan diantaranya adalah menggunakan Elektronik E-Court untuk perkara perdata dan E Berpadu untuk perkara Pidana dan bagi Para Pihak yang tidak mempunyai Akses atau Akun penyampaian atau pengiriman salinan putusan kepada Penggugat , Tergugat Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan Pengiriman melalui Pos Giro Tercepat dan dipastikan oleh pihak Pos Giro 1 x 24 Jam dapat diterima oleh Para Pihak, baik perkara perdata maupun pidana .

## 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan Mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian ( Putusan Perdamaian ) Mediasi tidak dapat di laksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi yang berhasil .
- Jumlah perkara mediasi adalah jumlah perkara gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan
- Jumlah kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi
- Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1 Tahun 2016.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tahun 2024 ada 41 perkara perdata yang di lakukan mediasi 1 perkara diantaranya berhasil, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 2,43%

Target untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 10 %, sedangkan realisasinya adalah sebesar 2,43% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 24,3%

Capaian target digambarkan sebagai berikut:



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	2,43%	24,3%

Tabel 36 : Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini periode 2022 – 2024 dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Yang di lakukan mediasi	Jumlah Perkara Yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2024	41	1	10%	2,43%	24,3 %
2023	47	5	10%	106%	882 %
2022	83	5	20%	60%	300%

Tabel 37 : Perbandingan Capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi

### SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

untuk mengetahui capaian Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara Prodeo yang diselsaikan	1 %	0 %	0 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %	0 %	0 %
3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	112%	112 %
<b>RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA</b>				<b>37,3%</b>

Tabel 38 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 3

#### 1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

- Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah



perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.

- Penyelesaian perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Situbondo, sedangkan Target adalah 1 % , sehingga persentase realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Capaian target digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%

Tabel 40 : Persentase Capaian perkara prodeo yang diselesaikan

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 0 %, berbanding lurus dengan capaian pada 3 tahun sebelumnya, dimana target untuk penyelesaian perkara prodeo tidak dapat direalisasikan karena pada tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	1%	0%	0%
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Tabel 40 : Perbandingan capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan

2. **Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan**

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan



diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.

- Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan ( Zetting Plaatz , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya )
- Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan Perwalian / Ijin menjual bagi anak yang belum dewasa, ganti nama, ijin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, tidak terdapat perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, jadi untuk realisasi tahun ini adalah 0%.

Dengan demikian capaian indikator ini dapat tercapai / terlaksana, Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0%	0%

Tabel 41: Persentase Capaian perkara perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Yang diajukan diselesaikan diluar gedung	Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung	Target	Realisasi	Capaian
2024	0	0	1%	0%	0%
2023	0	0	0%	0%	0%





2022	0	0	0%	0%	0%
------	---	---	----	----	----

Tabel 42 : Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan

**3. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat yang mendapat bantuan hukum ( Posbakum ) .**

- Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan layanan hukum
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- Jumlah layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum
- Pelaksanaan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 290 layanan , sedangkan jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan pada posbakum adalah 145 orang, sedangkan target 129 orang sehingga realisasi tahun 2024 adalah sebesar 112%.

Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Situbondo :

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Layanan	Pemohon Layanan
1	2024	Januari	23 Layanan	11 Pemohon
2	2024	Februari	19 Layanan	9 Pemohon
3	2024	Maret	20 Layanan	10 Pemohon
4	2024	April	20 Layanan	10 Pemohon



5	2024	Mei	21 Layanan	11 Pemohon
6	2024	Juni	20 Layanan	11 Pemohon
7	2024	Juli	26 Layanan	13 Pemohon
8	2024	Agustus	26 Layanan	13 Pemohon
9	2024	September	28 Layanan	14 Pemohon
10	2024	Oktober	29 Layanan	15 Pemohon
11	2024	November	27 Layanan	13 Pemohon
12	2024	Desember	31 Layanan	15 Pemohon
		Jumlah	290 Layanan	145 Pemohon

Tabel 43 : Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum di targetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 112%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 112%, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
<b>Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)</b>	100%	112%	112%
	129 orang	145 orang	

Tabel 44 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Permohonan layanan Hukum	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2024	129	145	100 %	112 %	112 %
2023	96	96	100 %	100 %	100 %
2022	30	30	100 %	100 %	100 %

Tabel 45 : Perbandingan Capaian Kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)



Dari table diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan terbaik yaitu diantaranya, Pengadilan Negeri Situbondo telah menanda tangani MOU dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu dan sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Situbondo dan melalui website.

## SASARAN STRATEGIS 4

### Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk mengetahui capaian tingkat Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan terdapat 1 (satu) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut ada

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50 %	54,5 %	109%
<b>RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA</b>				<b>109%</b>

Tabel 46 : Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4

#### 1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi).

- Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun 2024.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}}$$

x 100%



Tahun 2024 terdapat 11 perkara permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo , dan 6 perkara telah selesai di tindak lanjuti, jadi realisasi pada indikator ini adalah 54,5 %.

Target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 50%, sedangkan realisasinya adalah 54,5 %, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 109 %. dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50 %	54,5 %	109%

Tabel 47 : Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Dengan melihat tercapainya target kinerja pada indikator ini menandakan masyarakat pencari keadilan telah puas dengan putusan pengadilan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Jumlah permohonan Eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
2024	6	11	50%	54,5%	109%
2023	2	8	50%	25%	50%
2022	18	18	50%	100%	200%

Tabel 48 : Perbandingan capaian Kinerja putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

## SASARAN STRATEGIS 5

### Mewujudkan Manajemen SDM yang Profesional dan berkesinambungan

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan terdapat 4 (empat ) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	90 %	100 %	111%
2	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %	100 %	100 %
3	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	Persentase pengsuluan pensiun tepat waktu	100 %	100 %	100 %
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				102,75%

Tabel 49: Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 5

1. **Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial ,**

- Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi standart kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo.
- Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo
- Jabatan Manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua.
  - b. Wakil Ketua.
  - c. Panitera.
  - d. Sekretaris.
  - e. Panitera Muda Pidana.
  - f. Panitera Muda Perdata.
  - g. Panitera Muda Hukum .
  - h. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  - i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.
  - j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dengan perhitungan sebagai berikut



**Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial**

**x 100%**

**Jumlah Pemangku Jabatan**

Tahun 2024, jumlah Jabatan Manajerial yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 10 orang, sedangkan yang telah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah 9 orang, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Situbondo yang telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang dimiliki:

No	Nama/Jabatan	Diklat Manajerial Yang Pernah diikuti	Tahun Pelaksanaan Diklat
1.	Achmad Rasjid, SH (Ketua)	• Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	2021
		• Sertifikasi Niaga Kepailitan dan PKPU Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia.	2021
		• Sertifikat Pelatihan Singkat Tentang Kewenangan Mengadili Perkara Persaingan Usaha Bagi Hakim Dan Panitera/Panitera Muda	2021
		• Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tk. Pertama	2024
2.	Haries Suharman Lubis, SH. MH. (Wakil Ketua)	• Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XII	2021
		• Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan Mempersiapkan Generasi Emas	2022
		• Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Hakim Peradilan Seluruh Indonesia.	2023
		• Pelatihan Sertifikasi Niaga (Kepailitan dan PKPU) Bagi Hakim Seluruh Indonesia.	2023
		• Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Terorisme	2023
		• E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	2024
3.	I Ketut Sueca, S.H. (Panitera)	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Hakim dan Panitera Pengadilan Tk. Pertama	2024
4.	Iwan Mulyono, S.H. (Plt. Sekretaris)	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2020
5.	Haryono, SH	Bimtek Panitera Pengganti	2010
6.	Khudzaifah, SH	Bimtek Panitera Pengganti	2019
7.	Abd. Mukti, SH	Bimtek Panitera Pengganti	2021
8.	Intan Mustika Atmaningrum, SH	Bimtek Keuangan dan BMN	2022
9.	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H.	Training Of Trainer (TOT) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	2009



Tabel 50 : NamaTabel Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

Dengan demikian capaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini , dapat dilihat dari data berikut :

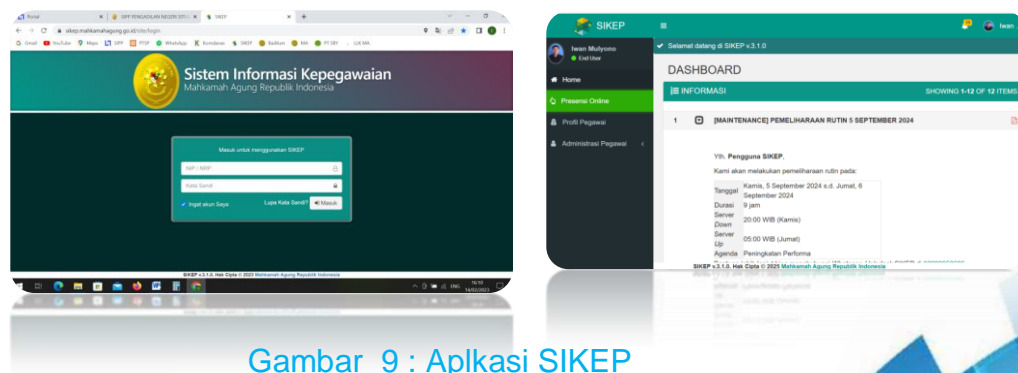
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111%

Tabel 51 : Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial

Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial di targetkan 90 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 111 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

**2. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian**

- Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).
- Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat website [sikep.mahkamahagung.go.id](http://sikep.mahkamahagung.go.id)

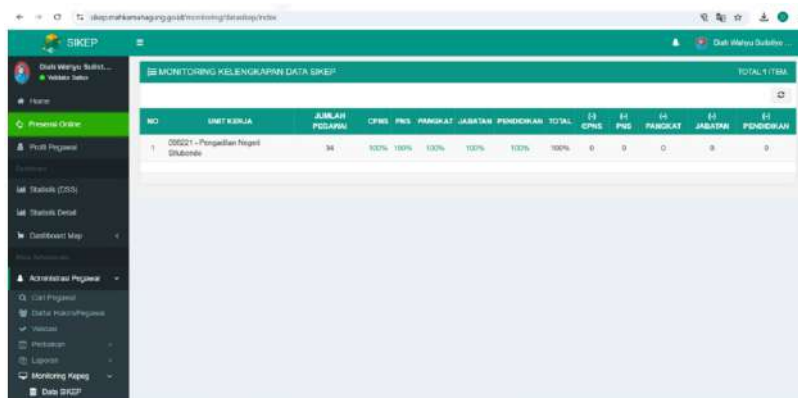


Gambar 9 : Aplikasi SIKEP

Apabila dilihat dari monitoring kepegawaian dari aplikasi SIKEP tahun 2024,



baik pada monitoring kelengkapan data maupun kelengkapan e-doc, kelengkapan data SIKEP Pengadilan Negeri Situbondo menunjukkan angka 100%, dengan demikian, realisasi pada indikator ini tercapai yaitu sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Gambar 10 : Monitoring Kelengkapan E – DOC SIKEP

Capaian Kinerja pada indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2024 dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	100%	100%	100%

Tabel 52 : Persentase Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian

Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian ditargetkan 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelengkapan data kepegawaian di Pengadilan Negeri Situbondo telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. **Persentase Layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu**

- Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2024 dengan pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu.
- Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 2 (dua) periode terhitung pada bulan April dan Oktober. Apabila TMT kenaikan pangkat jatuh pada





bulan April, maka pengusulan Kenaikan Pangkatnya dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan begitu pula apabila pegawai yang Kenaikan Pangkatnya jatuh pada bulan Oktober, diusulkan pada bulan April tahun yang sama.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang naik Pangkat}} \times 100\%$$

Tahun 2024, jumlah pegawai yang naik pangkat sebanyak 5 ( Lima ) orang pegawai dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	I Ketut Sueca , SH	Panitera	TMT 1 April 2024
2.	Sugianto , SH.	Panitera Pengganti	TMT 1 April 2024
3.	Achmad Rasjid, SH.	Ketua	TMT 1 Oktober 2024
4	I Made Muliarta	Hakim	TMT 1 Oktober 2024
5	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, SH.	Kasub.Bag.Kepegawain dan Ortala	TMT 1 Oktober 2024

Tabel 53 : Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2024

Capaian Kinerja pada indikator persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 50 : Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu

Dari 5 (Lima) pegawai yang naik pangkat pada tahun 2024, semuanya telah mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu ditargetkan 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %.



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat	Jumlah Layanan kenaikan pangkat Tepat Waktu	Realisasi
2024	5	5	100%
2023	4	4	100%
2022	3	3	100%

Tabel 55 : Perbandingan capaian layanan kenaikan pangkat tepat waktu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua kenaikan pangkat diproses secara tepat waktu oleh Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Situbondo melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan tidak ada keterlambatan dalam layanan kenaikan pangkat pegawai.

4. **Persentase Pengusulan Pensiun tepat waktu**

- Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dengan pegawai yang mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Pensiun}} \times 100\%$$

Daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Annang Mardiyanto, S.H.	Kasub.bag Kepegawaian dan Tata Laksana	1 Februari 2024
2	Sri Retnaningsih	Panitera Pengganti	1 Maret 2024
3	Sutoto Winarno, S.H.	Sekretaris	1 Juni 2024
4	Arif Bakhtiar, S.H.	Panitera Pengganti	1 Nopember 2023

Tabel 56 : Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2024



Capaian Kinerja pada indikator persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase Pengusulan Pensiun tepat waktu	100%	100%	100%

**Tabel 57 : Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023**

Dari 4 (dua ) pegawai yang pensiun pada tahun 2024, semuanya telah diusulkan tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase pengusulan pensiun tepat waktu ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100 %. Perbandingan Jumlah pegawai yang diusulkan pensiun tepat waktu tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Usulan Pensiun Tepat Waktu	Realisasi
2024	4	4	100%
2023	4	4	100%
2022	2	2	100%

**Tabel 58 : Perbandingan Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu**

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa semua pegawai yang akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan pensiun. Pengusulan pensiun pegawai dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun pegawai yang bersangkutan.

## SASARAN STRATEGIS 6

### Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang baik

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang Baik terdapat 11 (Sebelas) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut adalah:

N o	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6

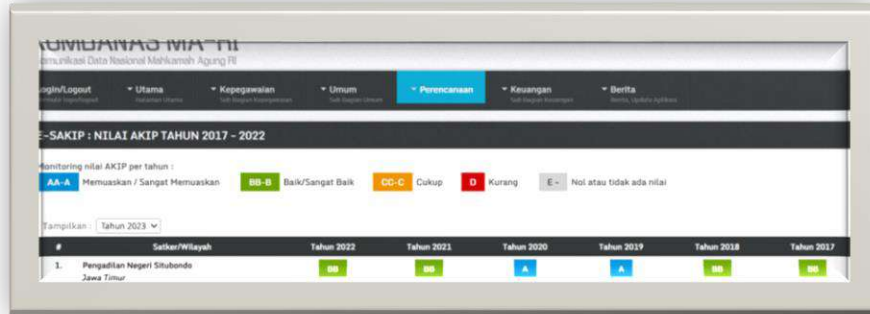


1	Nilai LKJP Minimal “ BB “	75	71,20	94,9
2	Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	0 %	0 %
3	Nilai IPK	92	98,36	106,9
4	Nilai IKM	92	96,90	105,3
5	Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	783,81 Utama	783,81 Utama	100%
6	Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %	100 %	100 %
7	Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %	99,56 %	101,5%
8	Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	100 %	100 %	100%
9	Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %	82,91%	86,35%
10	Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100 %	100 %	100%
11	Pelanggaran Disiplin	1 %	0 %	0 %
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				81,35 %

Tabel 59 : Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6

#### 1. Nilai LKJIP Minimal “ BB “

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Negeri Situbondo telah
- melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan evaluasi.
- Hasil dari Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Surabaya, tahun 2022, Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan nilai 70 (BB).. dapat dilihat dari data berikut :



Gambar 11 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas

3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **70,6** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24



• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE  
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Gambar 12 Nilai AKIP tahun 2022 dari Pengadilan Tinggi Surabaya

Wilayah	Sakip	Wilayah	Tingkat	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori	
0500	098104	Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Surabaya	Tingkat Banding	72,67	BB	53,60	CC	62,34	B	63,81	B	65,76	B
0500	098111	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Surabaya	Tingkat Pertama	69,68	B	72,24	BB	76,19	BB	79,53	BB	79,54	BB
0500	098125	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bojonegara	Tingkat Pertama	69,68	B	70,33	BB	72,50	BB	80,30	A	80,25	A
0500	098132	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Tuban	Tingkat Pertama	68,50	B	71,11	BB	70,48	BB	77,46	BB	77,45	BB
0500	098146	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Lamongan	Tingkat Pertama	69,59	B	72,82	BB	72,82	BB	77,88	BB	77,85	BB
0500	098150	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Gresik	Tingkat Pertama	69,26	B	72,67	BB	73,42	BB	78,58	BB	78,55	BB
0500	098167	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Tingkat Pertama	68,04	B	72,81	BB	72,81	BB	77,88	BB	77,85	BB
0500	098171	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Mojokerto	Tingkat Pertama	69,94	B	70,33	BB	79,46	BB	82,13	A	82,05	A
0500	098188	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Jombang	Tingkat Pertama	70,22	BB	72,92	BB	79,28	BB	80,31	A	80,25	A
0500	098192	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bondowoso	Tingkat Pertama	68,12	B	68,04	B	79,42	BB	82,28	A	82,23	A
0500	098200	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Gresik	Tingkat Pertama	69,78	B	72,67	BB	76,19	BB	80,31	A	80,25	A
0500	098214	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Blauwara	Tingkat Pertama	69,66	B	69,68	B	79,59	BB	82,28	A	82,25	A
0500	098221	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Situbondo	Tingkat Pertama	68,86	B	71,65	BB	79,28	BB	82,03	A	81,50	A
0500	098235	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kediri	Tingkat Pertama	70,48	BB	83,98	A	84,05	A	84,51	A	84,50	A
0500	098242	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Nganjuk	Tingkat Pertama	68,77	B	71,17	BB	72,75	BB	75,45	BB	75,35	BB
0500	098256	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Tulungagung	Tingkat Pertama	70,28	BB	75,07	BB	75,23	BB	88,65	A	88,62	A
0500	098260	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Trenggales	Tingkat Pertama	68,34	B	70,60	BB	70,70	BB	80,30	A	80,03	A
0500	098277	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Blitar	Tingkat Pertama	70,45	BB	71,83	BB	71,90	BB	75,79	BB	75,78	BB
0500	098281	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Malang	Tingkat Pertama	69,84	B	70,04	BB	71,51	BB	76,34	BB	76,50	BB
0500	098298	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pasuruan	Tingkat Pertama	70,55	BB	81,65	A	71,41	BB	80,30	A	80,25	A
0500	098303	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Probolinggo	Tingkat Pertama	70,01	BB	71,70	BB	72,04	BB	72,32	BB	72,31	BB
0500	098310	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Lumajang	Tingkat Pertama	68,85	B	71,19	BB	72,45	BB	75,90	BB	75,78	BB
0500	098324	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bangli	Tingkat Pertama	68,92	B	70,99	BB	71,51	BB	77,96	BB	76,65	BB
0500	098331	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kraksaan	Tingkat Pertama	68,16	B	69,68	B	72,15	BB	80,05	A	80,02	A
0500	098345	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Madiun	Tingkat Pertama	70,60	BB	84,62	A	69,51	B	79,51	BB	79,50	BB
0500	098352	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Ponorogo	Tingkat Pertama	69,42	B	72,27	BB	68,81	B	80,30	A	80,05	A
0500	098366	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pacitan	Tingkat Pertama	69,27	B	72,42	BB	62,95	B	80,30	A	80,05	A
0500	098370	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Ngawi	Tingkat Pertama	69,21	B	71,17	BB	62,95	B	72,31	BB	72,30	BB
0500	098387	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Magetan	Tingkat Pertama	70,09	BB	71,13	BB	65,85	B	80,30	A	80,03	A
0500	098391	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Pamekasan	Tingkat Pertama	70,07	BB	71,40	BB	73,29	BB	80,30	A	80,25	A
0500	098409	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sumenep	Tingkat Pertama	69,50	B	72,27	BB	75,66	BB	74,12	BB	74,15	BB
0500	098410	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Bangkalan	Tingkat Pertama	70,10	BB	69,68	B	75,54	BB	77,53	BB	77,50	BB
0500	098420	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Sampang	Tingkat Pertama	69,37	B	71,65	BB	76,46	BB	79,44	BB	78,55	BB
0500	400580	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	Tingkat Pertama	70,13	BB	81,65	A	81,67	A	80,30	A	80,25	A
0500	400596	Jawa Timur	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	Tingkat Pertama	70,60	BB	71,60	BB	69,15	B	77,46	BB	75,51	BB

Gambar 13 Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021

Capaian target kinerja Nilai LKJiP minimal BB dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai LKJiP minimal BB	75	71,20	94,9 %

Tabel 56 : Persentase capaian Nilai LKJiP



Target nilai LKJIP Pengadilan Negeri Situbondo adalah “BB” sedangkan realisasinya adalah “BB”, sehingga realisasi untuk indikator ini tercapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. maka pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %,.

Berikut ini kami sajikan perbandingan nilai LKJIP Pengadilan Negeri Situbondo dalam tabel berikut:

Tahun	Nilai AKIP	Kategori
2023	71,20	BB
2022	70,6	BB
2021	77,00	BB

Tabel 61 : Perbandingan Persentase capaian Nilai LKJIP

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa nilai AKIP Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2023 mengalami Kenaikan , dimana pada tahun sebelumnya nilai AKIP Pengadilan Negeri Situbondo 71,20 Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu berusaha mempertahankan dan mengembangkan personil yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan dalam pelatihan atau diklat akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh tingkat banding maupun Mahkamah Agung

## 2. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

- Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pengadilan Negeri Situbondo mencanangkan Zona Integritas sejak tahun 2019
- Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Tahun 2024 capaian indikator ini dan Target pada indikator kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dapat meraih WBK, namun realisasinya



Pengadilan Negeri Situbondo belum bisa meraih WBK, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini, dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
<b>Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM</b>	WBK	0%	0%

Tabel 62 : Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM

Target pada indikator kinerja ini adalah pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Situbondo dapat meraih WBK, namun realisasinya Pengadilan Negeri Situbondo belum bisa meraih WBK, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%.

Keterangan	Tahun		
	2022	2023	2024
<b>Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM</b>	0%	0%	0%
<b>Persentase</b>	0%	0%	0%

Tabel 63 : Perbandingan Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM



Gambar 14. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019



### 3. Nilai Indeks Persepsi Korupsi ( IPK )

- adalah indeks pengukuran tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.
- Dalam hal ini Dirjen Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e-survey sebagai tolak ukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e-Survey Badilum dengan alamat website.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

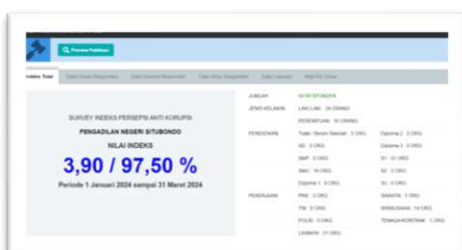
Ada 10 ( sepuluh ) Indikator untuk mengukur dimaksud :

1. Manipulasi peraturan.
2. Penyalahgunaan jabatan.
3. Menjual Pengaruh.
4. Transparansi biaya.
5. Transaksi rahasia.
6. Biaya Tambahan.
7. Hadiah.
8. Transparansi pembayaran.
9. Percaloan.
10. Perbuatan curang

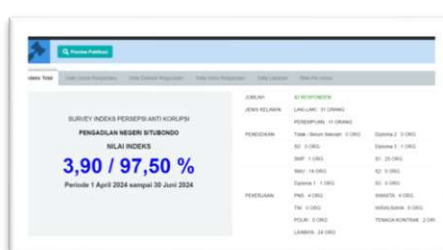
Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum (SI SUPER), Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jangka Waktu	Jumlah Responde	Indeks IPK
Triwulan I ( Januari – Maret)	50 Responden	3,90 / 97,50 %
Triwulan II( April – Juni)	42 Responden	3,90 / 97,50 %
Triwulan III( Juli – September)	152 Responden	3,94 / 98,60%
Triwulan IV ( Oktober– Desember)	110 Responden	3,99 / 99,86%
<b>Nilai Rata – rata</b>	<b>354 Responden</b>	<b>3,93 / 98,36 %</b>

Tabel 64 : Persentase capaian Nilai IPK



Gambar 15. Nilai IPK Terwulan I Si Super

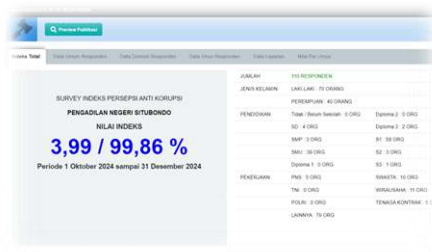


Gambar 16. Nilai IPK Terwulan II Si Super





Gambar 17 Nilai IPK Terwulan III Si Super



Gambar 18 Nilai IPK Terwulan IV Si Super

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2024, dengan demikian  $98,36 / 92 \times 100\% = 106,9\%$ . Dengan demikian capaian indikator ini sudah memenuhi target.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	92	98,36	106,9%

Tabel 65 : Persentase capaian Nilai IPK

Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IPK adalah 92 sedangkan realisasinya adalah 98,36 jadi persentase capaian kinerja untuk indikator nilai IPK telah melampau target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106,9%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini tiga tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

No	Tahun	Persentase Nilai IPK
1	2024	106,9%
2	2023	106%
3	2022	105%

Tabel 66 : Perbandingan Persentase capaian Nilai IPK

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Situbondo meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai Pengadilan Negeri Situbondo juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Situbondo masuk dalam Kategori Bersih dari korupsi.

#### 4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )



- adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sekarang menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yaitu:

1. Persyaratan.
2. Prosedur.
3. Waktu Pelayanan.
4. Biaya/Tarif.
5. Produk Spesifikasi Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Sarana dan Prasarana.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum (**SI SUPER**), Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jangka Waktu	Jumlah Responde	Indeks IPK
Triwulan I ( Januari – Maret)	50 Responden	3,83 / 95,83%
Triwulan II( April – Juni)	41 Responden	3,84 / 96,07%
Triwulan III( Juli – September)	154 Responden	3,88 / 96,97%
Triwulan IV ( Oktober–Desem)	109 Responden	3,95 / 98,75%
Nilai Rata – rata	304 Responden	3,87 / 96,90 %

Tabel 67: HASIL IKM e –Survey Badilum Tahun 2024



Gambar 19 Nilai SKM Terwulan I Si Super



Gambar 20. Nilai SKM Terwulan II Si Super



Gambar 21. Nilai SKM Terwulan III Si Super



Gambar 22. Nilai SKM Terwulan IV Si Super

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2024, dengan demikian  $96,90 / 92 \times 100\% = 106,9\%$ . Dengan demikian capaian indikator ini sudah memenuhi target.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	92	96,90	106,9%

Tabel 68 : Persentase capaian Nilai IKM

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2024 adalah 92, seangkan realisasinya adalah 96,90 sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,9%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Persentase Nilai IKM
2024	106,9 %
2023	104 %
2022	100,8%

Tabel 69: Perbandingan Persentase capaian Nilai IKM

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai indeks kepuasan msyarakat pada Pengadilan Negeri Situbondo semakin meningkat, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna peradilan serta berusaha melengkapi sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan masyarakat pengguna peradilan.



**5. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh )  
sebelumnya Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)**

- Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) merupakan program lanjutan dari Akreditasi penjaminan mutu Ditjen Badilum terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- Suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Ditjen Badilum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Pengadilan Negeri Situbondo pertama kali melaksanakan akreditasi penjaminan mutu pada tahun 2017 mendapatkan predikat A excellent

Capaian Kinerja Indikator Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	783,81 Utama	783,81 Utama	100%

**Tabel 70: Prosentase Capaian Kinerja Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh)**

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah Pengadilan Negeri Situbondo adalah mendapatkan predikat Utama untuk penilaian AMPUH.

- Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Situbondo meraih predikat A excellent dengan jumlah nilai 738 berdasarkan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022, tanggal 9 Desember 2022, sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.





Gambar 23 : Sertifikat Predikat APM tahun 2022

- Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Situbondo meraih Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) predikat Utama dengan namun sampai saat ini belum ada data informasi yang pasti maupun data dukung dimaksud, tetapi persentase capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Pada tanggal 20 Agustus 2024 TIM Surveilence dari Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan Evaluasi dan Monitoring AMPUH di Pengadilan Negeri Situbondo



Gambar 24 : Assesment Survelence Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Tahun 2024



Berdasarkan assessment tersebut Pengadilan Negeri Situbondo pada Tahun 2024 memperoleh nilai **783,81 dengan predikat “UTAMA”** sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024 berikut



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Keterangan	Tahun		
	2022	2023	2024
Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh)	-	-	Utama 783,81
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu APM	“A”	“A”	-
<b>Persentase</b>	100%	100%	100%

Tabel 71 : Persentase Perbandingan capaian Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) atau Predikat (APM)

#### 6. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP yang diterima dengan PNBP yang disetor ke kas Negara.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PNBP yang disetor ke kas negara}}{\text{Jumlah PNBP yang diterima}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
-------------------	--------	-----------	----------------------------



<b>Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</b>	100%	100%	100%
---	------	------	------

Tabel 72 : Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2024, jumlah PNBP yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo dari DIPA 01 adalah Rp. 8.150.783,- didapat dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131), sedangkan untuk DIPA 03 adalah Rp. 37.972.500,- didapat dari pendapatan Pengesahan dibawah tangan (425231) , Pendapatan uang meja atau leges dan upah pada Panitera Badan Peradilan (425232), Pendapatan Ongkos Perkara (425233) dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239).

Dari jumlah PNBP baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo, semua disetor ke kas Negara, jadi realisasi pada indikator ini adalah 100%.

Target yang telah ditetapkan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada untuk indikator ini adalah 100%.

Berikut adalah data penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022-2024

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

No.	Tahun	PNBP Yang Diterima (Rp.)	PNBP Yang Disetor (Rp.)	Realisasi
1	2024			
	01	8.150.783	8.150.783	100%
	03	37.972.500	37.972.500	100%
2	2023			
	01	3.464.783	3.464.783.	100%
	03	40.945.500	40.945.500	100%
3	2022			
	01	3.060.552.	3.060.552.	100%
	03	35.798.000	35.798.000	100%

Tabel 69 : Persentase Perbandingan Realisasi PNBP

### 7. Persentase Realisasi Anggaran Belanja

Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur perbandingan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.



Jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DIPA	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Penyerapan
01	Program Dukungan Manajemen	5.548.719.000	5.518.058.270	99,45 %
03	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.940.000	87.605.995	99,62%

Tabel 74. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Situbondo Th 2024

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase realisasi anggaran belanja			
	DIPA 01	98 %	99,45 %	100,1 %
	DIPA 03	98%	99,62%	100,6 %
	Rata – Rata	98%	99,53%	101,5 %

Tabel 75. Persentase Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Th. 2024

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 98%, untuk DIPA 01 realisasi anggaran mencapai 99,45 % dan untuk DIPA 03 realisasi anggarannya sebesar 99,62% penyerapan melampaui mencapai target yang ditetapkan

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan melakukan revisi anggaran dan berkoordinasi kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dan instansi terkait Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 – 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Penyerapan
1	2024			





	01	5.548.719.000	5.518.058.270	99,45 %
	03	87.940.000	87.605.995	99,62%
<b>2</b>	2023			
	01	5.531.349.000	5.131.140.771	92,84 %
	03	97.740.000	95.315.000	98,18%
<b>3</b>	2022			
	01	5.585.625.000	5.912.383.281	105,85,%
	03	97.815.000	96.714.400	98,86%

Tabel 76. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022-2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran belanja dari tahun 2022 – 2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo cenderung hampir sama dan cenderung naik setiap tahunnya, khususnya pada DIPA 01 dan untuk DIPA 03 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, capaian kinerja anggaran pada DIPA 01 penyerapan maximal dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 99,45 % ke 92,82 % yaitu sebesar 6,63 %. Hal ini perlu dipertahankan Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dapat terserap secara lebih optimal.

**8. Persentase Pelaporan LHKPN /LHK ASN Tepat Waktu**

Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu.

Batas waktu pelaporan LHKPN/LHK ASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang lapor tepat waktu}}{\text{Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN/LHKASN}} \times 100\%$$

Berikut data laporan LHKPN/ LHK pegawai Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 :

No	Jenis Laporan	Jumlah Pegawai Yang melapor	Jumlah Pegawai Yang melapor tepat waktu
1.	LHKPN	13 Orang	16 Orang
2.	LHK ASN	21 Orang	12 Orang

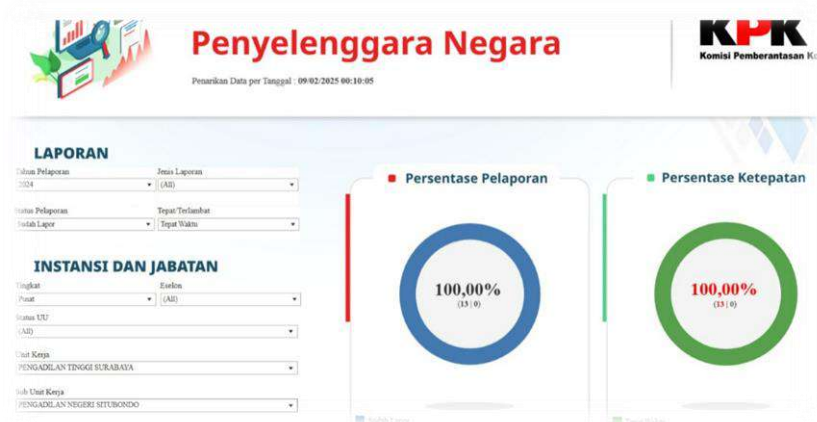


Jumlah	34 Orang	34 Orang
--------	----------	----------

Tabel 77. Jumlah ASN Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024  
Capaian Kinerja Indikator realisasi pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Tabel 78. Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2024



Gambar 25. Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2024

Tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator ini adalah sebesar 100%. Dari 34 Pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN, semuanya melaporkan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%, sesuai target yang ditetapkan. Jadi untuk capaian kinerja indikator persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu adalah sebesar 100%.

Perbandingan Jumlah Pegawai yang melaksanakan pelaporan LHKPN dan LHKASN tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Pelapor LHKPN/LHKASN	Jumlah Pelapor LHKPN/LHKASN Tepat Waktu	Realisasi
2024	34	34	100%
2023	28	28	100%
2022	31	31	100%

Tabel 79. Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2022-2024



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 100%, jadi tidak ada yang terlambat dalam pelaporan harta kekayaan pegawai kepada KPK, hal ini karena kesadaran pegawai akan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang harus dilakukan setiap tahun sangat tinggi.

**9. Persentase Nilai Kinerja Anggaran**

- Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja.

Capaian kinerja indikator kinerja anggara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase realisasi nilai kinerja anggaran			
	01	96	95,82 %	99,8 %
	03	96	70 %	72,9 %
	<b>Rata-Rata</b>		82,91 %	86, 35%

Tabel 80. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

Target untuk indikator ini adalah 95 % sedangkan realisinya adalah 82,91%, sehingga capaian kinerja indikator persentase realisasi kinerja anggaran tahun 2024 adalah 87%.

Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP dan ketepatan waktu antara Rencana Penarikan Dana dan kesesuaian dengan kegiatan yang terlaksana dengan singkonisasi deviasi halaman III Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian output.

Perbandingan nilai IKPA tahun 2022- 2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Tahun	Nilai Kinerja	
1	2024	DIPA 01	95,82 %
		DIPA 03	70 %
2	2023	DIPA 01	101 %
		DIPA 03	95,8 %
3	2022	DIPA 01	96%
		DIPA 03	88,14 %

Tabel 81. Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022 – 2024

NO	KODE RPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIPENCASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEViasi HALAMAN DI DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP					CAPAIAN OUTPUT
1	035	005	098221	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	Nilai	100,00	83,08	87,08	0,00	0,00	84,88	100,00	76,46	80%	0,00	95,82
					Beban	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	12,76	15,42	0,00	0,00	9,48	25,00				
					Nilai Aspek		82,54			95,84		100,00				

Gambar 24 IKPA DIPA 01

NO	KODE RPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIPENCASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEViasi HALAMAN DI DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP					CAPAIAN OUTPUT
1	035	005	099146	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	Nilai	100,00	38,45	82,41	0,00	0,00	96,11	46,67	56,53	80%	0,00	70,66
					Beban	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	8,77	16,48	0,00	0,00	-9,61	11,67				
					Nilai Aspek		79,23			89,26		46,87				

Gambar 24 IKPA DIPA 03

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai IKPA pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena:

1. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal pada akun tertentu.
2. Capaian output ditahun 2024 digunakan sebagai kontrol indikator IKPA 2024,
3. Terdapat pagu pada pemeliharaan gedung dan Rumah Dinas penyerapan yang tidak sesuai Jadwal dikarenakan adanya KPA yang menjalani Purna Tugas , sehingga penggantian Plt Sekretaris sekaligus KPA dalam melakukan penyerapan terkait akun – akun tertentu berkoordinasi dengan pimpinan selaku Pengawasan .



Untuk mengatasi hal- hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai IKPA satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran pada periode awal semester I agar meningkatkan nilai IKPA pada pertengahan tahun.
2. Laporan Capaian Output dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan.
3. Melakukan kontrol terhadap ketersediaan pagu khususnya pada belanja pegawai agar dapat diketahui sedini mungkin apabila terdapat pagu minus dan segera berkoordinasi dengan tingkat banding.

**10. Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja**

➤ Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan :

$$\frac{\text{Jumlah hari tidak hadir}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$$

Berikut rekapitulasi kehadiran pegawai Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan data pada Komdanas.

No.	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Jumlah Ketidakhadiran
1.	Januari	22	0
2.	Februari	19	0
3.	Maret	18	0
4.	April	16	0
5.	Mei	18	0
6.	Juni	18	0
7.	Juli	23	0
8.	Agustus	22	0
9.	September	20	0
10.	Oktober	23	0
11.	November	21	0
12.	Desember	20	0
	Total	240	0

Tabel 82. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Situbondo Tahun 2024

Capain kinerja Indikator Persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
----	-------------------	--------	-----------	----------------------------



1	Persentase kedisiplinan masuk kerja	100%	100%	100%
---	-------------------------------------	------	------	------

**Tabel 83. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2024**

Jumlah hari kerja selama tahun 2024 adalah 240 hari, sedangkan jumlah ketidakhadiran pegawai adalah 0 hari. Perhitungan pada indikator ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase kehadiran} &= (\text{Jumlah hari tidak hadir} : \text{Jumlah hari kerja}) \times 100. \\ &= (0 \text{ hari} : 240\text{hari}) \times 100. \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

$$\text{Persentase kehadiran} = 100 \% - 0 \% = 100\%.$$

Target dari indikator persentase kedisiplinan masuk kerja adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 100%

Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Situbondo di dukung dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.

### 11. Pelanggaran Disiplin

Indikator kinerja pelanggaran disiplin mengukur tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada Pengadilan Negeri Situbondo.

Berikut adalah rekapitulasi data hukuman disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pelanggar
1	Ringan	
	a. Teguran lisan	0
	b. Teguran tertulis	0
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	0
	Jumlah pelanggaran disiplin ringan	0
2	Sedang	
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0



c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	0
d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	0
Jumlah pelanggaran disiplin sedang	0
<b>3 Berat</b>	
a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	0
b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	0
c. Pembebasan dari Jabatan	0
e. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0
f. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0
Jumlah pelanggaran disiplin berat	0

Tabel 84. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024

Capaian Kinerja Indikator Pelanggaran Disiplin tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Pelanggaran disiplin	1%	0 %	0 %

Tabel 81. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2024

Tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran disiplin baik ringan, sedang ataupun berat yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Situbondo, jadi untuk capaian target pada indikator ini adalah sebesar 0 %.

## SASARAN STRATEGIS 7

### Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang baik dan Prima

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang Baik terdapat 15 ( lima belas ) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut adalah:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
1	Jumlah Aplikasi yang telah diselesaikan	1	1	100%
2	Jumlah kapasitas banwith yang memadai	100 Mpbs	100 Mpbs	100%
3	Persentase distribusi surat	100 %	100 %	100%
4	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	98%	100 %	102%
5.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	100 %	100 %	100%
6	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	5	8	160 %
7	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat dimedia	35	25	71 %
8	Jumlah layanan pengadilan	5	5	100%
9	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200 Org	279 Orang	135,9 %
10	Jumlah layanan bantuan hukum	126 org	145 org	115%
11	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah pemeliharaan gedung	1/1540 m2	1/1540 M2	100 %
13	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	7/884 m2	7 / 884 M2	100 %
14	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	638 Unit	638 Unit	100 %
15	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layan an	12 bulan layanan	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				105,53 %

Tabel 86. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

**1. Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan**

- Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Situbondo membuat beberapa inovasi-Inovasi ini dapat langsung oleh internal maupun Ekternal , masyarakat khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo
- Indikator ini mengukur berapa jumlah aplikasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama tahun 2024 dan manfaat yang didapatkan dari aplikasi tersebut.





Capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%

Tabel 87. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan Tahun 2024

Tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator jumlah aplikasi yang diselesaikan adalah 1 aplikasi, sedangkan realisasinya adalah 1 aplikasi, jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%.

Dalam kurun waktu tahun 2024, ada beberapa inovasi yang telah diciptakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo, baik berupa aplikasi maupun berupa Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. Aplikasi SIPKAN (*sistem informasi paraf elektronik persuratan*)

- **Aplikasi Ini adalah Aplikasi Lokal** yang hanya di pergunakan oleh Pegawai di Lingkungan Satuan Kerja PN Situbondo dan bukan untuk Umum;
- Aplikasi Sipkan ini sudah diberlakukan sejak bulan Januari 2024, telah berkembang menjadi sebuah *Bank Data Persuratan dan Kumpulan Surat Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan yang telah dilakukan tanda tangan elektronik setelah di paraf secara berjenjang serta dapat di akses secara internal* dan terbukti efektif juga efisien dalam proses pencarian data dan *paperless* pastinya,
- Cara kerja Sistem ini mencatat setiap jenjang proses paraf sebuah document elektronik (MS Word/Rtf) hingga menjadi sebuah dokumen elektronik PDF yang sah dan telah memiliki TTE, sebagai pengganti paraf manual pada document hardcopy,
- Pada sistem ini proses paraf tersebut tersimpan pada **Log History** atau jejak digital bahwa dokument tersebut telah *dibaca atau dikoreksi secara berjenjang dari level operator sampai level pimpinan.*



Gambar 26 Tampilan aplikasi SIPKAN

- Tujuan dibentuknya sistem ini adalah berdasarkan Pasal 88 Peraturan Arsip Nasional RI No. 5 TAHUN 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No :131/KMA/SK/ VII/2023 tentang pedoman pelaksanaan tata naskah dinas di Mahkamah Agung dan lingkungan dibawahnya bahwa penyelenggara naskah dinas harus dapat dipertanggung jawabkan dari segi format, isi, prosedur, kewenangan, keabsahan dan kearsipan.

**2. Jumlah Kapasitas Banwith Yang Memadai**

- Indikator ini mengukur ketersediaan banwith yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo
- Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/ SEK /OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court berupa peningkatan banwith yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps. Capaian kinerja indikator jumlah kapasita banwith yang memadai adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
	Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai	100 Mbps	100 Mbps	100%

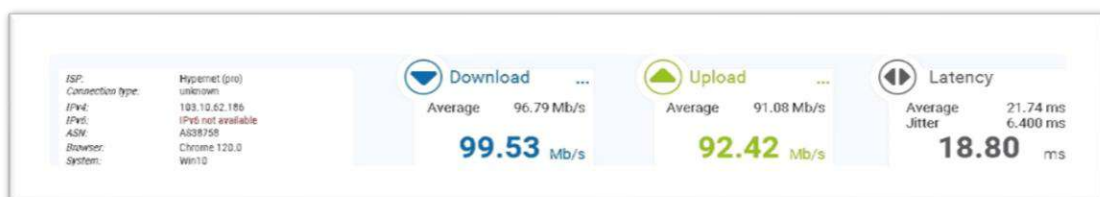
Tabel 88 Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2024

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator jumlah kapasitas banwith yang memadai adalah 100 Mbps,



sedangkan realisasinya adalah 100 Mbps , jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah Kapasitas Bandwith yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Sejak akhir tahun 2019, untuk belanja langganan internet pada Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran yang cukup untuk pemenuhan belanja langganan internet. Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan petunjuk Sekma untuk menggunakan internet dedicated 1:1 dengan banwith 100 Mbps



Gambar 29. Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2024

Gambar diatas merupakan grafik laporan pemakaian internet pada Pengadilan Negeri Situbondo serta ketersediaan banwith internet selama tahun 2024. Dalam grafik tersebut digambarkan rata-rata tingkat kebutuhan internet maksimal pada angka 100 Mbps, sedangkan ketersediaan banwith dari profider Hipernet adalah 100 Mbps, sehingga kapasitas banwith yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo sudah sangat memadai .

**3. Persentase Distribusi Surat.**

- Indikator kinerja persentase distribusi surat mengukur perbandingan antara surat masuk dengan surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian.

$$\frac{\text{Jumlah surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
1	Persentase distribusi surat masuk	100%	100%	100%

Tabel 89. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2024



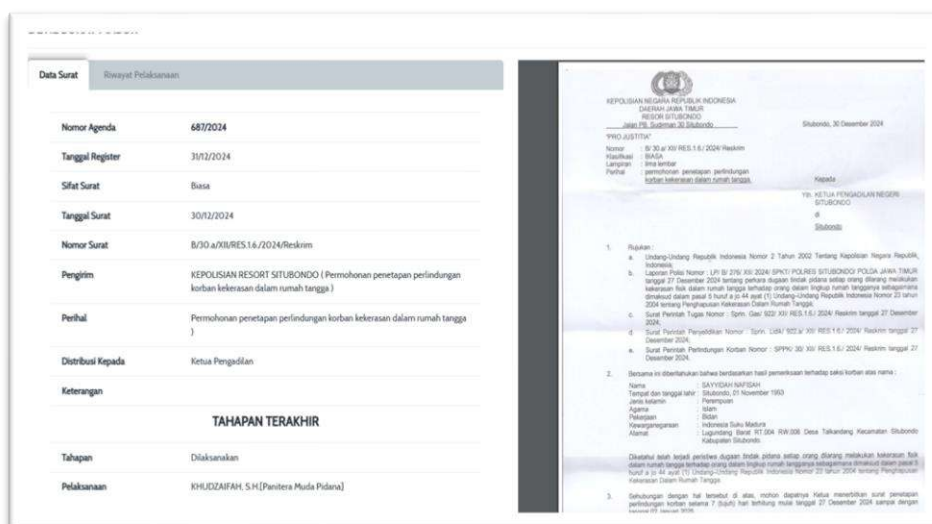
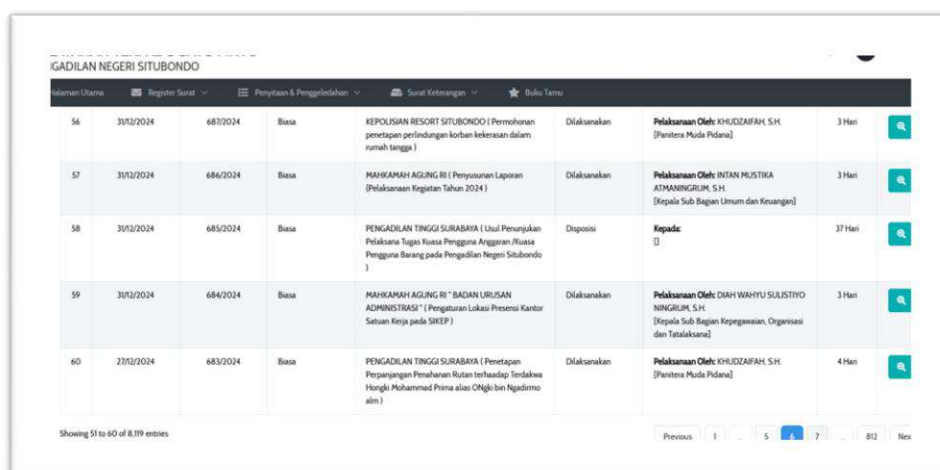
Dalam kurun waktu tahun 2024, terdapat 687 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian.

NO	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat Yang didistribusikan
1	2024	687 surat	687 surat
2	2023	692 surat	692 surat
3	2022	1385 surat	1385 surat

Tabel 90 Jumlah Pendistribusian Surat Masuk di Pengadilan Negeri Situbondo TH 2022- 2024

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator persentase distribusi surat adalah 100%, sedangkan realisasi adalah 100%, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Situbondo telah menggunakan aplikasi PTSP + dari Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan



Gambar 30. Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP +



**4. Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu.**

- Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti tepat waktu dengan surat masuk.
- Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

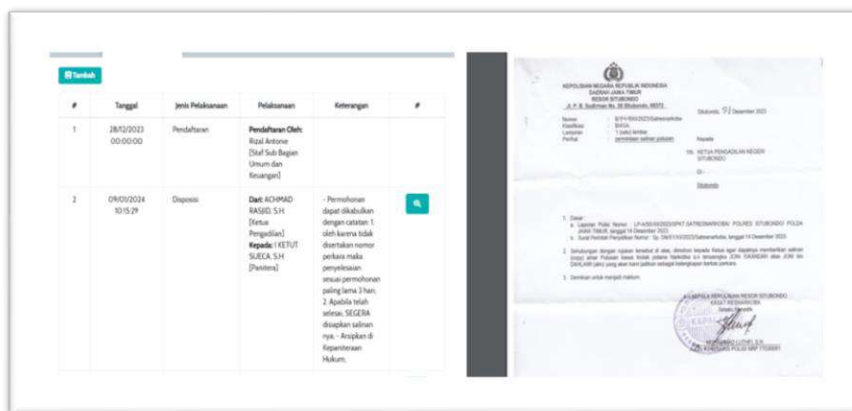
Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	98%	100 %	102 %

Tabel 91. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu TH. 2023

Dalam kurun waktu tahun 2024, terdapat 687 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah 98%, sedangkan realisasinya adalah 100%, melebihi target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebesar 102%.



Gambar 30 TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +



**5. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat.**

- Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan Negeri Situbondo. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu}}{\text{Jumlah surat}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

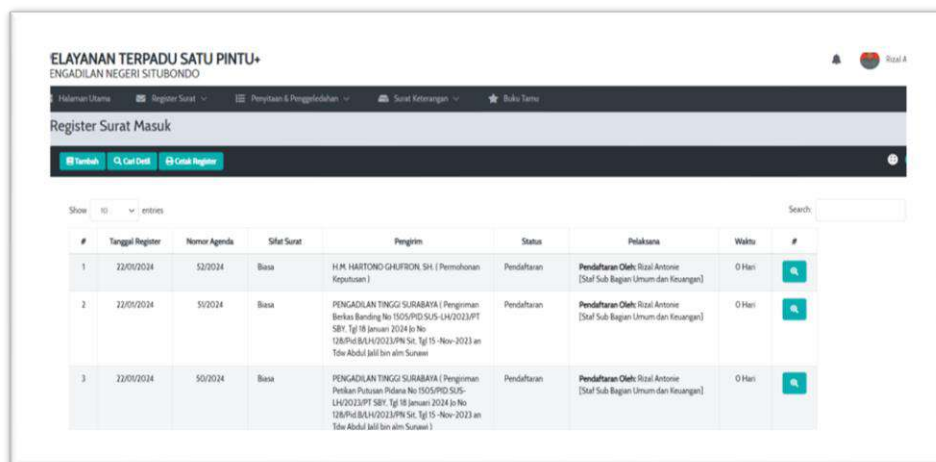
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat	100%	100%	100%

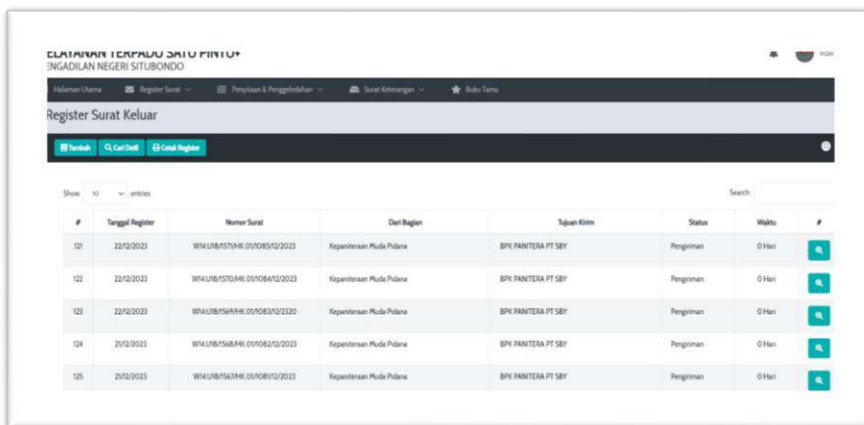
**Tabel 92. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2024**

Target untuk indikator ini adalah 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan tepat waktu adalah sebesar 100%.

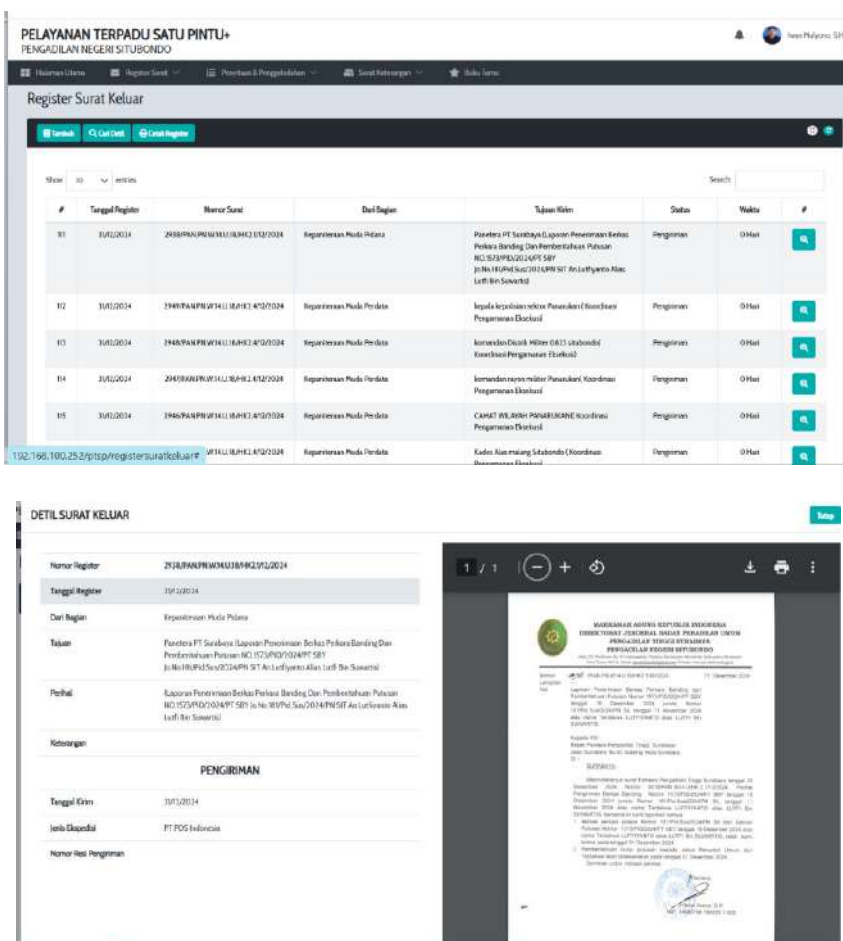
Tahun 2024, jumlah surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 687 surat dan surat keluar sebanyak 2938 surat. Semua surat teregristrasi dalam aplikasi PTSP +.

Selain itu, setiap bagian juga mempunyai buku register surat masuk dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang didisposisikan pada setiap bagian.





Gambar 32. Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +



Gambar 33 Register Surat Keluar Pada Aplikasi PTSP +



Gambar 34. Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Tiap Bagian



**6. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait.**

- Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Situbondo dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo khususnya.

Capaian kinerja indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah Kerjasama antar instansi terkait	5	8	160 %

**Tabel 93. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2024**

Target yang ingin dicapai pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah 5, sedangkan realisasinya sepanjang tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo menjalin kerjasama dengan 9 lembaga atau yayasan yaitu:

1. MOU dengan Posbakumadin Situbondo layanan Pos Bantuan Hukum.
2. MOU dengan Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo Penyediaan bagi Penyandang layanan Disabilitas
3. MOU dengan SMA Kendit tentang Penyuluhan, Pendidikan Hukum, dan penyelenggaraan program Peminatan
4. MOU dengan Fakultas syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Peningkatan dan pengembangan Mutu Instutusi
5. MOU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Quranain Jember tentang Praktek Pengalaman Lapangan
6. MOU dengan Universitas Muhammadiyah Jember tentang Praktek Pengalaman Lapangan
7. MOU dengan Universitas Islam Malang tentang Praktek Pengalaman Lapangan
8. MOU dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (KOMINFO) tentang Disementasi Informasi layanan Pengadilan Kabupaten Situbondo

Sehingga capain kinerja pada indikator ini adalah 180 %.





**7. Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media.**

- Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan Negeri Situbondo yang dimuat di media khususnya Website dan media sosial Pengadilan Negeri Situbondo.

Capaian kinerja indikator jumlah berita tentang satuan kerja di dimuat di media adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	35	25	71 %

**Tabel 94. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2024**

Target pada indikator ini adalah 35 berita, sedangkan realisasinya, sepanjang tahun 2024 berita yang dimuat di media khususnya website Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 129 berita, termuat diwebsite 25 selebihnya adalah sejumlah 4 Media social sehingga capaian target pada indikator jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media adalah 71 %. ( karena standarisasi yang dimuat Website Pengadilan Negeri Situbondo

Selain media sosail lainnya ( Facebook, X, Instagram ) Website Pengadilan Negeri Situbondo merupakan media paling efektif untuk mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo seperti layanan pubik, layanan hukum, serta profil pengadilan



Gambar 35. Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Situbondo

**8. Jumlah Layanan Pengadilan.**

- Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah Layanan Pengadilan	5	5	100 %

**Tabel 95. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2024**

Target untuk indikator jumlah layanan di Pengadilan adalah 5 Layanan, sedangkan realisasinya adalah 5 Layanan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100% Layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Layanan PTSP Pidana.
2. Layanan PTSP Perdata.



3. Layanan PTSP Hukum.
4. Layanan PTSP Umum
5. Layanan PTSP Prioritas

Semua layanan di Pengadilan Negeri Situbondo berada pada Ruang PTSP yang bertempat di loby depan kantor Pengadilan Negeri Situbondo yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas. Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya untuk dilayani serta memebrikan kemudahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna peradilan, sehingga tercapainya *service excellent*.



Gambar 36. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Situbondo

**9. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan.**

- Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan pada periode tahun 2024.

Capaian kinerja indikator jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
----	-------------------	--------	-----------	----------------------------



1	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	200 Orang	279 Orang	139,5 %
---	------------------------------------	-----------	-----------	---------

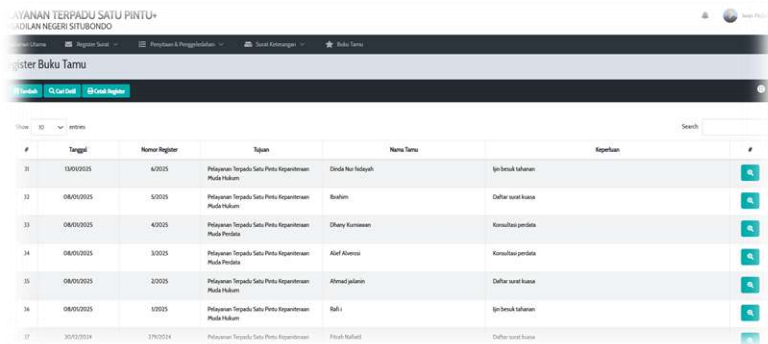
Tabel 92. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan 2024

Target untuk indikator jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah 200 orang, sedangkan realisasinya adalah 279 orang , melampaui target yang ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 139,5 %. Jumlah pengguna layanan di pengadilan dilihat dari jumlah masyarakat pengguna peradilan yang telah mengisi buku tamu dan dicatat dalam aplikasi PTSP + sepanjang tahun 2024. Perbandingan jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan
1.	2024	279 orang
2	2023	76 orang
3	2022	392 orang

Tabel 96. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan TH 2022 – 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pengguna layanan pengadilan menurun , namun menunjukkan angka yang sedikit. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.



Gambar 37. Register Tamu PTSP + Pengadilan Negeri Situbondo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pengguna layanan pengadilan fluktuatif, namun menunjukkan angka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Situbondo harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.



**10. Jumlah Layanan Bantuan Hukum.**

- Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumlah layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah layanan bantuan hukum	126 Orang	145 Orang	115 %

Tabel 97. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan HukumTH 2024

Target untuk indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah 126 orang, sedangkan realisasinya adalah 145 orang , melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 115 %.

Perbandingan jumlah layanan bantuan hukum dari tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Layanan Bantuann Hukum
1.	2024	145 orang
2	2023	96 orang
3	2022	29 orang

Tabel 98. Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 – 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kurang optimal karena perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Situbondo dibawah 500 perkara . Pengadilan Negeri Situbondo melaksanakan kerja sama dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN untuk layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan atau penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu.



**11. Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian.**

- Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan kepegawaian seperti usulan jabatan dan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian}}{\text{Jumlah Usulan Kepegawaian}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian kinerja
1	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100 %	100%	100%

Tabel 99. Persentase Capaian Kinerja Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2024

Target untuk indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 100 % orang, sedangkan realisasinya adalah 100% melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Tahun 2024 usulan jabatan pada Pengadilan Negeri Situbondo sejumlah 3 orang dan usulan KGB sejumlah 13 orang dan semua usulan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian (Usulan Jabatan dan KGB)	Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian	Realisasi
1	2024	16	16	100 %
2	2023	16	16	100 %
3	2022	27	27	100 %

Tabel 100. Persentase Realisasi Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2022 - 2024

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan



kepegawaian adalah 100%, artinya setiap usulan kepegawaian yang diajukan semua diselesaikan dengan baik. Pengusulan kepegawaian baik usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan jabatan ataupun kenaikan gaji berkala adalah hak setiap pegawai yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pengguna pengadilan

**12. Jumlah Pemeliharaan Gedung.**

- Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah pemeliharaan gedung	1/ 1540 m <sup>2</sup>	1/ 1540 m <sup>2</sup>	100%

Tabel 101. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung TH 2024

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 (satu) unit volume 1540 m<sup>2</sup>, dihitung dari luasan gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan sesuai dengan RKA-KL tahun 2024, sedangkan realisasinya adalah 1540 m<sup>2</sup> sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2024 adalah 1540 m<sup>2</sup> terdiri dari :

1. Gedung kantor 1540 m<sup>2</sup>
2. Halaman gedung 514 m<sup>2</sup>

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu awal sebesar Rp. 216.428.000,00 oleh karena terdapat perubahan kebutuhan satuan kerja, maka diadakan revisi anggaran sehingga anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Rp. 301.799.000,00

Dan mendapat Anggaran Belanja Tambahan sejumlah Rp. 40.000.000 Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan selama tahun 2024 adalah :

1. Perbaikan dan Pemeliharaan Ruang Tahanan Anak
2. Pemeliharaan Ruang Sidang Anak
3. Pengecatan Gedung dan Plafon di dalam dan R Ruang Sidang Utama



4. Penggantian Lantai Teras Lantai 2 dan Lantai R Wakil Ketua
5. Pengecatan di Ruangan Arsip bagian luar serta perbaikan sirkulasi Udara
6. Pengecatan gedung dan Plafon, kusen yang disesuaikan dengan dengan keadaan agar tetap terjaga keindahan dan kebersihan
7. Serta perbaikan lain – lain yang sesuai yang kondisional atap dan genteng bocor
8. ABT untuk Ruangan Ketua sebagian dinding di ganti dengan HPL
9. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor dan Pembelian BBM alat pemotong rumput

Kantor Pengadilan Negeri Situbondo merupakan bangunan yang lama dan belum sesuai dengan prototype. Pengajuan usulan pembangunan gedung kantor sesuai prototype sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo namun belum mendapat realisasi dari pusat dikarenakan ada target prioritas Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung pengadilan - pengadilan terdampak bencana alam dan yang baru di bentuk ( Pemekaran Kabupaten Dan Kota )

**13. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.**

- Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang didapatkan satuan kerja. Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah pemeliharaan gedung	7 Unit	7 Unit	100%

**Tabel 102. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas TH 2024**

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 7 unit sesuai dengan volume yang ada di RKA-KL tahun 2024, sedangkan realisasinya adalah 7 unit , sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Pengadilan Negeri Situbondo memiliki rumah dinas sebanyak 7 rumah dinas terdiri dari

- 1 (satu) Unit rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
- 1 (satu) Unit rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo





- 3 (tiga) unit rumah dinas Hakim,
- 1 (satu) unit rumah dinas Panitera,
- 1 (satu) unit rumah dinas hakim tidak ditempati dalam keadaan rusak sedang dan terlalu luas ( bekas kantor lama PA ) Untuk pemeliharaan rumah dinas pada anggaran Rkaki 2024 sebesar Rp 88.400.000.

**14. Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor.**

- Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja. Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	638 unit	638 unit	100%

Tabel 103. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor Tahun 2024

Indikator Kinerja	Unit	Anggaran (Rp)	Realisasi (Unit)	Realisasi (Rp)
<b>14.1 Pemeliharaan Mesin</b>	<b>632</b>	<b>2.081.816.304</b>	<b>632</b>	<b>190.487.000</b>
30.90.010109 Urug Komputer	Buah	2	2	1.920.000
30.90.090307 Luchtzuiveraar	Buah	4	4	41.736.000
30.90.090307 Generator Peralatan/Wakil Peralatan	Buah	2	2	400.000
30.90.020309 Perawatan Komputer Ekstern	dummy	10	10	124.700.000
30.90.090300 Back-up Standby Peralatan	Buah	1	1	2.155.000
30.90.090301 Servis	Buah	3	3	108.450.000
30.90.100307 CCTV - Camera Control Television System	Buah	4	4	57.726.000
30.90.100308 Papan Hias/Papan Nama	Buah	21	21	6.070.000
30.90.100317 Main/Abonai	Buah	1	1	4.575.000
30.90.101048 Uninteruptible Power Supply (UPS)	Buah	10	10	24.625.620
30.90.199909 Alat Kantor Lainnya	dummy	1	1	4.390.000
30.90.200203 Jam Elektronik	Buah	8	8	610.000
30.90.101004 Internet	Buah	5	5	925.000
30.90.200114 Membrane	Buah	7	7	3.846.150
30.90.201026 Finger Print Time and Attendance Access Control System	Buah	1	1	6.244.000
30.90.030303 Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	16	28.964.000
30.90.203004 Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	4	21.880.000
30.90.100314 Peta	Buah	1	1	75.000
30.90.120314 Papan Papan	Buah	1	1	4.380.000
30.90.204009 Peralatan Jahitan Lainnya	dummy	2	2	51.230.000
30.90.200909 Peralatan Komputer Lainnya	dummy	2	2	19.962.000
30.90.011006 Sisa	Buah	6	6	18.037.000
30.90.090302 Televisi	Buah	3	3	11.205.000
30.90.160201 P.C Unit	Buah	29	29	361.737.810
30.90.160202 LCD Top	Buah	21	21	284.700.000
30.90.161001 Audio Mixing Console	Buah	1	1	16.485.000
30.90.101003 Station Wagon	Unit	3	3	630.415.734
30.90.104001 Lemari Besi/Kayu	Buah	17	17	37.301.000
30.90.101001 Main/Back Manual Portable (11-13 liter)	Buah	2	2	1.586.000
30.90.201008 Urug Ropet	Buah	3	3	4.604.000
30.90.240302 Peralatan Antena Transmisi LF	Buah	2	2	3.470.000
30.90.104001 Bencina Motor	Unit	0	5	68.667.000

Gambar 38. Data Sakti BMN Jumlah Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2024

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 638 unit, sedangkan realisasinya adalah 638 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Dalam RKA-KL tahun 2024, peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan anggaran pemeliharaan adalah AC Split, komputer, printer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan, bahan bakar genset dengan jumlah anggaran Rp.185.987.000.



Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo tidak ada pengadaan belanja modal

**15. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.**

- Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretaraiatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo. Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layanan	12 Layanan	100%

**Tabel 104. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2024**

Target untuk indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah 12 layanan , sedangkan realisasinya adalah 12 layanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Jenis layanan internal yang terdapat pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah :

1. Layanan keamanan kantor.  
Layanan ini meliputi keamanan dalam kantor maupun keamanan luar kantor. Sarana layanan keamanan dilengkapi dengan terdapatnya pos jaga, metal detector, dan 3 (tiga) orang petugas keamanan yang berjaga dengan shif.
2. Layanan tata usaha dan rumah tangga  
Layanan ini merupakan pendukung utama kantor dalam hal pemenuhan kebutuhan pesonil pengadilan (Pramubakti dan Sopir) Layanan ini meliputi kebutuhan ATK kantor serta kebutuhan sarana dan prasarana kantor.



## SASARAN STRATEGIS 8

### Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang Baik terdapat 1 (satu) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	80%	70%	87,5 %
NILAI CAPAIAN KINERJA				87,5 %

Tabel 105. Ralisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

#### 1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

- Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Situbondo guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.

Capaian kinerja indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	80%	70%	87,5 %

Tabel 106. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2024

Target untuk indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan 80% , sedangkan realisasinya adalah 70%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 87,5 %.

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



2. Tersedianya prasarana ruang tamu terbuka.
3. Tersedianya ruang kesehatan dan laktasi.
4. Tersedianya Ruangan Sidang Anak
5. Tersedianya Ruangan Tahanan Anak
6. Tersedianya ruang tunggu sidang.
7. Tersedianya ruang mediasi.
8. Tersedianya fasilitas untuk Difabel.
9. Tersedianya genset untuk kegiatan operasional kantor.
10. Tersedianya ruang Media center

Pengadilan Negeri Situbondo selalu berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan peradilan. Anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan peradilan tersebut didapat dari Mahkamah Agung maupun hibah.



Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA																		Capaian Per Sasaran
	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	95%	97,50%	102,50%	50%	50%	100%	85%	88%	103%	95%	100,00%	105%	10%		130%	95%	99%	104%	106,71%
Pengadilan Negeri Bangkalan	95,50%	88,39%	92,55%	2%	0%	0%	84%	68,08%	81,04%	90,50%	84,62%	93,50%	10%	11,11%	111,1%	96%	97,73%	101,80%	82,89%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	89,23%	115,23%	1%	0%	0%	70%	90,12%	128,74%	70%	91,96%	131,40%	1%		0%	90%	98,28%	109,20%	120,22%
Pengadilan Negeri Blitar	95%	95,72%	100,73%	3%	N/A	N/A	98%	97,40%	99,38%	98%	98,04%	100,04%	3%	N/A	N/A	93%	98,82%	106,26%	101,43%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	99%	99%	2%	0%	0%	90%	95%	105%	90%	97%	107%	50%		140%	96,40%	99,67%	103%	92,33%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	94%	94%	80%	80%	100%	95%	95%	100%	97%	97%	100%	50%	0%	0%	100%	98,72%	98,72%	82,12%
Pengadilan Negeri Gresik	100%	84,18%	84,18%	96,67%	N/A	N/A	5%	21,34%	426,78%	5%	6,56%	131,10%	5%		N/A	80%	98,64%	123,30%	127,56%
Pengadilan Negeri Jember	95%	100,00%	105,26%	80%	81,82%	102,28%	92%	92,71%	100,77%	93%	97,24%	104,56%	5%	18,18%	363,6	93%	96,7%	103,97%	146,74%
Pengadilan Negeri Jombang	94%	92%	98,92%	5%	0%	0%	93%	90,34%	97,15%	95%	91,46%	96,28%	7%		300,75%	83%	96,89%	116,73%	115,21%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	95%	99,59%	104,79%	1%	0%	N/A	40%	98,05%	245,13%	40%	98,74%	246,84%	20%	20%	100%	90%	96,08%	106,75%	183,59%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	90%	93,72%	104,13%	1%	100%	100%	90%	95,26%	105,85%	90%	95,26%	105,85%	5%		154%	85%	91,01%	107,07%	129,68%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	95,09%	95,09%	NA	0%	100%	80%	81,10%	101,38%	80%	83,90%	104,88%	NA	0%	100%	90%	92,15%	102,39%	100,62%

### III - Akuntabilitas Kinerja



Pengadilan Negeri Kapanjen	82%	82%	100%	1%	N/A	N/A	94%	95%	101%	98%	98%	100%	20%		100%	92%	93%	101%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	100%	75,74%	75,74%	-	-	-	70%	92,05%	131,49%	70%	100%	111%	90%	0%	0%	80%	98%	122,34%	94,27%

**SATUAN KERJA**

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

**INDIKATOR KINERJA**

	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	0%	0%	80%	111%	138,75%	90%	95,80%	106,40%	3%		300%	80%	95,06%	118,80%	127,30%
Pengadilan Negeri Lumajang	95%	97,30%	102,42%	20%	33,33%	166,67%	87,50%	93,07%	106,37%	90%	96,06%	106,73%	35%	40%	114,29%	95%	94%	99,29%	115,96%
Pengadilan Negeri Madiun	100%	100%	100%	2%	0%	0%	75%	94,80%	126,40%	75%	98,90%	131,80%	10%		571,40%	90%	98,25%	108%	206,31%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,23%	96,23%	100%	97,60%	97,60%	100%	100%	100%	100%	96,91%	96,91%	96,96%
Pengadilan Negeri Malang	94,34%	95,11%	100,86%	1,00%	N/A	N/A	95,60%	94,40%	98,74%	97,49%	97,41%	99,92%	6,67%		499,75%	97,82%	99,70%	101,92%	167,01%
Pengadilan Negeri Mojokerto	91%	98%	101,50%	0	N/A	N/A	67%	80,60%	119%	45%	84,30%	110,50%	0%	N/A	N/A	94%	98,66%	105%	133%
Pengadilan Negeri Nganjuk	85%	99,77%	117,38%	1%	N/A	N/A	80%	92,96%	116,12%	90%	95,52%	106,13%	70%		142,86%	90%	95,76%	106,40%	118,95%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	94,55%	94,55%	-	-	N/A	80%	97,76%	122,20%	90%	98,40%	109,33%	85%	100%	117,65%	90%	94,12%	104,58%	109,66%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	87,05%	87,05%	0%	0%	0%	85%	98,08%	115%	85%	98,08%	115%	50%		0%	80%	98,58%	123%	130,58%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	90%	0%	0%	85%	87,83%	103,33%	90%	95,77%	106,41%	15%	0%	0%	96%	97%	101,2%	68%
Pengadilan Negeri Pasuruan	98%	98,70%	100,39%	85	0	0	90,00%	88,89%	98,77%	95%	92,81%	97,70%	20%		125%	88%	99,91%	125%	93,33%

### III - Akuntabilitas Kinerja



<b>Pengadilan Negeri Ponorogo</b>	100%	93,10%	93,10%	90%	0%	0%	90%	97,21%	108,01%	90%	98,98%	109,97%	10%	0%	0%	80%	88,33%	110,41%	%	105,37%
<b>Pengadilan Negeri Probolinggo</b>	100%	100%	100%	75%	0%	0%	95%	94%	98%	95%	95%	100%	10%		0%	80%	98%	122%		66,50%
<b>Pengadilan Negeri Sampang</b>	100%	100%	100%	100%	0%	0%	80%	83%	104%	80%	81,90%	102,40%	10%	0%	0%	95%	92,81%	97,69%		67,34%
<b>Pengadilan Negeri Sidoarjo</b>	95%	74%	77%	1%	0	0	75%	50%	65%	80%	85.5%	106.5%	7%		19%	90%	92,20%	102%		73.9%
<b>Pengadilan Negeri Situbondo</b>	100 %	100 %	100 %	20 %	0 %	0 %	85 %	97 %	114 %	90 %	99 %	101 %	10 %	0 %	0 %	90 %	98,30 %	109,2		70,7 %
<b>Pengadilan Negeri Sumenep</b>	93%	92%	98%	5%	0	0	85%	75%	78,50%	85%	75%	78,50%	2%		0	95%	95%	100%		153,17%
<b>Pengadilan Negeri Surabaya</b>	88%	92,37%	105,42 %	1%	0%	0%	77%	76,01%	101.93%	80%	82,39%	102,77%	1%	0%	0%	95%	92,12%	96,97%		67,84%
<b>Pengadilan Negeri Trenggalek</b>	100%	100%	100%	90%	0%	0%	90%	96,21%	106,90%	90%	96,89%	107,65%	90%		27,77%	90%	98%	109,43 %		80,41%
<b>Pengadilan Negeri Tuban</b>	95%	98,18%	103.54 %	0%	0%	0%	95%	98,80%	104,09%	94%	99,18%	105,51%	5%	57,14%	1142%	85%	86,19%	101,4%		259%
<b>Pengadilan Negeri Tulungagung</b>	90%	99,33%	110,36 %	5%	0%	0%	80%	98,36%	122,95%	80%	98,70%	123,37%	5%		2000%	85%	89,60%	105,41 %		367,49%



**BENCHMARK KINERJA**  
**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE- WILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**TAHUN 2023**

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	100%	100%	100%	6%	6,80%	113%	<b>106,50%</b>
Pengadilan Negeri Bangkalan	100%	100%	100%	10%	0%	0%	<b>50%</b>
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	100%	125%	1%	3,43%	343%	<b>234%</b>
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	9%	12,16%	135,14%	<b>111,71%</b>
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	10%	8%	80%	<b>90%</b>
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	100%	100%	50%	35%	70%	<b>85%</b>
Pengadilan Negeri Gresik	95%	100%	105%	10%	12,64%	126,44%	<b>55,77%</b>
Pengadilan Negeri Jember	95%	100%	100,00	1%	2,01%	201	<b>150,50</b>
Pengadilan Negeri Jombang	100%	100%	100%	10%	19,69%	196,96	<b>148,48%</b>
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	95%	94,97%	99,97%	20%	22,58%	112,90%	<b>104,28%</b>
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	5%	14,29%	285,71%	<b>192,86%</b>
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	5%	5,81%	116%	<b>108%</b>
Pengadilan Negeri Kepanjen	100%	97,50%	97,50%	8%	10%	120%	<b>105%</b>
Pengadilan Negeri Kraksaan	100%	100%	100%	100%	12,50%	12,50%	<b>56,25%</b>





SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	10,30%	343%	221,50%
Pengadilan Negeri Lumajang	100%	100%	100%	10%	17,14%	171,43%	123,81%
Pengadilan Negeri Madiun	100%	100%	100%	10%	56,97%	569,70%	334,85%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	100%	5%	5%	52,50%
Pengadilan Negeri Malang	99,28%	99,85%	100,58%	5,23%	11,96%	228,61%	164,60%
Pengadilan Negeri Mojokerto	100%	100%	100%	10%	26%	260%	153%
Pengadilan Negeri Nganjuk	90%	100%	111,11%	7%	9%	128,57%	119,84%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	100%	100%	5%	0%	0%	50%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	50%	10%	2%	90%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	15%	11%	73,33%	87%
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	100%	100%	10%	13,16%	131,58%	107,89%
Pengadilan Negeri Ponorogo	100%	100%	100%	5%	9,52%	11,90%	111,90%
Pengadilan Negeri Probolinggo	100%	100%	100%	10%	15,70%	157%	128,50%
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	100%	100%	100%	10%	6,70%	67%	83,5%
<b>Pengadilan Negeri Situbondo</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>10 %</b>	<b>106,00%</b>	<b>1060,00 %</b>	<b>580%</b>



SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA						
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	10%	10%	115%	153,13%
Pengadilan Negeri Surabaya	95%	98,90%	104,10%	3%	4,45%	148,32%	126,21%
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	100%	100%	10%	19,04%	190,40%	145,20%
Pengadilan Negeri Tuban	100%	100%	100%	2%	8%	400%	250%
Pengadilan Negeri Tulungagung	90%	100%	111,11%	5%	52,81%	1056,18 %	426,13%



**BENCHMARK KINERJA**  
**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE- WILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**TAHUN 2023**

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA									Capaian Per Sasaran
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	105%	95%	100%	130%	25%	100%	105%	95%	100%	113,33 %
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	1%	0%	0%	1%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	66,66%
Pengadilan Negeri Bondowoso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Gresik	25%	100	400	5%	0%	N/A	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Jember	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105,26	35,09
Pengadilan Negeri Jombang	0%	0%	0%	0%	0	0	100%	100	100	33,33%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1%	0%	N/A	1%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kepanjen	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	50%	0%	0%	100%	0%	0%	90%	100%	111%	111,11 %
Pengadilan Negeri Lamongan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Lumajang	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Madiun	2%	0%	0%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Malang	66,67 %	100,00%	149,99 %	N/A	N/A	N/A	90,00%	99,85%	110,94%	130,47 %
Pengadilan Negeri Mojokerto	0%	0%	N/A	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Nganjuk	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Ngawi	-	-	N/A	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pacitan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	33%
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	50%



Pengadilan Negeri Ponorogo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Probolinggo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%
Pengadilan Negeri Sampang	0%	-	-	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Situbondo	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %
Pengadilan Negeri Sumenep	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100%
Pengadilan Negeri Surabaya	70%	96,88%	138,39 %	100%	100%	100%	100%	0,23%	0,23%	79,54%
Pengadilan Negeri Trenggalek	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Tuban	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	100%	102,04%	102,04 %
Pengadilan Negeri Tulungagung	90%	100%	111,11 %	0%	100%	N/A	90%	100%	111,11%	107,41 %



**BENCHMARK KINERJA**  
**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE- WILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**TAHUN 2023**

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA			Capaian Per Sasaran
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			
	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	107%	90%	96%	<b>107%</b>
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	20%	0%	<b>0%</b>
Pengadilan Negeri Banyuwangi	25%	58,46%	233,84%	<b>233,84%</b>
Pengadilan Negeri Blitar	93%	100%	107,53%	<b>107,53%</b>
Pengadilan Negeri Bojonegoro	50%	75%	150%	<b>154%</b>
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	100%	100%	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Gresik	20%	73,33%	366,67%	<b>46,67%</b>
Pengadilan Negeri Jember	28%	31,58%	113%	<b>113%</b>
Pengadilan Negeri Jombang	29,41%	85%	25%	<b>29,41%</b>
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	40%	43,48%	108,70%	<b>108,70%</b>
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	20%	33%	167%	<b>167%</b>
Pengadilan Negeri Kediri	25%	26,70%	106,80%	<b>106,80%</b>
Pengadilan Negeri Kepanjen	65%	67%	103%	<b>103%</b>
Pengadilan Negeri Kraksaan	90%	100%	111%	<b>158,73%</b>
Pengadilan Negeri Lamongan	5%	13,79%	275,80%	<b>275,80%</b>
Pengadilan Negeri Lumajang	40%	52,94%	132,35%	<b>132,35%</b>
Pengadilan Negeri Madiun	50%	149,80%	299,60%	<b>299,60%</b>
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	<b>0%</b>
Pengadilan Negeri Malang	60,00%	114,29%	190,48%	<b>190,48%</b>
Pengadilan Negeri Mojokerto	40%	73,90%	185%	<b>185%</b>
Pengadilan Negeri Nganjuk	50%	40%	80%	<b>80%</b>
Pengadilan Negeri Ngawi	80%	0%	0%	<b>0%</b>
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	0%	0%	<b>0%</b>
Pengadilan Negeri Pamekasan	95%	100%	105%	<b>105%</b>
Pengadilan Negeri Pasuruan	80%	100%	125%	<b>125%</b>
Pengadilan Negeri Ponorogo	80%	50%	50%	<b>50%</b>
Pengadilan Negeri Probolinggo	<b>80%</b>	<b>81%</b>	<b>101%</b>	<b>101%</b>



SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA			Capaian Per Sasaran
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			
Pengadilan Negeri Sampang	10%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Sidoarjo	50%	4,70%	9,40%	9,40%
Pengadilan Negeri Situbondo	50 %	25 %	50 %	50 %
Pengadilan Negeri Sumenep	10%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Surabaya	3%	14,89%	33,10%	33,10%
Pengadilan Negeri Trenggalek	30%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Tuban	30%	66,67%	222,23%	222,23%
Pengadilan Negeri Tulungagung	75%	72,73%	96,97%	96,97%



BENCHMARK KINERJA

REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA TAHUN 2024

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

SATUAN KERJA	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase Putusan Yang Menggunakan Keadilan Restoratif			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi			Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			Capaian Per Sasaran
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	95%	97,50%	102,50%	50%	50%	100%	85%	88%	103%	95%	100,00%	105%	10%	33%	130%	95%	99%	104%	106,71%
Pengadilan Negeri Bangkalan	95,50%	88,39%	92,55%	2%	0%	0%	84%	68,08%	81,04%	90,50%	84,62%	93,50%	10%	11,11%	111,1%	96%	97,73%	101,80%	82,89%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	83,50%	106,60%	1%	100%	10000%	70%	88,20%	126,00%	70%	91,50%	130,70%	1%	100%	10000%	90%	99,74%	110,80%	2314,00%
Pengadilan Negeri Blitar	95%	95,72%	100,73%	3%	N/A	N/A	98%	97,40%	99,38%	98%	98,04%	100,04%	3%	N/A	N/A	93%	98,82%	106,26%	101,43%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	99%	99%	2%	0%	0%	90%	95%	105%	90%	97%	107%	50%	70%	140%	96,40%	99,67%	103%	92,33%
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	93%	93%	80%	N/A	N/A	95%	152%	160%	97%	79%	81%	50%	N/A	N/A	100%	97,75%	97,75%	107,88%
Pengadilan Negeri Gresik	80%	84,18%	84,18%	96,67%	N/A	N/A	5%	21,34%	426,78%	5%	6,56%	131,10%	5%	N/A	N/A	80%	98,64%	123,30%	127,56%
Pengadilan Negeri Jember	95%	99,83%	105,08	80%	100,00%	125,00	92%	99,60%	108,26	93%	99,79%	107,30	10%	42,85%	428,5	93%	94,3%	101,34	162,58
Pengadilan Negeri Jombang	94%	92%	98,92%	5%	0%	0%	93%	90,34	97,15	95%	91,46	96,28%	7%	21,05%	300,75%	83%	96,89%	116,73	115,21%



Pengadilan Negeri Kab. Kediri	90%	100%	111,11%	1%	N/A	N/A	80%	97,07%	121,34%	80%	98,71%	123,39%	1%	N/A	N/A	90%	96,46%	107,18 %	1845,71 %
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	90%	94,11%	104,57%	1 %	60%	6000%	90%	92,46%	102,74%	90%	94,97%	105,53%	5%	23%	462%	85%	94,85%	111,59 %	1147,74 %
Pengadilan Negeri Kediri	95%	97,08%	102,19%	100%	100%	80%	50%	81,47%	162,94%	90%	100,00%	111,11%	90%	100%	100%	90%	99,25%	109,08 %	116,07%
Pengadilan Negeri Kepanjen	82%	82%	100%	1%	80%	N/A	94%	95%	101%	98%	98%	100%	20%	20%	100%	92%	93%	101%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	90%	100,00%	111,11%	N/A	N/A	N/A	50%	89,67%	179,34%	50%	100%	200%	N/A	N/A	N/A	80%	96%	119,83 %	152,96%
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	0%	0%	80%	111%	138,75%	90%	95,80%	106,40%	3%	9%	300%	80%	95,06%	118,80 %	127,30%
Pengadilan Negeri Lumajang	95%	99,40%	104,64%	20%	33,33%	166,67 %	87,50 %	93,07%	106,37%	90%	96,06%	106,73%	35%	40%	114,29 %	95%	94%	99,29%	115,96%
Pengadilan Negeri Madiun	100 %	100%	100%	2%	0%	0%	75%	98,50%	131,33%	75%	99,96%	133,28%	10%	80%	800,00 %	90%	97,90%	109%	212,23%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	,	100%	100%	100%	96,23%	96,23%	100%	97,60%	97,60%	100%	100%	100%	100%	96,91%	96,91%	96,96%
Pengadilan Negeri Malang	94,34 %	95,11%	100,86%	1,00 %	N/A	N/A	95,60 %	81,80%	98,74%	97,49 %	97,41%	99,92%	6,67%	33,33%	499,75 %	97,82 %	99,70%	101,92 %	167,01%
Pengadilan Negeri Mojokerto	91,5%	94,3%	103%	1%	0	N/A	82,5%	99%	111%	80%	81,50%	111%	65%	67%	103%	94%	95,63%	102%	101%
Pengadilan Negeri Nganjuk	85%	98,59%	117,43%	100%	100%	100%	80%	93,67%	117,09%	90%	95,61%	106,23%	10%	N/A	N/A	90%	95,28%	105,87 %	110,68%
Pengadilan Negeri Ngawi	100%	94,55%	94,55%	-	-	N/A	80%	97,76%	122,20%	90%	98,40%	109,33%	85%	100%	117,65 %	90%	94,12%	104,58 %	109,66%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100,00%	100,00%	1%	0%	0%	85%	96,00%	118%	85%	96,06%	107%	25%	0%	0%	85%	96,89%	117%	100,00%
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100,00%	100,00%	85%	0%	0%	85%	90,47%	106,40%	90%	97,62%	108,40%	15%	50%	333%	99%	99%	100,0%	124,63%
Pengadilan Negeri Pasuruan	95%	95,42	100,44%	85	100	117,65	90,00 %	89,92%	99,91%	95%	92,74%	99,91%	20%	1%	1%	88	99,9	112,5	90,48





Pengadilan Negeri Ponorogo	90%	95,12%	105,68%	1%	0%	0%	90%	98,73%	109,70%	90%	98,75%	109,72%	5%	0%	0%	90%	92,20%	102,44%	%	<b>71,26%</b>
Pengadilan Negeri Probolinggo	95%	95%	100,42%	75%	0%	0%	90%	94%	104,44%	95%	95%	100%	10%	33%	333%	80%	97%	121,25%	%	<b>126,57%</b>
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	0%	0%	N/A	80%	74%	93%	80%	75,12%	93,91%	0%	0%	N/A	95%	93,87%	93,80%	%	<b>74,07%</b>
Pengadilan Negeri Sidoarjo	95%	99%	104%	N/A	N/A	N/A	78%	85%	109%	75%	76,95%	101,50%	7%	20,00%	200%	90%	93,18%	104%	%	<b>150%</b>
Pengadilan Negeri Situbondo	85%	70,50%	83%	1%	0	0	86%	83%	96,80%	91%	99,10%	108,90%	10%	33.3%	333%	91%	97%	106%	%	<b>121,20%</b>
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	15%	0	0	85%	83%	95,00%	85%	80%	85,00%	2%	0	0	95%	100%	100%	%	<b>102,00%</b>
Pengadilan Negeri Surabaya	85%	89,02%	105%	0%	0%	N/A	76%	76,13%	100%	79%	81,43%	103%	0%	0%	N/A	94%	98,06%	104,32%	%	<b>103,57%</b>
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	98,04%	98,04%	2%	0%	0%	90%	83,57%	92,85%	90%	85,00%	94,44%	1%	40%	400,00%	90%	99,94%	111,04%	%	<b>132,73%</b>
Pengadilan Negeri Tuban	95%	98,26%	103,5	1%	0%	N/A	95%	96,17%	101,21%	94%	97,80%	104,03%	5%	0	0%	95%	96,42%	101,49%	%	<b>103%</b>
Pengadilan Negeri Tulungagung	95%	99,22%	104,69%	1%	0%	N/A	80%	97,79%	122,24%	80%	98,11%	122,64%	5%	0%	N/A	85%	87,16%	102,54%	%	<b>111,36%</b>



**BENCHMARK KINERJA**  
**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE- WILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**TAHUN 2024**

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA						Capaian Per Sasaran
	Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	100%	100%	100%	6%	6,80%	113%	<b>106,50%</b>
Pengadilan Negeri Bangkalan	100%	100%	100%	10%	0%	0%	<b>50%</b>
Pengadilan Negeri Banyuwangi	80%	100%	125%	1%	20,50%	205%	<b>165%</b>
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	9%	12,16%	135,14%	<b>111,71%</b>
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	10%	8%	80%	<b>90%</b>
Pengadilan Negeri Bondowoso	100%	100%	100%	50%	11%	21%	<b>61%</b>
Pengadilan Negeri Gresik	100%	100%	100%	80%	9,23%	11,54%	<b>55,77%</b>
Pengadilan Negeri Jember	95%	100%	105,26	1%	4,41%	441	<b>273,13</b>
Pengadilan Negeri Jombang	100%	100%	100%	10%	19,69%	196,96	<b>148,48%</b>
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	90%	100%	111,11%	20%	23,86%	119,30%	<b>115,21%</b>
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	5%	27,59%	551,72%	<b>325,86%</b>
Pengadilan Negeri Kediri	100%	100%	100%	10%	15,22%	152%	<b>126%</b>
Pengadilan Negeri Kepanjen	100%	97,50%	97,50%	8%	10%	120%	<b>105%</b>
Pengadilan Negeri Kraksaan	85%	100%	118%	20%	3,08%	15,38%	<b>66,52%</b>
Pengadilan Negeri Lamongan	100%	100%	100%	3%	10,30%	343%	<b>221,50%</b>
Pengadilan Negeri Lumajang	100%	100%	100%	10%	17,14%	171,43%	<b>123,81%</b>
Pengadilan Negeri Madiun	100%	100%	100%	10%	26,00%	260,00%	<b>180,00%</b>
Pengadilan Negeri Magetan	100%	100%	100%	100%	5%	5%	<b>52,50%</b>
Pengadilan Negeri Malang	99,28%	99,85%	100,58%	5,23%	11,96%	228,61%	<b>164,60%</b>
Pengadilan Negeri Mojokerto	100%	100%	100%	25%	26,61%	106,42%	<b>102,42%</b>
Pengadilan Negeri Nganjuk	90%	100%	111,11%	10%	12%	119,00%	<b>115,06%</b>



Pengadilan Negeri Ngawi	100%	100%	100%	5%	0%	0%	<b>50%</b>
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	50%	33%	66%	<b>83%</b>
Pengadilan Negeri Pamekasan	100%	100%	100%	15%	11%	73,33%	<b>87%</b>
Pengadilan Negeri Pasuruan	100%	100%	100%	10%	22,73%	227,27%	<b>139</b>
Pengadilan Negeri Ponorogo	100%	100%	100%	5%	8,00%	160,00%	<b>130,00%</b>
Pengadilan Negeri Probolinggo	100%	100%	100%	10%	8,00%	80,00%	<b>90,00%</b>
Pengadilan Negeri Sampang	100%	100%	100%	10%	20%	200%	<b>150%</b>
Pengadilan Negeri Sidoarjo	100%	100%	100%	7%	9,66%	138%	<b>119%</b>
Pengadilan Negeri Situbondo	100%	100%	100%	10%	2%	24%	<b>120%</b>
Pengadilan Negeri Sumenep	100%	100%	100%	10%	2%	20%	<b>110,00%</b>
Pengadilan Negeri Surabaya	95%	98,69%	103,89%	3%	5,90%	196,55%	<b>150,22%</b>
Pengadilan Negeri Trenggalek	100%	100%	100%	1%	10,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
Pengadilan Negeri Tuban	100%	100%	100%	2%	8%	416%	<b>258%</b>
Pengadilan Negeri Tulungagung	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>30%</b>	<b>32,88%</b>	<b>109,59%</b>	<b>103,20%</b>



**BENCHMARK KINERJA**  
**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE- WILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**TAHUN 2024**

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA									Capaian Per Sasaran
	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan			Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	105%	95%	100%	130%	25%	100%	105%	95%	100%	113,33%
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	1%	100%	10000%	1%	0	N/A	100%	100%	100%	5050%
Pengadilan Negeri Blitar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	66,66%
Pengadilan Negeri Bondowoso	0%	100%	100%	70%	N/A	N/A	100%	100%	100%	66,66%
Pengadilan Negeri Gresik	5%	N/A	N/A	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Jember	10%	100%	1000	10%	100%	1000	95%	100%	105,26	70175,44%
Pengadilan Negeri Jombang	0%	0%	0%	0%	0	0	100%	100	100	33,33%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kediri	90%	100%	111,11%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	103,70%
Pengadilan Negeri Kepanjen	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Kraksaan	40%	91%	227%	N/A	N/A	N/A	90%	100%	111%	111,11%
Pengadilan Negeri Lamongan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Lumajang	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Madiun	2%	0%	0%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Malang	66,67%	100,00%	149,99%	N/A	N/A	N/A	90,00%	99,85%	110,94%	130,47%
Pengadilan Negeri	100	100%	100%	0%	N/A	N/A	100	100%	100%	100%



Mojokerto	%						%			
Pengadilan Negeri Nganjuk	100 %	0%	0%	1%	N/A	N/A	100 %	100%	100%	<b>50%</b>
Pengadilan Negeri Ngawi	-	-	N/A	-	-	N/A	100 %	100%	100%	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Pacitan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %	100%	100%	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Pamekasan	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Pasuruan	100 %	100	100	-	-	N/A	100 %	100%	100%	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Ponorogo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %	100%	100%	<b>33%</b>
Pengadilan Negeri Probolinggo	90%	100%	100%	0%	0%	0%	100 %	100%	100%	<b>67%</b>
Pengadilan Negeri Sampang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %	100%	100%	<b>33%</b>
Pengadilan Negeri Sidoarjo	75%	100%	133%	N/A	N/A	N/A	100 %	100%	100%	<b>117%</b>
Pengadilan Negeri Situbondo	1%	0%	0%	1%	0%	0%	100 %	100%	100%	<b>33,30 %</b>
Pengadilan Negeri Sumenep	2%	0	0	0	0	0	100 %	100%	100%	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Surabaya	0%	0,00%	N/A	100 %	100%	100%	0%	0,00%	N/A	<b>100%</b>
Pengadilan Negeri Trenggalek	100 %	100%	100%	0%	0%	0%	100 %	100%	100%	<b>33,30 %</b>
Pengadilan Negeri Tuban	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	98%	100%	102,04	<b>102,04 %</b>
Pengadilan Negeri Tulungagung	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>N/A</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>105,26</b>	<b>102,63 %</b>



**BENCHMARK KINERJA**  
**REKAPITULASI DATA CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SE- WILAYAH**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**TAHUN 2024**

SATUAN KERJA	INDIKATOR KINERJA			Capaian Per Sasaran
	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)			
	Target	Realisasi	Capaian	
Pengadilan Negeri Bangil	107%	90%	96%	107%
Pengadilan Negeri Bangkalan	0%	20%	0%	0%
Pengadilan Negeri Banyuwangi	25%	35,30%	141,20%	141,20%
Pengadilan Negeri Blitar	93%	100%	107,53%	107,53%
Pengadilan Negeri Bojonegoro	50%	75%	150%	154%
Pengadilan Negeri Bondowoso	90%	83%	93%	93%
Pengadilan Negeri Gresik	100%	46,67%	46,67%	46,67%
Pengadilan Negeri Jember	50%	77,77%	156%	156%
Pengadilan Negeri Jombang	29,41%	85%	25%	29,41%
Pengadilan Negeri Kab. Kediri	25%	26,32%	105,28%	105,28%
Pengadilan Negeri Kab. Madiun	20%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Kediri	40%	42,86%	107,15%	107,15%
Pengadilan Negeri Kapanjen	65%	67%	103%	103%
Pengadilan Negeri Kraksaan	50%	33%	67%	66,67%
Pengadilan Negeri Lamongan	5%	13,79%	275,80%	275,80%
Pengadilan Negeri Lumajang	40%	52,94%	132,35%	132,35%
Pengadilan Negeri Madiun	50%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadilan Negeri Magetan	100%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Malang	60,00%	114,29%	190,48%	190,48%
Pengadilan Negeri Mojokerto	50%	50,00%	50%	100%
Pengadilan Negeri Nganjuk	50%	79%	157%	157%
Pengadilan Negeri Ngawi	80%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Pacitan	100%	100%	100%	100%
Pengadilan Negeri Pamekasan	95%	100%	105%	105%
Pengadilan Negeri Pasuruan	80%	100%	125%	125%
Pengadilan Negeri Ponorogo	30%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Probolinggo	80%	83%	104%	104%
Pengadilan Negeri Sampang	10%	0%	0%	0%



Pengadilan Negeri Sidoarjo	30%	26,00%	86,00%	87%
Pengadilan Negeri Situbondo	50%	54,50%	109%	109%
Pengadilan Negeri Sumenep	5%	0%	0%	0%
Pengadilan Negeri Surabaya	15%	18,18%	121,21%	121,21%
Pengadilan Negeri Tunggalek	1%	100%	10000%	10000%
Pengadilan Negeri Tuban	30%	50%	167%	167%
Pengadilan Negeri Tulungagung	70%	53,85%	76,92%	76,92%



### C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 yang terdiri dari :

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. sebesar Rp. 5.548.719.000,00 ( Lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan ribu upiah).

1. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.940.000,00 ( Delapan puluh tujuh juta Sembilan empat puluh ribu rupiah )

#### 1. REVISI DIPA

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian anggaran belanja Pengadilan Negeri Situbondo melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Situbondo telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

**Revisi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) tahun 2024 adalah :**

##### 1. Revisi DIPA 01 ke 1 ( 12 April 2023 )

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA

##### 2. Revisi DIPA ke 2 ( 24 Juli 2023 )

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker karena ada kegiatan yang tidak terpakai :

521111 D : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Pakaian Dinas Non Hakim Rp. 5.530.000.000
- Kelebihan anggaran Linsensi Vidio Conferen Rp. 2.976.000.000
- MENJADI ditambahkan ke

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa ( Konsultasi ke KPPN/DJKN

- Uang Transport sebesar Rp. 2.620.0000.

523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 4.312.0000.

523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Perangkat Jaringan sebesar Rp. 484.0000.

##### 3. Revisi DIPA ke 3 ( 13 September 2023 )

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun , karena ada kelebihan anggaran dan ada yang kekurangan anggaran :

521252 : Belanja Peralatan dan Mesin :

- Kelebihan anggaran Pengadaan Inventarisasi CPNS





Rp. 1.878,000.000

521111 B : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Pelantikan dan sumpah Rp. 4.869.000
- MENJADI ditambahkan ke Akun .

523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 1.540.0000.

521811 Belanja Barang Persediaan barang konsumsi

- Belanja Bahan Kepeluan Kantor sehari-hari Rp. 207.0000

4. Revisi Dipa ke 4 (13 Nopember 2023 )

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun , karena ada kelebihan anggaran dan ada yang kekurangan anggaran :

521119 B : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Pelantikan dan sumpah Rp. 4.869.000

523121 - Kelebihan anggaran Pemeliharaan Genjet Rp. 2.500.000

522113 : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Langganan air Rp. 8.400.000
- MENJADI ditambahkan ke Akun

523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 3.080.0000.

521811 Belanja Barang Persediaan barang konsumsi

- Belanja Bahan Kepeluan Kantor sehari-hari Rp.5.600.0000

523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Belanja bahan bakar genset Rp.2.500.0000

**Revisi DIPA 03 (Ditjen Baan Peradilan Umum) tahun 2023 adalah :**

**1. Revisi Dipa ke 1 (12 April 2023 )**

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA

**2. Revisi Dipa ke 2 (13 Juli 2023 )**

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA dan pergeseran

- ❖ Belanja barang konsumsi persediaan barang konsumsi

Akun 521811 – Alat tulis kantor

Semula Rp. 90.000. menjadi Rp. 136.000.

**3. Revisi Dipa ke 3 (27 September 2023 )**

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker karena ada pergeseran antar akun :



**Pendaftaran Berkas Perkara**

- ❖ Belanja barang konsumsi persediaan barang konsumsi  
Akun 521811 – Alat tulis kantor  
Semula Rp 136.000. menjadi Rp. 120.000
- ❖ Belanja barang konsumsi persediaan barang konsumsi  
Akun 521211 – Penggandaan dan penjiilidan berkas perkara  
Semula Rp. 45.000. menjadi Rp.37.500

**PENYERAPAN ANGGARAN**

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara. Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun anggaran 2024 medapatkan 2 (Dua) DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) / DIPA 01 (098211) dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03 (099146)

**1. DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)**

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung dan bangunan. Pada tahun anggaran 2024 DIPA 01 mendapat pagu sebesar Rp. 5.548.719.000,00 ( Lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan ribu upiah).

Dari total pagu DIPA Rp. 5.548.719.000,00 dapat terealisasi 99.45% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.5.518.058.270,00.( Lima milyar lima ratus delapan belas juta lima puluh depalan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah )

Dari daftar rincian realisasi kegiatan, semua jenis belanja berhasil terserap diatas 98,75 % dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja pegawai sebesar 99,40 %, Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran DIPA 01

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	4.030.382.000,00	4,006,344,612,00	99.40 %	24,037,388,00	<b>0,6 %</b>
Barang	1,518,337,000,00	1,511,713,658,00	99.56 %	6,623,342,00	<b>0,44 %</b>



Modal	0	0		0	
Total	<b>5,548,719,000</b>	<b>5,518,058,270</b>	<b>99.45 %</b>	<b>30,660,730</b>	<b>(1,04%)</b>

Tabel 107 : Realisasi Belanja DIPA 01

### 1. DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (099146)

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2024 DIPA 03 mendapatkan dana sebesar Rp. 87.940.000,00 ( Delapan puluh tujuh juta Sembilan empat puluh ribu rupiah ) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penyelesaian perkara.

Pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap sebesar Rp 87.605.995,00 atau 99,62,%. Dari anggaran yang tersedia

Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran DIPA 03 :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	58,440,000,00	58,105,995,00	99.43 %	334,005,00	<b>0,38%</b>
Kimwasmat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	<b>0 %</b>
Pos Bankum	28.000.000,00	28.000.000,00	100 %	0	<b>0 %</b>
Total	<b>87,940,000,00</b>	<b>87,605,995,00</b>	<b>99.62%</b>	<b>334,005,00</b>	<b>0,38%</b>

Tabel 108 : Realisasi Belanja DIPA 03

Rincian realisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

#### A. DIPA 01

##### 1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2024 sebesar Rp. 4.030.382.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.006.344.612,00 dengan jumlah pegawai 34 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,40 % . , tidak optimalnya penyerapan ada beberapa pegawai pesiun dan mutasi diakhir tahun (Laporan Realisasi anggaran kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini).

##### 2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2024 sebesar Rp. 1.518.337.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.511.713.000,00 sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,56 %. Realisasi anggaran belanja barang, penyerapan optimal karena melakukan Revisi POK dan kami melakukan koordinasi dengan korwil Jatim yaitu Pengadilan Tinggi Surabaya



## B. DIPA 03

### 1. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2024 sebesar Rp. 87.940.000 yang dialokasi pada mata anggaran Biaya perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama, Pos Layanan Hukum di telah direalisasikan sebesar Rp. 87,605,995,00 sehingga penyerapan anggaran mencapai 99.62 %. Akan tetapi di semester 2 kami mengalami penarikan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 ( Dua puluh Juta ), Adanya sisa anggaran yang tidak terserap mengenai jenis belanja “biaya perkara pidana yang diselesaikan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2024 dan DIPA-03 Tahun 2024 telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2024 pada satker Pengadilan Negeri Situbondo telah mencapai 99,45%. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 99.62%.

Maka untuk total penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 adalah 99.53%.



Tabel 109 : REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 : DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akur; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 098221 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>5,548,719,000</b>	<b>0</b>	<b>5,244,945,112</b>	<b>273,113,158</b>	<b>5,518,058,270</b>	<b>99.45 %</b>	<b>30,660,730</b>
WA Program Dukungan Manajemen	5,548,719,000	0	5,244,945,112	273,113,158	5,518,058,270	99.45 %	30,660,730
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5,548,719,000	0	5,244,945,112	273,113,158	5,518,058,270	99.45 %	30,660,730
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,548,719,000	0	5,244,945,112	273,113,158	5,518,058,270	99.45 %	30,660,730
EBA.994 Layanan Perkantoran	5,548,719,000	0	5,244,945,112	273,113,158	5,518,058,270	99.45 %	30,660,730
001 Gaji dan Tunjangan	4,030,382,000	0	3,874,790,375	131,554,237	4,006,344,612	99.40 %	24,037,388
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	4,030,382,000	0	3,874,790,375	131,554,237	4,006,344,612	99.40 %	24,037,388
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,790,559,000	0	1,790,165,820	391,300	1,790,557,120	100.00	1,880
000001 Belanja Gaji Pokok PNS	1,521,927,000	0	1,521,534,840	391,300	1,521,926,140	100.00	860
000002 Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji Ke 13 )	137,967,000	0	137,966,880	0	137,966,880	100.00	120
000003 Belanja Gaji Pokok PNS ( Gaji ke 14 )	130,665,000	0	130,664,100	0	130,664,100	100.00	900
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,000	0	26,832	37	26,869	99.51 %	131
000005 Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	0	22,884	37	22,921	99.66 %	79
000006 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( Gaji ke -13 )	2,000	0	2,062	0	2,062	103.10	-62
000007 Belanja Pembulatan Gaji PNS ( Gaji ke - 14 )	2,000	0	1,866	0	1,866	94.30 %	114
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	123,132,000	0	123,109,650	21,030	123,130,680	100.00	1,320
000008 Belanja Tunj Suami/Istri PNS	104,674,000	0	104,652,420	21,030	104,673,450	100.00	550
000009 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( Gaji ke - 13 )	9,254,000	0	9,253,960	0	9,253,960	100.00	40
000010 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS ( Gaji ke -14 )	9,204,000	0	9,203,270	0	9,203,270	99.99 %	730
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	40,403,000	0	40,392,674	8,412	40,401,086	100.00	1,914
000011 Belanja Tunj. Anak PNS	34,509,000	0	34,499,874	8,412	34,508,286	100.00	714
000012 Belanja Tunj. Anak PNS ( Gaji ke - 13 )	2,957,000	0	2,956,538	0	2,956,538	99.98 %	462
000013 Belanja Tunj. Anak PNS ( Gaji ke - 14 )	2,937,000	0	2,936,262	0	2,936,262	99.97 %	738
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	26,300,000	0	26,300,000	0	26,300,000	100.00	0
000014 Belanja Tunj. Struktural PNS	22,180,000	0	22,180,000	0	22,180,000	100.00	0
000015 Belanja Tunj. Struktural PNS ( Gaji ke 13 )	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Satuan Kerja : 098221 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Hal 2 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS ( Gaji ke - 14 )	2,080,000	0	2,080,000	0	2,080,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,439,410,000	0	1,363,010,000	76,400,000	1,439,410,000	100.00	0
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,251,290,000	0	1,174,890,000	76,400,000	1,251,290,000	100.00	0
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS ( Gaji Ke - 13 )	94,060,000	0	94,060,000	0	94,060,000	100.00	0
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS ( Gaji Ke - 14 )	94,060,000	0	94,060,000	0	94,060,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	190,696,000	0	179,637,119	11,056,458	190,693,577	100.00	2,423
000020. Belanja Tunj. PPh PNS	124,615,000	0	113,557,845	11,056,458	124,614,303	100.00	697
000021. Belanja Tunj. PPh PNS ( Gaji ke -13 )	33,114,000	0	33,113,117	0	33,113,117	100.00	883
000022. Belanja Tunj. PPh PNS ( Gaji ke -14 )	32,967,000	0	32,966,157	0	32,966,157	100.00	843
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	89,367,000	0	89,366,280	0	89,366,280	100.00	720
000023. Belanja Tunj. Beras	89,367,000	0	89,366,280	0	89,366,280	100.00	720
511129 Belanja Uang Makan PNS	298,623,000	0	230,917,000	43,677,000	274,594,000	91.95 %	24,029,000
000024. Belanja Uang Makan PNS	298,623,000	0	230,917,000	43,677,000	274,594,000	91.95 %	24,029,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	31,865,000	0	31,865,000	0	31,865,000	100.00	0
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS	26,890,000	0	26,890,000	0	26,890,000	100.00	0
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS ( Gaji ke -13 )	2,785,000	0	2,785,000	0	2,785,000	100.00	0
000027. Belanja Tunjangan Umum PNS ( Gaji ke - 14 )	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,518,337,000	0	1,370,154,737	141,558,921	1,511,713,658	99.56 %	6,623,342
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	547,085,000	0	494,982,600	52,008,000	546,990,600	99.98 %	94,400
S21111 Belanja Keperluan Perkantoran	471,793,000	0	431,558,500	40,181,500	471,740,000	99.99 %	53,000
000028. Satpam	99,240,000	0	90,970,000	8,270,000	99,240,000	100.00	0
000029. Pengemudi	148,860,000	0	136,455,000	12,405,000	148,860,000	100.00	0
000030. Pramubakti	180,432,000	0	165,396,000	15,036,000	180,432,000	100.00	0
000031. THR Satpam	8,270,000	0	8,270,000	0	8,270,000	100.00	0
000032. THR Pengemudi	12,405,000	0	12,405,000	0	12,405,000	100.00	0
000033. Pramubakti	15,036,000	0	15,036,000	0	15,036,000	100.00	0
000077. Belanja air minum pegawai dan pengunjung	4,000,000	0	2,878,500	1,112,500	3,991,000	99.78 %	9,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Satuan Kerja : 098221 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Hal 3 dari 5

Urutan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
sidang	4,000,000	0	2,878,500	1,112,500			9,000
000078. Belanja snack untuk tamu instansi / lembaga lain ( eksternal )	3,000,000	0	148,000	2,828,000	2,976,000	99.20 %	24,000
000079. Penjilidan Kegiatan pelaksanaan bukan perkara	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00 %	0
000085. Keperluan Administrasi Perbankan	50,000	0	0	30,000	30,000	60.00 %	20,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	13,000,000	0	9,300,500	3,664,500	12,965,000	99.73 %	35,000
000081. Keperluan sehari hari keperluan kantor lainnya	8,000,000	0	4,335,500	3,664,500	8,000,000	100.00 %	0
000084. Belanja Kapitalisasi	5,000,000	0	4,965,000	0	4,965,000	99.30 %	35,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	62,292,000	0	54,123,800	8,162,000	62,285,800	99.99 %	6,400
000034. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	62,292,000	0	54,123,800	8,162,000	62,285,800	99.99 %	6,400
002.08 LANGGANAN DAYA DAN JASA	187,124,000	0	153,185,913	30,944,250	184,130,163	98.40 %	2,993,837
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	171,824,000	0	143,158,500	28,665,500	171,824,000	100.00 %	0
000035. Langganan Internet	165,324,000	0	138,158,500	27,165,500	165,324,000	100.00 %	0
000036. Licensi Video Conference	8,500,000	0	5,000,000	1,500,000	6,500,000	100.00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	0	2,100,500	145,500	2,246,000	53.48 %	1,954,000
000037. Biaya Pengiriman Surat Dinas / POS	4,200,000	0	2,100,500	145,500	2,246,000	53.48 %	1,954,000
522112 Belanja Langganan Telepon	1,500,000	0	359,163	1,077,500	1,438,663	95.78 %	63,337
000038. Langganan Telepon	1,500,000	0	359,163	1,077,500	1,438,663	95.78 %	63,337
522113 Belanja Langganan Air	9,600,000	0	7,567,750	1,055,750	8,623,500	89.83 %	976,500
000039. Belanja Langganan Air	9,600,000	0	7,567,750	1,055,750	8,623,500	89.83 %	976,500
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	615,670,000	0	580,357,677	35,203,000	615,560,677	99.98 %	109,323
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306,939,000	0	305,772,477	1,145,000	306,917,477	99.99 %	21,523
000040. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	5,140,000	0	3,993,500	1,145,000	5,138,500	99.97 %	1,500
000041. Pemeliharaan Gedung Kantor	301,799,000	0	301,778,977	0	301,778,977	99.99 %	20,023
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	88,400,000	0	88,346,600	0	88,346,600	99.94 %	53,400
000042. Pemeliharaan Rumah Dinas	88,400,000	0	88,346,600	0	88,346,600	99.94 %	53,400
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	220,331,000	0	186,238,600	34,058,000	220,296,600	99.98 %	34,400

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024**  
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 098221 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000043. Pemeliharaan Genset 80 KVA	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000044. BBM Genset 80 KVA	3,000,000	0	1,510,000	1,490,000	3,000,000	100.00	0
000045. Pemeliharaan Perangkat Jaringan	4,950,000	0	969,000	3,980,000	4,949,000	99.98 %	1,000
000046. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	23,400,000	0	18,048,000	5,352,000	23,400,000	100.00	0
000047. Pemeliharaan PC	17,850,000	0	17,837,500	0	17,837,500	99.93 %	12,500
000048. Pemeliharaan Printer	10,350,000	0	10,345,000	0	10,345,000	99.95 %	5,000
000049. Pemeliharaan AC Split	13,420,000	0	13,415,000	0	13,415,000	99.96 %	5,000
000050. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	124,000,000	0	101,924,100	22,075,000	123,999,100	100.00	900
000082. Pemeliharaan CCTV	5,361,000	0	4,190,000	1,161,000	5,351,000	99.81 %	10,000
000083. Pemeliharaan Keperluan Inventaris Kantor	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
002.00 PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	64,298,000	0	58,070,000	6,128,000	64,198,000	99.84 %	100,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	22,350,000	0	22,250,000	0	22,250,000	99.55 %	100,000
000051. Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	17,250,000	0	17,240,000	0	17,240,000	99.94 %	10,000
000052. Pakaian Kerja Satpam	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000053. Pakaian Kerja Pengemudi	1,500,000	0	1,490,000	0	1,490,000	99.33 %	10,000
000054. Pakaian Kerja Pramubakli	2,000,000	0	1,920,000	0	1,920,000	96.00 %	80,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	41,948,000	0	35,820,000	6,128,000	41,948,000	100.00	0
000055. Honor Bendahara PNPB	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000056. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	100.00	0
000057. Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	4,752,000	0	3,960,000	792,000	4,752,000	100.00	0
000058. Honor Bendahara Pengeluaran	4,128,000	0	3,440,000	688,000	4,128,000	100.00	0
000059. Honor Staf Pengelola Keuangan	6,144,000	0	5,120,000	1,024,000	6,144,000	100.00	0
000060. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	18,144,000	0	15,120,000	3,024,000	18,144,000	100.00	0
002.0F PELANTIKAN DAN SUMPAAH JABATAN	5,760,000	0	3,900,000	1,860,000	5,760,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	5,760,000	0	3,900,000	1,860,000	5,760,000	100.00	0
000061. Konsumsi	4,800,000	0	3,200,000	1,600,000	4,800,000	100.00	0
000062. Bahan/Spanduk/Dokumentasi	960,000	0	700,000	260,000	960,000	100.00	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPa atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPa/POK selesai menjadi DIPa.





LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098221 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Hal 5 dari 5

Table with columns: Uraian, Pagu Revisi, Lock Pagu, Realisasi TA 2024 (Periode Lalu, Periode Ini, s.d. Periode, %), SISA ANGGARAN. Rows include RAPAT KOORDINASI INTERNAL, Belanja Barang Operasional Lainnya, KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING / STUDI BANDING, KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL, and HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM DAN HAKIM AD HOC.

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



TABEL 110 PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 03 : DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum (099146)

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>96,740,000</b>	<b>0</b>	<b>78,319,500</b>	<b>16,995,500</b>	<b>95,315,000</b>	<b>98.53 %</b>	<b>1,425,000</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	96,740,000	0	78,319,500	16,995,500	95,315,000	98.53 %	1,425,000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	96,740,000	0	78,319,500	16,995,500	95,315,000	98.53 %	1,425,000
<b>AEA Koordinasi</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>052 Dukungan Penyelesaian Perkara</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
052.0A Kimwasmat	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
000001. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	100.00	0
<b>BCA Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>78,440,000</b>	<b>0</b>	<b>63,569,500</b>	<b>13,445,500</b>	<b>77,015,000</b>	<b>98.18 %</b>	<b>1,425,000</b>
<b>BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat</b>	<b>78,440,000</b>	<b>0</b>	<b>63,569,500</b>	<b>13,445,500</b>	<b>77,015,000</b>	<b>98.18 %</b>	<b>1,425,000</b>
<b>051 Pendaftaran Berkas Perkara</b>	<b>32,100,000</b>	<b>0</b>	<b>24,554,500</b>	<b>7,025,000</b>	<b>31,579,500</b>	<b>98.38 %</b>	<b>520,500</b>
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	32,100,000	0	24,554,500	7,025,000	31,579,500	98.38 %	520,500
521211 Belanja Bahan	6,660,000	0	4,223,000	1,961,000	6,184,000	92.85 %	476,000
000002. Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	6,660,000	0	4,223,000	1,961,000	6,184,000	92.85 %	476,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,440,000	0	20,331,500	5,064,000	25,395,500	99.83 %	44,500
000003. Alat Tulis Kantor	25,440,000	0	20,331,500	5,064,000	25,395,500	99.83 %	44,500
<b>053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.</b>	<b>12,600,000</b>	<b>0</b>	<b>12,560,000</b>	<b>0</b>	<b>12,560,000</b>	<b>99.68 %</b>	<b>40,000</b>
053.0A Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	12,600,000	0	12,560,000	0	12,560,000	99.68 %	40,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,600,000	0	12,560,000	0	12,560,000	99.68 %	40,000
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	12,600,000	0	12,560,000	0	12,560,000	99.68 %	40,000
<b>054 Pemeriksaan di sidang pengadilan</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,540,000</b>	<b>420,000</b>	<b>5,960,000</b>	<b>99.33 %</b>	<b>40,000</b>
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	6,000,000	0	5,540,000	420,000	5,960,000	99.33 %	40,000
521211 Belanja Bahan	6,000,000	0	5,540,000	420,000	5,960,000	99.33 %	40,000
000005. Komsumsi Makan Terdakwa	6,000,000	0	5,540,000	420,000	5,960,000	99.33 %	40,000
<b>055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa</b>	<b>12,600,000</b>	<b>0</b>	<b>9,290,000</b>	<b>3,150,000</b>	<b>12,440,000</b>	<b>98.73 %</b>	<b>160,000</b>

BAB III – Akuntabilitas Kinerja



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
055.0A Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	12,600,000	0	9,290,000	3,150,000	12,440,000	98.73 %	160,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,600,000	0	9,290,000	3,150,000	12,440,000	98.73 %	160,000
000007. Pengiriman Salinan Putusan	12,600,000	0	9,290,000	3,150,000	12,440,000	98.73 %	160,000
<b>056 Minutasi/Upaya hukum</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0</b>	<b>5,615,000</b>	<b>1,560,000</b>	<b>7,175,000</b>	<b>99.65 %</b>	<b>25,000</b>
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,200,000	0	5,615,000	1,560,000	7,175,000	99.65 %	25,000
521211 Belanja Bahan	7,200,000	0	5,615,000	1,560,000	7,175,000	99.65 %	25,000
000008. Pengandaan dan Penjilidan Berkas	7,200,000	0	5,615,000	1,560,000	7,175,000	99.65 %	25,000
<b>057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama</b>	<b>4,755,000</b>	<b>0</b>	<b>3,785,000</b>	<b>583,000</b>	<b>4,368,000</b>	<b>91.86 %</b>	<b>387,000</b>
057.0A Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	4,755,000	0	3,785,000	583,000	4,368,000	91.86 %	387,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	555,000	0	0	233,000	233,000	41.98 %	322,000
000009. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	555,000	0	0	233,000	233,000	41.98 %	322,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	3,785,000	350,000	4,135,000	98.45 %	65,000
000010. Pemberitahuan Biaya Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	2,800,000	0	2,625,000	140,000	2,765,000	98.75 %	35,000
000011. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	1,400,000	0	1,160,000	210,000	1,370,000	97.86 %	30,000
<b>058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>	<b>3,185,000</b>	<b>0</b>	<b>2,225,000</b>	<b>707,500</b>	<b>2,932,500</b>	<b>92.07 %</b>	<b>252,500</b>
058.0A Penangan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	3,185,000	0	2,225,000	707,500	2,932,500	92.07 %	252,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	455,000	0	0	287,500	287,500	63.19 %	167,500
000012. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	455,000	0	0	287,500	287,500	63.19 %	167,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,730,000	0	2,225,000	420,000	2,645,000	96.89 %	85,000
000013. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	1,050,000	0	575,000	420,000	995,000	94.76 %	55,000
000014. Pemberitahuan Biaya Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	1,680,000	0	1,650,000	0	1,650,000	98.21 %	30,000
<b>OBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>	<b>16,800,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>OBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum</b>	<b>16,800,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
<b>051 Pos Bantuan Hukum</b>	<b>16,800,000</b>	<b>0</b>	<b>14,000,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	16,800,000	0	14,000,000	2,800,000	16,800,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	16,800,000	0	14,000,000	2,800,000	16,800,000	100.00	0
000015. Honor Advokat/Pengacara Piket	16,800,000	0	14,000,000	2,800,000	16,800,000	100.00	0



## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang memuat laporan capaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo selama kurun waktu Tahun 2024 yang dituangkan dalam 8 (empat) target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo, ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Situbondo karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama Tahun 2024 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun 2024 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2024 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun 2024 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pengguna Pengadilan sehingga dapat tercapai tujuan yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Situbondo.





# LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
NOMOR : 2951/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang - Undang...



4. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO;

KESATU : Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan keputusan ini dan melaporkan hasil penyusunan LKjIP Tahun 2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo paling lambat tanggal 7 Februari 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Salinan** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

---

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Achmad Rasjid

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
SITUBONDO KELAS IB  
Nomor : 2951/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024  
Tanggal: 31 Desember 2024

### TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Achmad Rasjid, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001	Ketua	Penanggung Jawab
2	Haries Suharman Lubis , S.H.MH. NIP. 19770327 200112 1 002	Wakil Ketua	Koodinator Validasi Data
3	Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. NIP. 198002042007041002	Hakim	Pereviu Laporan Kinerja
4	I Ketut Sueca SH NIP.19800927 200212 1 002	Panitera	Ketua
5	Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001	Plt. Sekretaris/ KaSubBag PTIP	Sekretaris
6	Khudzaifah, S.H. 19670515 198903 2 015	Panitera Muda Pidana	Anggota
7	Haryono, S.H. 19701016 199303 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
9	Intan Mustika Atmaningrum,SH. NIP. 19840528 2005 02 2 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
10	Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, S.H. NIP. 19851224 200805 200 1	KaSubBag Kepegawaian, Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Achmad Rasjid

**LAMPIRAN II**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI  
SITUBONDO KELAS IB  
Nomor : 2951/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024  
Tanggal: 31 Desember 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN TIM</b>	<b>TUGAS</b>
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Situbondo
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6	Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Achmad Rasjid

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD RASJID, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /  
Pihak Kedua,



Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.  
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /  
Pihak Pertama,



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP. 19740915 200003 1001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Pidana	100 %
		- Perdata	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91 %		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi )	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK

	kelola yang baik	c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98%
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwirth yang memadai	100 Mpbs
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126 org
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 tersebut didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.604.987.000.00.
	A. Layanan Umum	Rp 5.604.987.000.00.
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 4.176.650.000.00.
	C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.428.337.000.00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 107.940.000.00.
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000.00.
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000.00.
	C. Layanan Bantuan Hukum	Rp 28.000.000.00.

Surabaya, 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /  
Pihak Kedua,



**Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.**  
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /  
Pihak Pertama,



**ACHMAD RASJID, S.H.**  
NIP. 19740915 200003 1001






## **PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.


Situbondo, 4 Januari 2024  
Pengadilan Negeri Situbondo  
KETUA,  
  
ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK
		c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	" A "
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk	97 %

		kerja	
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwidth yang memadai	100 Mbps
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98%
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Situbondo, 4 Januari 2024  
Pengadilan Negeri Situbondo  
KETUA ,

  
ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
NOMOR : 147 / KPN.PN.W14-U18 / KP3.4.1 / I / 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi sistem akuntabilitas kerja maka perlu disusun rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB 2020-2024;
- b. Bahwa dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 diperlukan adanya Tim Penyusun;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Tahunan di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;



6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**M E M U T U S K A N .**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KLAS IB;**
- Pertama : Menunjuk Penyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tim Kerja melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024



LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
Nomor : 147/KPN.PN.W14.U18/KP3.4.1/1/2024  
Tanggal : 03 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Achmad Rasjid, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001	Ketua	Penasehat
2	I Gede Karang Anggayasa , S.H.MH. NIP. 19770416 200021 2 001	Hakim	Ketua Pelaksana
3	Sutoto Winarno, S.H. NIP. 19650221 199403 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	I Ketut Sueca SH NIP.19800927 200212 1 002	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	Slamet Ridwan SE,SH.M.Hum. 19710616 199303 1.003	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Haryono, S.H. 19701016 199303 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001	Kasubag. PTIP	Anggota
9	Annang Mardiyanto, SH NIP. 196601131993031005	Kasubag Ortala	Anggota
10	Intan Mustika Atmaningrum,SH. NIP. 19840528 2005 02 2 001	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024



## REVIU MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2020-2024

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan .  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan di Pengadilan.  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan .

	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH				
					TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024
1	Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan Akutabel	Meningkatkan Peradilan yang pasti, tepat, cepat, sederhana dan murah	Meningkatkan Penyelesaian Perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
				Perdata	80%	80%	82%	82%	83%
				b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative.	10%	10%	10%	10%	10%
				c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	75%	77%	77%	80%
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	95%	95%	95%	97%
				e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	1%	1%	1%	1%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92	92	92	95	95				
2	Peningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Meningkatkan Efektifitas dan Akurasi Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu .	100%	100%	100%	100%	100%
				b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	5%	5%
3	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan	Memberikan Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan	Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	0%	0%	1%
				b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1%	1%	0%	0%	1%
				c. Persentase pencari keadilan	100%	100%	100%	100%	100%

				golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum )					
4	Meningkatkan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Memberikan Kepastian Hukum bagi Pencari keadilan	Pelaksanaan Putusan yang ditindaklanjuti	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( eksekusi )	50%	50%	50%	50%	50%
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinam	Meningkatnya Manajemen SDM yang professional dan berkesinam	Pelaksanaan Manajemen SDM yang professional dan berkesinam	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhistandar kompetensi jabatan menajerial	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
				b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	Meningkatnya regulasi dan tata kelola yang baik	Pelaksanaan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal " BB "	75	75	75	75	75
				b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	WBK	WBK	WBK	WBK
				c. Nilai IPK	90	90	91	91	92
				d. Nilai IKM	90	90	91	91	92
				e. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh ( Ampuh ) Pengadilan Kelas I B	A	A	A	A	783,81 Utama
				f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				g. Prosestase realisasi anggaran belanja	95 %	95 %	96 %	97 %	98 %
				h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %



			i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %	96 %	97 %	97 %	98 %	
			j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	Memberikan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	1	1	1
				b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang memadai	50 Mpbs	80 Mpb	100 Mpb	100 Mpb	100 Mpbs
				c. Prosestase distribusi surat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
				d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%
				e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %
				f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	5	5	5	6	7
				g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	24	30	35	35	36
				h. Jumlah layanan di Pengadilan	5	5	5	6	6
				i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org	200 Org
				j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	94 org	96 org	98 org	120 org	126 org
				k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%
				l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2	/1540 m2	/1540 m2	/1540 m2	1/1540 m2
				m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7/884 m2	7/884 m2	7/884 m2	7/884 m2	7/884 m2
				n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	638 Unit
				o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layan an	12 Layan an	12 Layan an	12 Layan an	12 Layan an

8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Meningkatkan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terwujudnya kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	60 %	70 %	80 %	80 %	80 %
---	---	--	---	---	------	------	------	------	------

Situbondo, 30 Desember 2024

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, SH.  
NIP. 19740915 200003 1 001

**INDIKATOR KINERJA (IKU) SMART  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TAHUN 2024**

No.	IKU SMART	SPESIFIK/KHUSUS	MEASURABLE/TERUKUR	ACHIVEBLE/MAMPU DICAPAI	RELEVANT/KESESUAIAN DENGAN TUPOKSI	TIME BOUND/WAKTU
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara tahun berjalan ditambah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SEMA No. 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	1 tahun
2.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice (RJ) adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan RJ dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan RJ dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1691/DJU/PS.00/12/2020 tentang Pedoma Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum	1 tahun
3.	Persentase perkara	Perkara yang	Perbandingan jumlah	Adanya dukungan	Secara hukum, semakin	1 tahun

	yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	diajukan upaya hukum banding	perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%	SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan	
4.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	Perkara yang diajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Secara hukum, semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan	1 tahun
5.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi	Perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi kali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	1 tahun
6.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indexs kepuasan pencari keadilan	Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konfersiinterval IKM index harus $\geq 80$	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	1 tahun
7.	Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju/Para Pihak	Untuk di Pengadilan Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak	Perbandingan antara salinan putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penyampaian salinan putusan	1 tahun
8.	Persentase Salinan Putusan yang	Untuk di Pengadilan	Perbandingan antara jumlah salinan putusan	Adanya dukungan SDM, anggaran	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang	1 tahun

	disampaikan ke para pihak tepat waktu	Tingkat pertama disampaikan kepada para pihak	yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Penyampaian salinan putusan	
9.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan	1 tahun
10.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	1 tahun
11.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan dikali 100%	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	1 tahun
12.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat	Golongan tertentu yang mendapatkan	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian	Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan	1 tahun

	Layanan Bantuan Hukum ( Posbakum )	layanan bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang teringgirkan	mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum dikali 100%	perkara dan teknologi informasi	Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.	
14.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi termasuk penetapan non executable.	Perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah sesuai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi	Adanya dukungan SDM, anggaran penyelesaian perkara dan teknologi informasi	Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti, maka semakin bagus kinerja pengadilan	1 tahun

Situbondo, 5 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



**ACHMAD RASJID SH**  
**NIP. 19740915 200003 1 000**

## CASCADING PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2024

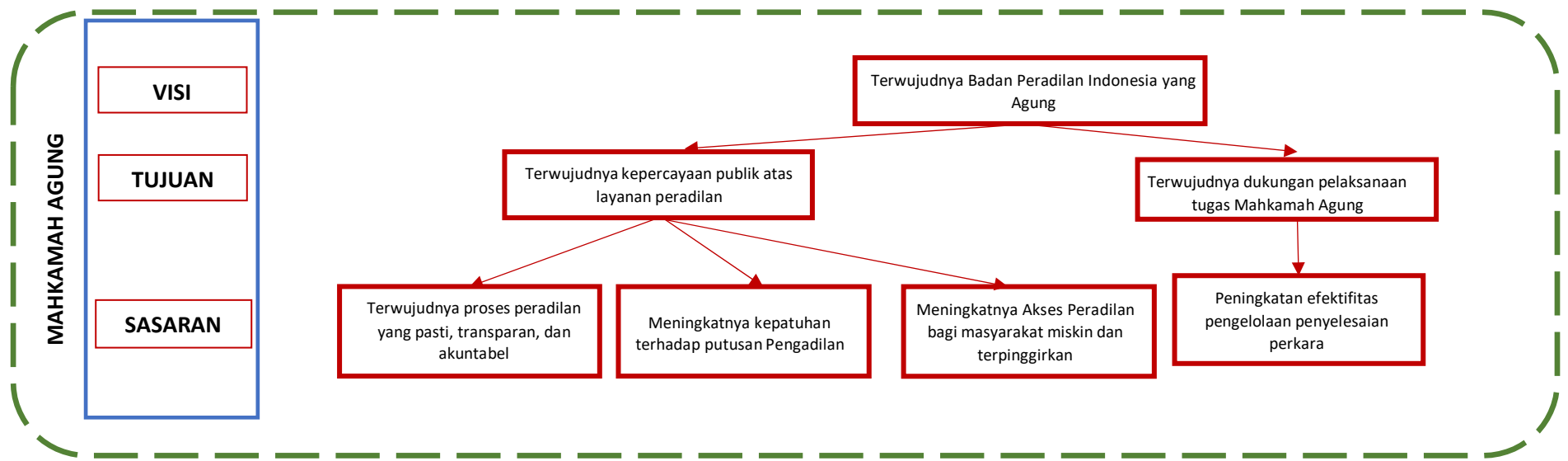
No	INDIKATOR KINERJA		SASARAN KINERJA		Penjabaran Kinerja Pegawai
	Uraian	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Output/Keluaran	
1	Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang mandiri, transparansi dan akuntabel	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Perdata</li> <li>➢ Pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pencatatan kedalam Register Induk serta pengisian pada Aplikasi SIPP.</li> <li>➢ Penetapan Majelis Hakim</li> <li>➢ Pengiriman Penetapan Hari Sidang,</li> <li>➢ Penetapan Perpanjangan Penahanan</li> <li>➢ Penyelesaian Minutusi perkara</li> </ul>
			b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama khususnya perkara anak dan narkoba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penerapan aturan yang terkait dengan Restoratif</li> <li>➢ Pencapaian keadilan, melakukan perbaikan maupun pemulihan keadaan korban .</li> <li>➢ Terlaksananya persidangan menggunakan dialog / mediasi</li> <li>➢ Atau persidangan teleconfren</li> <li>➢ Penyelesaian perkara narkoba melalui non penal / rehabilitasi</li> </ul>
			c. Banding <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Perdata</li> <li>➢ Pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sebagai tolak ukur tingkat kepuasan terhadap putusan hakim di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan</li> <li>➢ Perkara Pidana dan Perdata yang tidak mengajukan upaya banding</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Rekapitulasi terhadap upaya hukum Banding</li> <li>➢ Penyampaian salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu .</li> <li>➢ Memberitahukan hak – hak kepada para pihak yang berperkara</li> <li>➢ Melakukan surve secara berkala kepada masyarakat pencari keadilan Penyampaian salinan putusan tingkat pertama yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu</li> <li>➢ Pengiriman berkas banding yang tepat waktu</li> </ul>

			<p>d. Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perdata</li> <li>➤ Pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebagai tolak ukur tingkat kepuasan terhadap putusan hakim di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan</li> <li>➤ Putusan Perkara di tingkat Pertama Perkara Pidana yang diputus bebas dan perkara Permohonan Perdata yang tidak mengajukan upaya Kasasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rekapitulasi terhadap upaya hukum Kasasi</li> <li>➤ Penyampaian salinan putusan tingkat pertama yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>➤ Pengiriman berkas Kasasi yang tepat waktu</li> <li>➤ Melakukan survei secara berkala kepada masyarakat pencari keadilan</li> </ul>
			<p>e. Persentase perkara Pidana Anak diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Perkara pidana anak yang dilakukan menggunakan upaya mediasi kesemua pihak yang berpekara (korban dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rekapitulasi putusan perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.</li> <li>➤ Mempublikasi tingkat keberhasilan perkara yang diselesaikan dengan diversi.</li> <li>➤ Mengunggah Salinan putusan dan Anonimisasi ke SIPP</li> </ul>
			<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sebagai tolak ukur tingkat kepuasan terhadap putusan hakim di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terjadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat secara periodik</li> <li>➤ Data hasil kusioner SKM</li> <li>➤ Hasil Kusioner SKM Laporan SKM</li> </ul>
2	<p>Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui pemanfaatan Tehnologi</p>	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terlaksananya Penyampaian Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu</li> <li>➤ Melaksanakan minutasi perkara Tepat waktu</li> <li>➤ Tindaklanjut penyelesaian perkara</li> </ul>

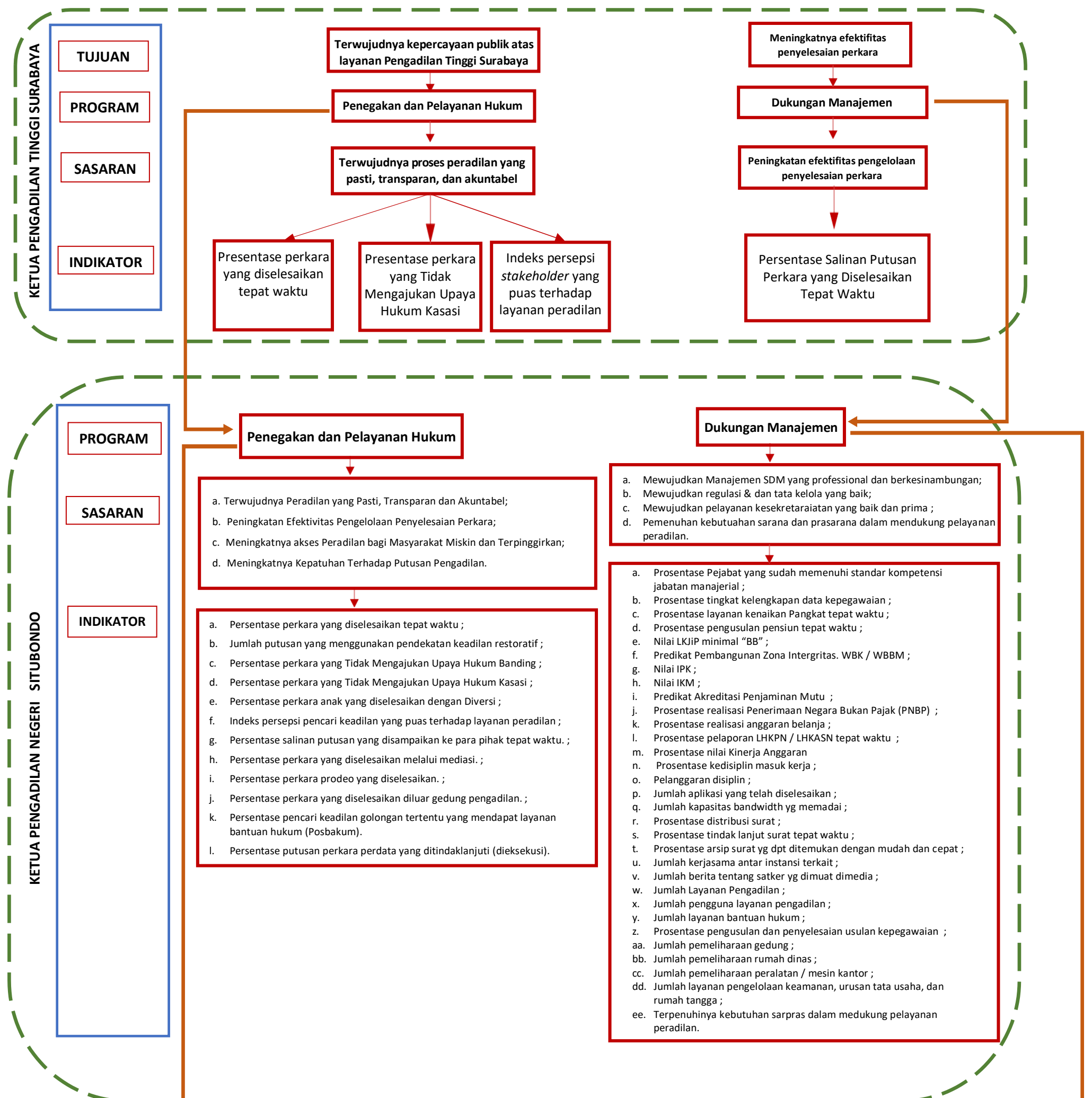


			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	➤ Terlaksananya perkara yang diselesaikan dengan Mediasi	➤ Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator ➤ Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi ➤ Merekapitulasi hasil pelaksanaan medias ➤
3	Terwujudnya Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	➤ Terlaksananya Perkara Prodeo Yang diselesaikan	➤ Mengevaluasi proses pengajuan pelaksanaan perkara secara prodeo ➤ Pelaksanaan perkara prodeo ➤ Tersedianya anggaran perkara prodeo
			b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	➤ Terlaksananya sidang diluar gedung pengadilan	➤ Tersedianya anggaran pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan ➤ Mengevaluasi dan berkoordinasi permohonan sidang diluar Gedung Pengadilan bila ada .( Perioritas / kepentingan public ) ➤ Membuat laporan dan mempublikasikan
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	➤ Terlaksananya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan	➤ Pengumuman rencana pengadaan /seleksi Jasa Kolsultasi ➤ Pemberi layanan bantuan melalui Posbakum ➤ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberi Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum ➤ Pelaporan terkait kegiatan dimaksud
4	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	➤ Terlaksananya Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	➤ Menindaklanjuti dan mengevaluasi / resume permohonan eksekusi. ➤ Hasil Resume sebagai referensi sebagai tindak lanjut eksekusi ➤ Melakukan Annmaning dan jadwal pelaksanaan sita eksekusi / eksekusi ➤ Melaksanakan eksekusi

# POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Situbondo selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung



PANITERA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

KEGIATAN  
SASARAN  
INDIKATOR

Pimpinan (Sasaran 1)

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan persidangan

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

- a. Menerima, memeriksa dan meneliti pelimpahan berkas perkara pidana yang masuk.
- b. Menerima, memeriksa dan meneliti pelimpahan berkas perkara perdata yang masuk.
- c. Menunjuk Panitera Pengganti
- d. Menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti
- e. Minutasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- f. Minutasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- g. Minutasi perkara banding pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- h. Pemberitahuan kepada para pihak
- i. Minutasi perkara kasasi pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- j. Minutasi perkara banding perdata yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- k. Minutasi perkara kasasi perdata yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- l. Minutasi perkara peninjauan kembali pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- m. Minutasi perkara peninjauan kembali perdata yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- n. Melaksanakan survei dan menganalisa data hasil survei.

- a. Melakukan pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara melalui mediasi
- b. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu

- a. Melakukan penunjukkan Panitera Pengganti untuk perkara prodeo.
- b. Melakukan penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk perkara prodeo.
- c. Melakukan penunjukkan Panitera Pengganti untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- d. Melakukan penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.
- e. Melakukan pendataan pencari keadilan yang menerima layanan bantuan hukum
- f. Melaporkan pelaksanaan layanan bantuan hukum

- a. Mengkoordinir pelaksanaan aanmaning.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan eksekusi

Crosscutting Panitera dengan Sekretaris

Eselon IV Bagian Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

Eselon III (Panitera)

KEGIATAN

**PANMUD PIDANA**

Mengkoordinir administrasi Perkara Pidana dan persidangan

**PANMUD PERDATA**

Mengkoordinir administrasi Perkara Perdata dan persidangan

**PANMUD HUKUM**

Mengkoordinir administrasi Perkara Hukum, Pengarsipan Perkara, dan Persidangan

SASARAN

- a. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara pidana yang efektif dan efisien;
- b. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- d. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara anak yang diselesaikan secara diversifikasi;
- e. Terlaksananya pengelolaan administrasi penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan tepat waktu;
- f. Terlaksananya persidangan perkara pidana dan perdata sebagai Panitera Pengganti.

- a. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara perdata yang diselesaikan secara efektif dan efisien;
- b. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi putusan perkara perdata dalam upaya hukum banding yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- d. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- e. Terlaksananya pengelolaan administrasi putusan perkara perdata dalam upaya hukum kasasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- f. Terlaksananya pengelolaan administrasi putusan perkara perdata dalam upaya hukum Peninjauan Kembali yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- g. Terlaksananya pengelolaan administrasi permohonan eksekusi;
- h. Terlaksananya pengelolaan data persepsi pencari keadilan terhadap layanan peradilan;
- i. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara perdata
- j. Terlaksananya persidangan perkara pidana dan perkara perdata sebagai Panitera Pengganti

- a. Terlaksananya persidangan perkara pidana dan perkara perdata secara efektif dan efisien sebagai Panitera Pengganti.
- b. Terlaksananya pengarsipan dan pelaporan berkas perkara Pidana yang sudah BHT;
- c. Terlaksananya pengarsipan dan pelaporan berkas perkara Perdata yang sudah BHT;
- d. Terlaksananya pengarsipan dan pelaporan berkas perkara Anak secara diversifikasi yang sudah BHT;
- e. Terlaksananya pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- f. Terlaksananya pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- g. Terlaksananya pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata upaya hukum banding yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- h. Terlaksananya pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata upaya hukum kasasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- i. Terlaksananya pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata upaya hukum Peninjauan Kembali yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- j. Terlaksananya pelaksanaan survey;
- k. Terlaksananya pengarsipan Perkara Mediasi;
- l. Terlaksananya pengarsipan dan pelaporan perkara prodeo;
- m. Terlaksananya pengarsipan dan pelaporan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- n. Terlaksananya penerimaan dan pelaporan laporan Posbakum
- o. Terlaksananya pengarsipan dan pelaporan permohonan Eksekusi

INDIKATOR

- a. Jumlah penyelesaian Perkara Pidana yang dikerjakan secara berkualitas dan tepat waktu;
- b. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. Jumlah pengelolaan administrasi perkara anak yang diselesaikan secara diversifikasi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- f. Jumlah administrasi penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- g. Jumlah penginputan proses persidangan perkara Pidana dan perkara perdata pada Aplikasi SIPP yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

- a. Jumlah penyelesaian Perkara Perdata yang dikerjakan secara berkualitas dan tepat waktu;
- b. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding yang terlaksana melalui pendekatan keadilan restoratif secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Perdata yang mengajukan upaya Hukum Kasasi yang terlaksana melalui pendekatan keadilan restoratif secara berkualitas dan tepat waktu;
- f. Jumlah pengelolaan administrasi Perkara Perdata yang mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali yang terlaksana melalui pendekatan keadilan restoratif secara berkualitas dan tepat waktu;
- g. Jumlah pengelolaan administrasi permohonan eksekusi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- h. Terlaksananya pembuatan laporan supervisor petugas PTSP secara berkualitas dan tepat waktu;
- i. Jumlah penginputan proses persidangan perkara Pidana dan perkara Perdata pada Aplikasi SIPP yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

- a. Jumlah penginputan proses persidangan perkara Pidana dan perkara Perdata pada Aplikasi SIPP yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- b. Jumlah pengarsipan dan pelaporan berkas perkara Pidana yang sudah BHT yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah pengarsipan dan pelaporan berkas perkara Perdata yang sudah BHT yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah pengarsipan dan pelaporan berkas perkara Anak secara diversifikasi yang sudah BHT yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. Jumlah pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- f. Jumlah pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- g. Jumlah pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata upaya hukum banding yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- h. Jumlah pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata upaya hukum kasasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- i. jumlah pengarsipan berkas perkara Pidana dan Perdata upaya hukum Peninjauan Kembali yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- j. Jumlah pelaksanaan survey secara berkualitas dan tepat waktu;
- k. Jumlah pengarsipan Perkara Mediasi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- l. Jumlah pengarsipan dan pelaporan perkara prodeo yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- m. Jumlah pengarsipan dan pelaporan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan secara berkualitas dan tepat waktu;
- n. Jumlah penerimaan dan pelaporan laporan Posbakum yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- o. jumlah pengarsipan dan pelaporan permohonan Eksekusi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

PANITERA MUDA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

Pelaksana Bagian Kepaniteraan

Eselon III (Panitera)

KEGIATAN

**PANITERA PENGGANTI**  
Melaksanakan administrasi Perkara dan persidangan

**JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**  
Mengkoordinir administrasi Perkara

SASARAN

- a. Terlaksananya persidangan perkara pidana secara efektif dan efisien;
- b. Terlaksananya persidangan perkara perdata secara efektif dan efisien.

- a. Terlaksananya pemanggilan relaas kepada para pihak berperkara;
- b. Terlaksananya pemanggilan relaas kepada para pihak berperkara dalam tahap mediasi;
- c. Terlaksananya relaas penyampaian salinan putusan kepada pihak berperkara secara tepat waktu;
- d. Terlaksananya penyampaian relaas pemberitahuan dan pernyataan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- e. Terlaksananya pelaksanaan eksekusi;
- f. Terlaksananya penginputan perkara Perdata ke dalam aplikasi SIPP;
- g. Terlaksananya penulisan surat masuk, surat keluar dan surat kuasa ke dalam buku register;
- h. Terlaksananya penyampaian arsip perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ke Kepaniteraan Hukum;
- i. Terlaksananya pelayanan pada meja PTSP

INDIKATOR

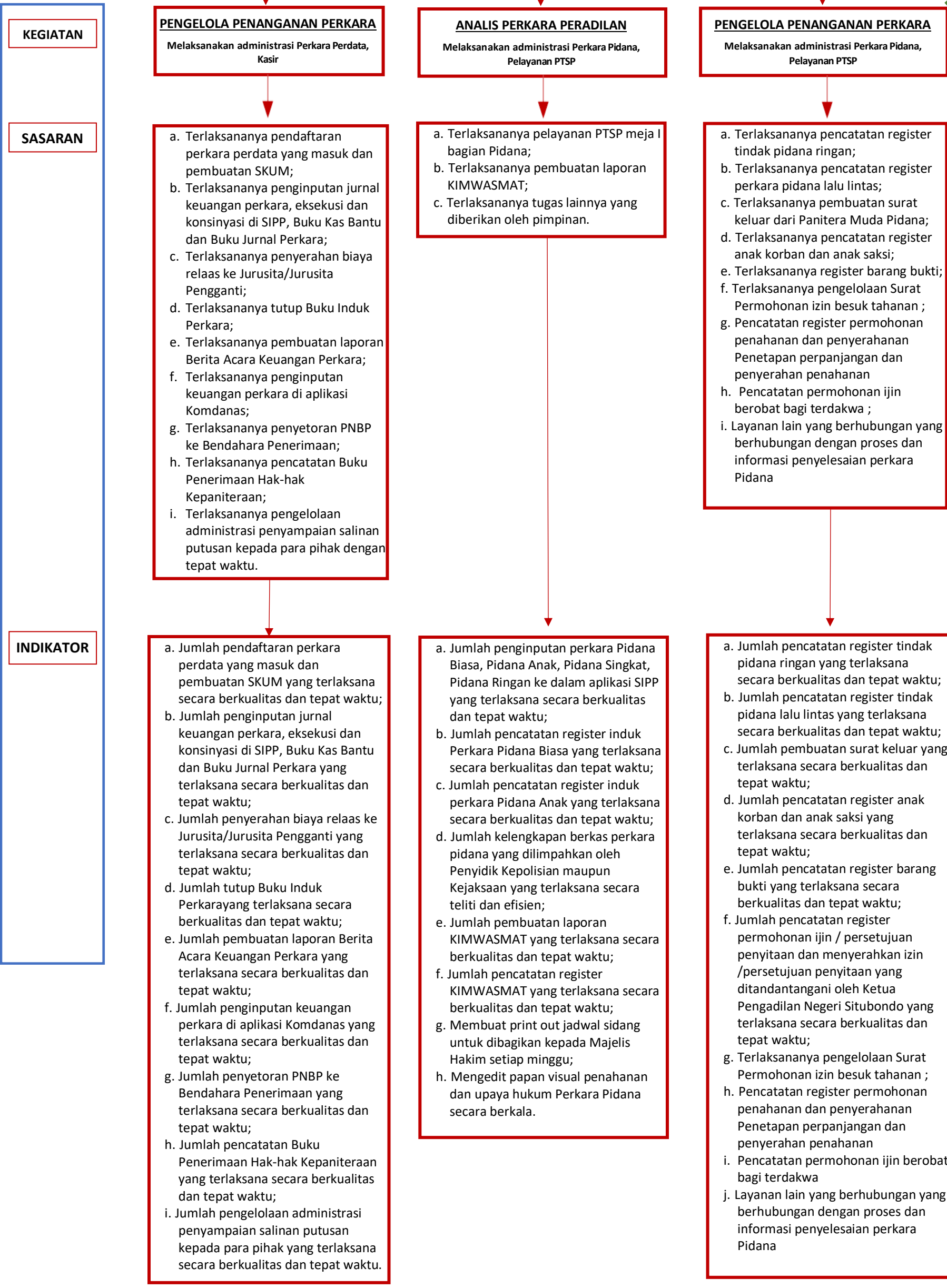
- a. Mencatat jalannya persidangan dengan membuat berita acara;
- b. Penginputan penundaan persidangan perkara pidana secara tepat dan cermat melalui SIPP;
- c. Menandatangani berita acara dan putusan;
- d. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasikan kepada Panitera Muda Pidana ;
- e. Membuat penetapan perpanjangan penahanan;
- f. Mencatat jalannya persidangan dengan membuat berita acara;
- g. Penginputan penundaan persidangan perkara pidana dan Perdata secara tepat dan cermat melalui SIPP;
- h. Menandatangani berita acara dan putusan;
- i. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasikan kepada Panitera Muda Perdata.

- a. Menerima perintah relaas panggilan sidang dari Majelis Hakim;
- b. Menginput relaas panggilan melalui aplikasi e-summons dan aplikasi SIPP;
- c. Menyerahkan hasil relaas panggilan kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti;
- d. Menerima perintah relaas delegasi panggilan sidang berdasarkan penunjukan dari Panitera atau koordinator delegasi;
- e. Menginput delegasi relaas panggilan berdasarkan permintaan dari Pengadilan Pengaju yang telah diupload di aplikasi SIPP;
- f. Menyerahkan hasil delegasi relaas panggilan yang telah dilaksanakan kepada koordinator delegasi agar dicatat dan dibuatkan pengantar serta diupload pada SIPP dan dikirim ke Pengadilan Pengaju;
- g. Menerima perintah pemberitahuan putusan dari Majelis Hakim;
- h. Menginput relaas pemberitahuan salinan putusan melalui aplikasi e-Summons dan aplikasi SIPP;
- i. Menerima perintah relaas delegasi pemberitahuan salinan putusan berdasarkan penunjukan dari Panitera atau koordinator delegasi;
- j. Menyerahkan hasil delegasi relaas pemberitahuan isi putusan yang telah dilaksanakan kepada koordinator delegasi agar dicatat dan dibuatkan pengantar serta upload pada aplikasi SIPP dan dikirim ke Pengadilan Pengaju;
- k. Menerima perintah pemberitahuan akta permohonan upaya hukum, memori, kontra memori, inzage banding, kasasi dan PK yang telah diajukan oleh pihak atau kuasa hukum pihak;
- l. Menginput relaas akta pemberitahuan upaya hukum, memori, kontra memori, inzage banding, kasasi, PK melalui aplikasi e-Summons dan SIPP;
- m. Menyerahkan hasil relaas pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi, PK kepada kepaniteraan perdata;
- n. Menerima perintah relaas delegasi pemberitahuan akta permohonan upaya hukum, memori, kontra memori, inzage banding, kasasi, PK berdasarkan penunjukan dari Panitera atau koordinator delegasi;
- o. Menyerahkan hasil delegasi relaas yang telah dilaksanakan kepada koordinator delegasi agar dicatat dan dibuatkan pengantar serta upload pada aplikasi SIPP dan dikirim ke Pengadilan Pengaju;
- p. Terlaksananya relaas pemberitahuan anmaning kepada para pihak yang berperkara;
- q. Terlaksananya relaas pemberitahuan eksekusi kepada para pihak;
- r. Terlaksananya penginputan data umum perkara ke dalam aplikasi SIPP;
- s. Terlaksananya penulisan surat masuk, surat keluar dan surat kuasa ke dalam buku register;
- t. Terlaksananya penyampaian arsip perkara Perdata yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) ke Kepaniteraan Hukum;
- u. Memberikan pelayanan di meja PTSP sesuai dengan SOP.

↔  
Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

PEJABAT FUNGSIONAL PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Eselon IV (Panitera Muda)



Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan

**KEGIATAN**

**SASARAN**

**INDIKATOR**

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

Pimpinan (Sasaran 2)

Mewujudkan manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan;

Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik;

Mewujudkan pelayanan Kesekretariatan yang baik dan prima;

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan;

- a. Jumlah pendataan data pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial sudah terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- b. Jumlah pengelolaan kelengkapan data pegawai pada bagian Kepegawaian yang sudah terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah pengusulan kenaikan pangkat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah pengusulan pensiun yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. pembuatan dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

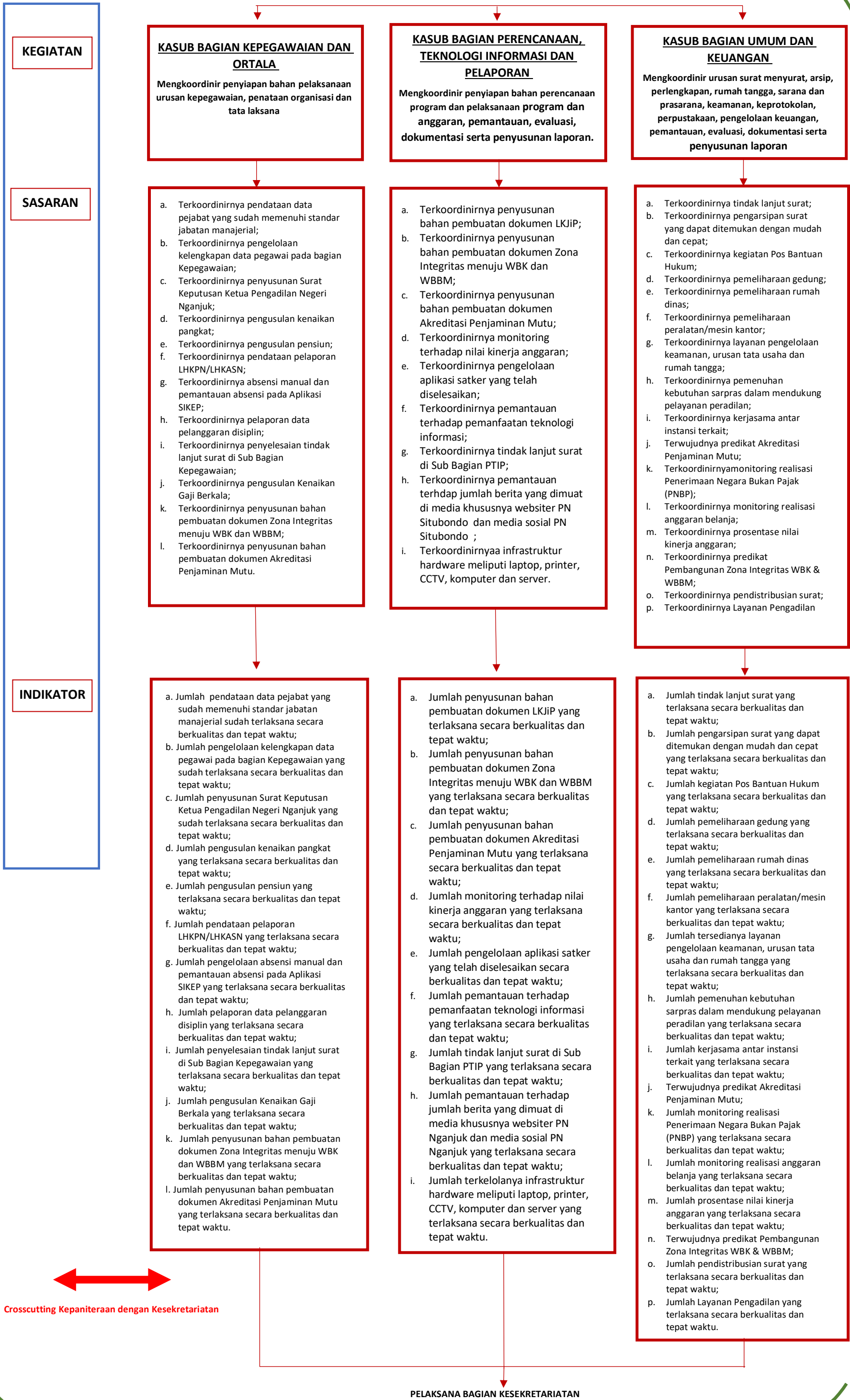
- a. Jumlah pembuatan dokumen LKJIP yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- b. Jumlah kelengkapan data dokumen Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah kelengkapan data dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah monitoring realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. Jumlah monitoring realisasi anggaran belanja yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- f. Jumlah pendataan pelaporan LHKPN/LHKASN yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- g. Jumlah pelaksanaan terhadap nilai kinerja anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- h. Jumlah tingkat kedisiplinan masuk kerja yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- i. Jumlah tingkat pelanggaran disiplin yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;

- a. Jumlah pengelolaan aplikasi satker yang telah diselesaikan secara berkualitas dan tepat waktu;
- b. Jumlah pelaksanaan teknologi informasi yang baik dan memadai/jumlah kapasitas bandwith yang memadai secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah pelaksanaan pendistribusian surat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah tindak lanjut surat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. Jumlah pengarsipan surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- f. Jumlah kerjasama antar instansi terkait yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- g. Jumlah berita yang dimuat di media khususnya website PN Situbondo dan media sosial PN Situbondo yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- h. Jumlah Layanan Pengadilan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan yang telah terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- j. Jumlah kegiatan Pos Bantuan Hukum yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- k. Jumlah pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- l. Jumlah pemeliharaan gedung yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- m. Jumlah pemeliharaan rumah dinas yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- n. Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- o. Jumlah tersedianya layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

- a. Jumlah pemenuhan kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;

Crosscutting Sekretaris dengan Panitera

ESELON IV (KASUB BAGIAN)



Crosscutting Kepaniteraan dengan Kesekretariatan



KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Eselon IV (Kasub Bagian)

**ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

- a. Terlaksananya penyusunan bahan pembuatan dokumen Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- b. Terlaksananya penyusunan bahan pembuatan dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu;
- c. Terlaksananya pengelolaan aplikasi satker yang telah diselesaikan;
- d. Terlaksananya pemantauan terhadap pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Terkelolanya infrastruktur hardware meliputi laptop, printer, CCTV, komputer dan server
- f. Terselesaikannya Penginputan Nilai Kinerja Anggaran;
- g. Terselesaikannya Pengelolaan Surat di Sub Bagian PTIP;
- h. Terlaksananya pembaharuan konten pada website dan media sosial Pengadilan Negeri Situbondo ;
- i. Terselesaikannya penyusunan bahan pembuatan dokumen LKJIP.

- a. Jumlah penyusunan bahan pembuatan dokumen Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- b. Jumlah penyusunan bahan pembuatan dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- c. Jumlah pengelolaan aplikasi satker yang telah diselesaikan secara berkualitas dan tepat waktu;
- d. Jumlah pemantauan terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- e. Jumlah terkelolanya infrastruktur hardware meliputi laptop, printer, CCTV, komputer dan server yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.
- f. Jumlah penginputan terhadap nilai kinerja anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- g. Jumlah tindak lanjut surat di Sub Bagian PTIP yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- h. Jumlah pembaharuan terhadap jumlah berita yang dimuat di media khususnya websiter PN Nganjuk dan media sosial PN Situbondo yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
- i. Jumlah penyusunan bahan pembuatan dokumen LKJIP yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu;

  
Crosscutting Kepaniteraan dengan  
Kesekretariatan




# 2024





## PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B

## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B  
JL. PB Sudirman No.97 Karangasem, Patoan, Kec. Situbondo,  
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telp/Fax : (0338) 671397 , 671545 672 700  
Email : itpnsitubondo@gmail.com Web : www.pn-situbondo.go.id

 pn\_situbondo

 @Negeri Situbondo

 pengadilannegrisitubondo

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024**



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**



## **RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TAHUN 2024**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024 Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Situbondo dalam mewujudkan Visi yaitu :

***“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung “***

Dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo mencantumkan Program, Kegiatan , Target dan Anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	1 %	1 %	1 %	1 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80 %	82 %	85 %	86 %
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80 %	85 %	88 %	91 %
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	3 %	6 %	9 %	10 %
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88 %	89 %	90 %	91 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh Para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %	6 %	9 %	10 %
3	Meningkatan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin yang terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1 %	1 %	1 %	1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 %	1 %	1 %	1 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	80 %	85 %	90 %	100 %
4	Pelaksanaan Putusan yang ditindaklanjuti	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( eksekusi )	20 %	35 %	45 %	50 %

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	Perkara Pidana yang di selesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Timur	23.320.000
2	Penetapan hari sidang	✓	✓	✓	✓				19.080.000
3	Pemeriksaan di sidang pengadilan	✓	✓	✓	✓				19.080.000
4	Minutasi / Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓				14.840.000
5	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				14.840.000
6	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan	✓	✓	✓	✓				14.840.000

	penahanan							
7	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓			5.810.000
8	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓			3.605.000

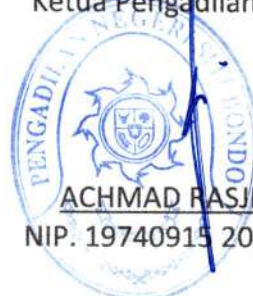
NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	28.000.000
2.	Percepatan Penyelesaian Perkara	-	✓	-	✓	Dukungan Penyelesaian Perkara		Kimwasmat	1.500.000

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persetase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90 %	90 %	90 %	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	95 %	95 %	95 %	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	97 %	97 %	100 %	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	50 %	50 %	50 %	75 %
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	25 %	50 %	50 %	50 %
		c. Nilai IPK	88 %	90 %	91 %	92 %
		d. Nilai IKM	88 %	90 %	91 %	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	A	A	A	A
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	95 %	97 %	98 %	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	25 %	55 %	85 %	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %	98 %	98 %	98 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	80 %	80 %	85 %	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %	97 %	97 %	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	! %	! %	! %	! %
7.	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	0	1	1	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwirth yang memadai	100 Mpbs	100 Mpbs	100 Mpbs	100 Mpbs
		c. Prosestase distribusi surat	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat	98 %	98 %	98 %	98 %

		waktu				
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %	95 %	95 %	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5	5	5	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	9	18	27	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5	5	5	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	30	80	130	200
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	30	60	90	126
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %	98 %	98 %	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	25 %	60 %	60 %	100 %
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	25 %	70 %	70 %	100 %
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	25 %	60 %	90 %	100 %
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	3	6	9	12
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	70	70	80	80

N O	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pengelolaan Keuangan dan Bendaharaan	✓	✓	✓	✓	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung R.I	3.679.158.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	✓	✓	✓	✓	Layanan Perkantoran			1.462.247.000
	a. Rapat Koordinasi internal								4.000.000
	b. Konsultasi di Tingkat Banding								58.080.000
	c. Konsultasi di ke KPPN/ Kanwil DJPB/ KPKNL								8.200.000.

Situbondo, 4 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD FASJID, S.H.  
NIP. 19740915 2000 03 1 001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
NOMOR : 149/KPN.PN.W14.U18/KP3.4.1/I/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

- Menimbang : a. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
- b. Bahwa, dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan dibawahnya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung R.I., maka perlu dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 1986 tentang Peradilan Hukum;





4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **M E M U T U S K A N .**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;**
- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



LAMPIRAN I  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN  
NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
Nomor : 149/KPN.PN.W14.U18/KP3.4.1/1/2024  
Tanggal : 3 Januari 2024

**TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Achmad Rasjid, S.H. NIP. 19740915 200003 1 001	Ketua	Penasehat
2	I Gede Karang Anggayasa , S.H.MH. NIP. 19770416 200021 2 001	Hakim	Ketua Pelaksana
3	Sutoto Winarno, S.H. NIP. 19650221 199403 1 002	Sekretaris	Penanggung Jawab
4	I Ketut Sueca SH NIP.19800927 200212 1 002	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5	Slamet Ridwan SE,SH.M.Hum. 19710616 199303 1.003	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Haryono, S.H. 19701016 199303 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001	Kasubag. PTIP	Anggota
9	Annang Mardiyanto, SH NIP. 196601131993031005	Kasubag Ortala	Anggota
10	Intan Mustika Atmaningrum,SH. NIP. 19840528 2005 02 2 001	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo  
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KLAS IB**  
**ACHMAD RASJID, S.H.**  
Nip.197409152000031001





# **PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B**

## **LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 288 / KPN. W14.U.18./OT.01.2/ I /2025  
Tanggal : 24 Januari 2025



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Jalan PB. Sudirman No. 97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur 68312  
Email : [it\\_pnsitubondo@gmail.com](mailto:it_pnsitubondo@gmail.com) Website : [pn-situbondo.go.id](http://pn-situbondo.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.



Previu I

HARIES SUHARMAN LUBIS, SH.,MH

Situbondo, 21 Januari 2025  
Previu II

ACHMAD RASJID, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Jalan PB. Sudirman No. 97, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur 68312  
Email : [it\\_pnsitubondo@gmail.com](mailto:it_pnsitubondo@gmail.com) Website : [pn-situbondo.go.id](http://pn-situbondo.go.id)

---

Situbondo, 24 Januari 2025

Nomor : 288 / WKPN. W14.U.18./OT.1.2/ I /2025

Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan  
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)  
Pengadilan Negeri Situbondo Th.2024

---

Kepada Yth

Bpk. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

di –

SITUBONDO

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024. Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait dengan hasil sebagai berikut:

**1. Pernyataan Reviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

**2. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- c. Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 2913 / KPN. W14.U.18./SK.OT1.6/I /2024, Tanggal 24 Desember 2024 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2024.

### **3. Waktu Dan Pelaksanaan Reviu**

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Situbondo yakni periode 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

### **4. Tujuan dan Sasaran Reviu**

1. Tujuan Reviu untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja tahun 2023.
2. Sasaran Reviu meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 yang disajikan oleh Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Negeri Situbondo

### **5. Ruang Lingkup Reviu**

1. Metode Pengumpulan data/informasi  
Pengujian keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dilakukan dengan penelusuran dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Situbondo yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas  
Penelaahan penyelenggaraan SAKIP dilakukan antara RPJMD dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan.
3. Penyusunan kertas kerja reviu  
Kertas kerja reviu terdiri dari hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data/informasi kinerja dalam laporan kinerja, telaah atas aktifitas penyelenggaraan SAKIP, hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan, serta hasil langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan reviu.
4. Pembuatan surat pernyataan telah direviu sebagai bagian dari laporan kinerja

### **5. Simpulan Dan Rekomendasi**

#### **1. Simpulan**

##### **a. Penyajian Laporan Kinerja (LKj)**

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Situbondo telah menggunakan format laporan kinerja sebagaimana

## 2.

ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **b. Mekanisme Penyusunan**

1. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo disusun oleh Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Pengadilan Negeri Situbondo
2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah cukup, didukung dengan data yang memadai.
3. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari setiap Sub Bagian ke Sub Bagian PTIP terdiri dari laporan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi kinerja sasaran triwulan I sampai dengan triwulan IV yang telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam SOP Pengumpulan data Kinerja Nomor: W.14.U.18/SOP/PTIP/3/2/2021 Rev. 2 Tanggal 8 Februari 2021.
4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah cukup dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang sesuai SOP.

### **c. Substansi**

1. Tujuan dan sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam dokumen perjanjian kinerja.
2. Tujuan /sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan RPJMD.
3. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Tujuan,sasaran,indikator dan target kinerja dalam RPJMD merupakan target indikator kinerja tujuan /sasaran dalam Perjanjian kinerja.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan dokumen IKU yang telah ditetapkan.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada laporan Kinerja telah cukup menyatakan tujuan/sasaran.
7. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah cukup SMART.

### **d. Penyampaian Laporan Kinerja**

Penyampaian Laporan Kinerja melalui Aplikasi e- SAKIP, Aplikasi Menpan RB. dan Hard Copy dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya

3.

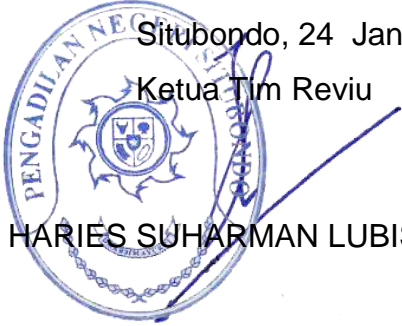
telah tepat waktu yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau tanggal 28 Februari 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor . 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2. Rekomendasi

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor . 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan setelah melakukan penelusuran data kinerja pada laporan kinerja masing masing unit terkait, tim reviu merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan penganggaran dimasa yang akan datang.
- b. Mendorong terciptanya inovasi manajemen untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas laporan Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun anggaran 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo, 24 Januari 2025  
Ketua Tim Reviu  
  
HARIES SUHARMAN LUBIS , SH.,MH.



**CAPAIAN KINERJA BULANAN TAHUN 2024**  
**E SAKIP KOMDANAS**  
**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Januari 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 25 Pkr	100 25 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 6 Pkr	66 4 Pkr	66	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1	0	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 31 Pkr	100 31 Pkr	116	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 25 Pkr	100 25 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 31 Pkr	100 31 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 4 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 0 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 0 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 11 org	100 11 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 31 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Februari 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 16 Pkr	100 16 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 17 Pkr	100 13 Pkr	76	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 16 Pkr	100 16 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 17 Pkr	100 17 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 0 Pkr	100 1 Pkr	100	Terdapat perkara perdata diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan diluar gedung

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 9 org	100 9 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 1Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 29 Februari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Maret 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 9 Pkr	100 9 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 1 Pkr	100 1 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 10 Pkr	100 10 Pkr	116	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 9 Pkr	100 9 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 1 Pkr	10 1 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 10 Pkr	100 10 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 2 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 10 org	100 10 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 28 Maret 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : April 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 16 Pkr	100 16 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 2 Pkr	50 1 Pkr	50	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 18 Pkr	83 15 Pkr	97	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 16 Pkr	100 16 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 18 Pkr	100 18 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan



		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 10 org	100 10 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 -	0 -	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 30 April 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Mei 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 20 Pkr	100 20 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 6 Pkr	33 2 Pkr	33	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 26 Pkr	88 23 Pkr	102	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 20 Pkr	100 20 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 26 Pkr	100 26 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 6 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 11 org	100 11 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 0	100 1	100	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 31 Mei 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Juni 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 16 Pkr	100 16 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 6 Pkr	17 1 Pkr	17	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 22 Pkr	64 14 Pkr	74	Capaian tidak memenuhi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 16 Pkr	100 16 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 22 Pkr	100 22 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 4 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1	0	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1	0	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 11 Org	100 11 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 -	0 -	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 28 Juni 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Juli 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 14 Pkr	100 14 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 8 Pkr	50 4 Pkr	50	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 22 Pkr	95 21 Pkr	111	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 25 Pkr	100 25 Pkr	10,9	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 22 Pkr	100 22 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 9 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 13 org	100 13 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 31 Juli 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Agustus 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 28 Pkr	100 28 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 3 Pkr	100 3 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 31 Pkr	74 23 Pkr	86	Capaian memenuhi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 28 Pkr	100 28 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 31 Pkr	100 31 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan



		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 15 org	100 15 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 30 Agustus 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : September 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 14 Pkr	100 14 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 15 Pkr	93 14 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 14 Pkr	100 14 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 15 Pkr	100 15 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 4 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 14 org	100 14 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 1 Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 30 September 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



**ACHMAD RASJID, S.H.**  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Oktober 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 27 Pkr	100 27 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 8 Pkr	50 4 Pkr	50	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 35 Pkr	74 26 Pkr	86	Capaian memenuhi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 27 Pkr	100 27 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 35 Pkr	100 35 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 4 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 8 org	100 8 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 -	0 -	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 31 Oktober 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : November 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 24 Pkr	100 24 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 7 Pkr	71 5 Pkr	71	Capaian tidak memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 31 Pkr	74 23 Pkr	86	Capaian memenuhi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 24 Pkr	92 22 Pkr	101	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91	-	-	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 31 Pkr	100 31 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 3 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan

		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 13 org	100 13 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 0 Pkr	100 2	100	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 29 November 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB  
BULAN : Desember 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	KEGIATAN/UPAYA/ KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSA- NAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 17 Pkr	100 17 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		b. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 2 Pkr	100 2 Pkr	100	Capaian memenuhi target
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 -	0 -	0	Tidak ada perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 19 Pkr	95 18 Pkr	110	Capaian sesuai dan melebihi target
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 17 Pkr	100 17 Pkr	109	Capaian sesuai dan melebihi target
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan dengan Diversi
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91 99	100 99	109	Jadwal perhitungan IKM setiap triwulan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 19 Pkr	100 19 Pkr	100	Capaian sesuai / memenuhi target
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 3 Pkr	0 0 Pkr	0	Belum ada yang berhasil perkara perdata yang diselesaikan dengan Mediasi
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 -	0 -	0	Belum ada perkara perdata yang diselesaikan dengan Prodeo
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung	1 -	0 -	0	Belum ada perkara yang diselesaikan



		Pengadilan				dengan diluar gedung
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 15 org	100 15 Org	100	Capaian sesuai / memenuhi target
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 0 Pkr	0 0 Pkr	0	Dilaksanakan 1 sisa tahun sebelumnya

Situbondo, 31 Desember 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP.197409152000031001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Jalan PB. Sudirman No. 97, Karangasem, Patokan ,Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur 68312  
Email : [it\\_pnsitubondo@gmail.com](mailto:it_pnsitubondo@gmail.com) Website : pn-situbondo.go.id

**JADWAL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TERHADAP PENGUKURAN KINERJA  
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2024**

<b>Nama Satker</b>	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
<b>Kepala Satker</b>	AHMAD RASJID,S.H.
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	2024

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi (Salin dari Tusi masing-masing bagian)	Indikator Kinerja Utama (Renstra/Renja)	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Target Tahun 2024	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		PENANGGUN G JAWAB
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Ketua Pengadilan Negeri Situbondo	1. Memimpin manajemen dan operasional lembaga peradilan; 2. Melaksanakan perencanaan ( <i>planning and programming</i> ), pelaksanaan () lembaga peradilan secara menyeluruh 3. Mengatur pembagian tugas antara Ketua dan Wakil secara serasi dan seimbang; 4. Mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf structural, teknis dan administrasis, secara baik dan serasi dan saling berkesinambungan; 5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penempatan personil, pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi serta penggunaan fasilitas	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap ayanan peradilan g. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu h. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi i. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan j. Persentase perkara yang diselesaikan diluar	PK Satker dengan Pimpinan (terlampir)	a. Pdt 70% Pid 100% b. 1 % c. 86% d. 91% e. 10% f. 91 g. 100% h. 10% i. 1% j. 1% k. 100% l. 50%  IKU 1 = 64 % IKU 2 = 55 % IKU 3 = 34 % IKU 4 = 50 %	Maret 2024	Maret 2024	Juni 2024	Juni 2024	September 2024	September 2024	Desember 2024	Desember 2024	PANITERA

		<p>6. dinas Pengadilan Negeri Kisaran: Melakukan pengawasan internal dan eksternal terhadap manajemen dan operasional serta kinerja aparat pengadilan;</p> <p>7. Memberikan penilaian pekerjaan terhadap Hakim dan persetujuan penilaian pekerjaan Panitera Pengganti, Juru Sita dan Pejabat Sstruktural di Pengadilan Negeri</p> <p>8. Membagi perkara perdata dan pidana kepada Majelis Hakim secara serasi dan seimbang;</p> <p>9. (9)Menetapkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara pidana dan perdata dan permohonan prodeo;</p> <p>10. (10) Memeriksa dan menetapkan permohonan eksekusi;</p> <p>11. (11) Memeriksa dan menetapkan permohonan sita;</p> <p>12. (12) Memberikan persetujuan penyitaan barang bukti;</p> <p>13. (13) Menunjuk Hakim Pengawas Bidang dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan internal dan melaporkan tugas pengawasan ke Pengadilan Tinggi yang tembusannya disampaikan kepada MA RI;</p> <p>14. (14) Merumuskan dan menetapkan Program Kerja dalam Rencana</p>	<p>gedung Pengadilan</p> <p>k. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum )</p> <p>l. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2	Panitera	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan koordinasi,</li> <li>b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;</li> <li>c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;</li> <li>d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;</li> <li>e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;</li> <li>f. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;</li> <li>g. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;</li> <li>h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan</li> <li>i. pelaksanaan fungsi lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative</li> <li>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</li> <li>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</li> <li>e. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> <li>f. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> <li>g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</li> <li>h. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>i. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan</li> <li>j. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum )</li> <li>k. Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)</li> </ul>	PK Panitera ke Ketua Satker (terlampir)
---	----------	--	---	---

								PANITERA
--	--	--	--	--	--	--	--	----------











4	Panitera Muda Perdata	Sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding</li> <li>c. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap ayanan peradilan</li> <li>d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> </ul>												PANMUD
	Staf Kepaniteraan Perdata	Sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015		PK Panmud ke atasnya											
5	Panitera Pengganti	Sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding</li> <li>c. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap ayanan peradilan</li> <li>d. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</li> </ul>												PP

Situbondo, 3 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



**ACHMAD RASJID, S.H.**  
NIP. 197409152000031001

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN I TA 2024

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B

No	Sasaran	PERJANJIAN KINERJA		Hasil Pengukuran Kinerja TW 1 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 1												
		Ind Kinerja	volum/Target		MONEV TW 1				TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 1							
			Jml	Sat	Target	Hasil	Ket.	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjuc	Jadwal	Pelaksanaan Tinjuc	Hasil Tindak Lanjut			
													Pelaksanaan	Capaian target sasaran	Efisiensi Sumber daya	
A	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu														
		1. Perdata	8	pk	100%	63,00%	tidak tercapai	Para pihak / kuasanya ada sebagian diluar kota sehingga penundaan sidangnya 15 hari	Majelis lebih memperhatikan Court kalender dan disepakati para pihak	Seharusnya Majelis mengacu pada Court kalender dan disepakati para pihak	tw-2 s/d tw 4	tw-2 s/d tw 4	tw-2 s/d tw 4	63,00%	tidak efisien	
		2. Pidana	50	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien	
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara yang menggunakan pendekatan restoratif justice	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum no. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	nihil	nihil	tw-2 s/d tw 4	tw-2 s/d tw 4	tw-2 s/d tw 4	0%	tidak efisien
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	58	pk	86%	93%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	108%	efisien
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50	pk	91%	100%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	109%	efisien
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	2	pk	10%	50%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	50%	efisien
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	50	Responden	91%	100%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien		
B.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu.														
		1. Perdata	8	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien	
		2. Pidana	50	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6	pk	10%	16,60%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	16,60%	efisien	
C.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan negeri Situbondo	Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Perlu ada usulkan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	0%	tidak efisien	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perencanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perlunya Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Perlu ada usulkan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	0%	tidak efisien	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	32	orang	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien	
D.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3	pk	50%	0%	Tidak Tercapai	Kurangnya Hakim sehingga proses telaah obyek yang dimohonkan eksekusi, dan mengikuti tahapan eksekusi	Jumlah Hakim terpenuhi sehingga prosesnya sesuai dengan tahapan eksekusi	Mengusulkan kepada Mahkamah Agung terkait atas beban kerja secara berkala	tw-2 s/d tw 4	tw-2 s/d tw 4	tw-2 s/d tw 4	0%	tidak efisien	

Situbondo, 28 Maret 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo  
  
 ACHMAD RASJID, S.H.  
 NIP. 1974091520031001

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN II TA 2024

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B

No	PERJANJIAN KINERJA		volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 2											
	Sasaran	Ind Kinerja	Jml	Sat	MONEV TW 2				TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 2							
					Target	Hasil	Ket.	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Jadwal	Pelaksanaan Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut			
												Pelaksanaan	Capaian target sasaran	Efisiensi Sumber daya		
A	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu														
		1. Perdata	14	pk	100%	29,00%	tidak tercapai	Para pihak / kuasanya ada sebagian diluar kota sehingga penundaan sidangnya 15 hari dan Minimnya jangkau internet	Majelis lebih memperhatikan Court kalender dan disepakati para pihak	Seharusnya Majelis mengacu pada Court kalender dan disepakati para pihak	tw-3s/d tw 4	tw-3s/d tw 4	tw-3s/d tw 4	29,00%	tidak efisien	
		2. Pidana	52	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien	
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara yang menggunakan pendekatan restoratif justice	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum no. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	Mendorong dan memberi pemahaman kepada para pihak yang berperkara yang menggunakan pendekatan restoratif justice	tw-3 s/d tw 4	tw-3 s/d tw 4	tw-3 s/d tw 4	104%	efisien	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	66	pk	86%	79%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	92%	efisien	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	52	pk	91%	100%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	109%	efisien	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0	pk	10%	0%	tidak tercapai	perkara anak yang masuk ke pengadilan tidak memenuhi syarat diversifikasi (ancaman hukuman kurang dari 7 tahun)	koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas atau lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan dengan diversifikasi	Apabila terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi, hakim mengupayakan agar diselesaikan dengan diversifikasi	tw-3 s/d tw 4	tw-3 s/d tw 4	tw-3 s/d tw 4	0%	tidak efisien	
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	41	Responden	91%	96%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	109,00%	efisien			
B.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu.														
		1. Perdata	14	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien	
		2. Pidana	52	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	11	pk	10%	0,00%	tidak tercapai	kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi	Hakim mediator mendorong dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai	Memberikan informasi dan mengedukasi, mendorong serta pengetahuan kepada pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi	tw-3 s/d tw 4	tw-3 s/d tw 4	tw-3 s/d tw 4	0%	tidak efisien	
C.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan negeri Situbondo	Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Perlu ada usulan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	0%	tidak efisien	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	pk	1%	0%	-	Tidak ada perencanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perlunya Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Perlu ada usulan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw-2 s/d tw 4 atau Anggaran tahun depan	0%	tidak efisien	
		c. Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	32	orang	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien	
D.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0	pk	50%	100%	tidak tercapai	Kurangnya Hakim sehingga proses telah obyek yang dimohonkan eksekusi, dan mengikuti tahapan eksekusi	Jumlah Hakim terpenuhi sehingga prosesnya sesuai dengan tahapan eksekusi	Mengusulkan kepada Mahkamah Agung terkait atas beban kerja secara berkala	nihil	nihil	nihil	100%	tidak efisien	

Situbondo, 28 Juni 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo  
  
 Achmad P. S. Jid, S.H.  
 NIP. 19740915200031001

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN III TA 2024**

**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B**

No	Sasaran	PERJANJIAN KINERJA		volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 3 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 3											
		Ind Kinerja	Jml	Sat	MONEV TW 3			TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 3									
					Target	Hasil	Ket.	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjuc	Jadwal	Pelaksanaan Tinjuc	Hasil Tindak Lanjut				
											Pelaksanaan	Capaian target sasaran	Efisiensi Sumber daya				
A	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu															
		1. Perdata	12	pk	100%	58,00%	tidak tercapai	Para pihak / kuasanya ada sebagian diluar kota sehingga penundaan sidangnya 15 hari dan Minimnya jangkau internet	Majelis lebih memperhatikan Court kalender dan disepakati para pihak	Seharusnya Majelis mengacu pada Court kalender dan disepakati para pihak	nihil	nihil	nihil	58,00%	tidak efisien		
		2. Pidana	56	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien		
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara yang menggunakan pendekatan restoratif justice	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum no. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	nihil	nihil	tw 4	tw 4	tw 4	0%	tidak efisien	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	58	pk	86%	85%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	99%	efisien	
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	56	pk	91%	100%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	109%	efisien	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1	pk	10%	0%	tidak tercapai	perkara anak yang masuk ke pengadilan tidak memenuhi syarat diversi (ancaman hukuman kurang dari 7 tahun)	koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas atau lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan dengan diversi	Apabila terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, hakim mengupayakan agar diselesaikan dengan diversi	tw 4	tw 4	tw 4	0%	efisien		
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	152	Responden	91%	98%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	107,00%	efisien			
B.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu.															
		1. Perdata	12	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien		
		2. Pidana	56	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien		
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	14	pk	10%	0,00%	Melebihi target	kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi	Hakim mediator mendorong dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai	Memberikan informasi dan mendukung, mendorong serta pengetahuan kepada pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi	tw 4	tw 4	tw 4	0%	tidak efisien				
C.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	pk	1%	0%	-	Tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan negeri Situbondo	Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Perlu ada usulkan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw 4 atau Anggaran tahun depan	0%	tidak efisien		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	pk	1%	0%	-	Tidak ada perencanaan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Perlunya Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Perlu ada usulkan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw 4 atau Anggaran tahun depan	tw 4 atau Anggaran tahun depan	0%	tidak efisien		
		c. Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	42	orang	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien		
D.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	3	pk	50%	0%	Tidak Tercapai	Kurangnya Hakim sehingga proses telaah obyek yang dimohonkan eksekusi, dan mengikuti tahapan eksekusi	Jumlah Hakim terpenuhi sehingga prosesnya sesuai dengan tahapan eksekusi	Mengusulkan kepada Mahkamah Agung terkait atas beban kerja secara berkala	tw 4	tw 4	tw 4	tw 4	tidak efisien		

Situbondo, 30 September 2024  
 Ketua Pengadilan Negeri Situbondo  
  
 ACHMAD RAHMAN, S.H.  
 NIP. 19740915200031001

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN IV TA 2024

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B

No	PERJANJIAN KINERJA		volum/Target		Hasil Pengukuran Kinerja TW 4 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Monev TW 4											
	Sasaran	Ind Kinerja	Jml	Sat	MONEV TW 4			TINDAK LANJUT REKOMENDASI MONEV TW 4								
					Target	Hasil	Ket.	Hambatan	Rekomendasi	Rencana Aksi Tinjau	Jadwal	Pelaksanaan Tinjau	Hasil Tindak Lanjut			
													Pelaksanaan	Capaian target sasaran	Efisiensi Sumber daya	
A	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu														
		1. Perdata	17	pk	100%	65,00%	tercapai	Para pihak / kuasanya ada sebagian diluar kota sehingga penundaan sidangnya 15 hari dan Minimnya jangkau internet	Majelis lebih memperhatikan Court kalender dan disepakati para pihak	Seharusnya Majelis mengacu pada Court kalender dan disepakati para pihak	nihil	nihil	nihil	nihil	65,00%	tidak efisien
		2. Pidana	68	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara yang menggunakan pendekatan restoratif justice	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum no. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	nihil	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025	0%	tidak efisien	
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85	pk	86%	79%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	92%	efisien
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	68	pk	91%	97%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	107%	efisien
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0	pk	10%	0%	tidak tercapai	perkara anak yang masuk ke pengadilan tidak memenuhi syarat diversi (ancaman hukuman kurang dari 7 tahun)	koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas atau lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan dengan diversi	Apabila terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, hakim mengupayakan agar diselesaikan dengan diversi	TW.I - Tahun 2025	TW.I - Tahun 2025	TW.I - Tahun 2025	0%	tidak efisien	
f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	109	Responden	91%	99%	Melebihi target	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	108,00%	efisien		
B.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Salinan Putusan yang diterima para pihak tepat waktu.														
		1. Perdata	17	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien	
		2. Pidana	68	pk	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100,00%	efisien	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	pk	10%	0,00%	tidak tercapai	kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi	Hakim mediator mendorong dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai	Memberikan informasi dan mendukung, mendorong serta pengetahuan kepada pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi	TW.I - Tahun 2025	TW.I - Tahun 2025	TW.I - Tahun 2025	0,00%	efisien	
C.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan negeri Situbondo	Dibutuhkan juga Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Diusulkan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	Anggaran tahun 2025	Anggaran tahun 2025	Anggaran tahun 2025	0%	efisien	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	pk	1%	0%	tidak tercapai	Tidak ada perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Dibutuhkan juga Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut	Diusulkan anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud	Anggaran tahun 2025	Anggaran tahun 2025	Anggaran tahun 2025	0%	efisien	
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	36	orang	100%	100%	tercapai	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	100%	efisien	
D.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	6	pk	50%	100%	Melebihi target	Hakim melakukan telaah dan semua tahapan telah selesai sehingga proses telaah obyek yang dimohonkan eksekusi, untuk dilaksanakan	Segera dilaksanakan eksekusi	nihil	nihil	nihil	nihil	200%	efisien	

Situbondo, 30 Desember 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo  
  
AcMIAD HASJID, S.H.  
NIP. 197401145200031001

Lampiran I  
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023  
 Tanggal : 17 Juli 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024  
 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	100%	63%	63%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	86%	93%	108%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	91%	100%	109%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	50%	50%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	95,83%	105,3%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	➤ Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	➤ Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	➤ Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	➤ Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang</li> </ul>
4.	Penyelesaian perkara melalui diversifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024. Ada 2 (dua) perkara pidana anak yang diajukan perkara anak yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi.</li> <li>➤ 1 (satu) Perkara berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</li> <li>➤ Perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Sit. Atas nama terdakwa Akbar Maulana Ishaq bin Suharsono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah perkara pidana anak yang masuk Januari sampai dengan Maret 2024, terdapat 2 perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.</li> <li>➤ 1 (satu) Perkara berhasil diselesaikan melalui diversifikasi</li> <li>➤ Perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sit. Atas nama terdakwa Akbar Maulana Ishaq bin Suharsono</li> <li>➤ Tanggal putusan 15 Maret 2024</li> <li>➤ Ketentuan apabila Perkara Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilak- nakan proses diversifikasi</li> <li>➤ Ketentuan apabila apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversifikasi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berhasil 1 (satu) Perkara dan</li> <li>➤ Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversifikasi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> </ol> </li> </ul>
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana.</li> <li>➤ Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tersedianya PTSP untuk pelayanan Prima</li> <li>➤ Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat</li> </ul>



			dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Januari Sampai dengan bulan Maret 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tanggal 22 Desember 2020	Tersedianya layar visual di Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberika edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Januari Sampai dengan Maret 2024 Belum ada perkara pidana yang diputus bebas dan terkait proses Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

**B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	16,6%	16,6%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan yang diterima oleh para pihak telah dilaksanakan tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Ada 10 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, hanya 1 perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi Yaitu. Perkara Nomer : 58/Pdt.Bth/2023/PN. Sit Putus tanggal 27 Februari 2024	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

**C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	1%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Pada bulan Januari Sampai dengan Maret tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Situbondo belum tersediannya Anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo Triwulan 2 – 4 atau tahun 2025
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Pada bulan Januari Sampai dengan bulan Maret tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan dan gedung Setting Plates.yang ada kondisinya rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Situbondo bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan</li> <li>➤ Mengajukan anggaran untuk penanganan sidang di diluar gedung Triwulan 2 – 4 atau tahun 2025.</li> </ul>
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan kerjasama dengan Posbakumadin untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. dan telah berjalan dengan baik</li> <li>➤ Berkerja sama dengan POSBAKUMADIN Cabang Situbondo</li> <li>➤ Tersediannya anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud</li> </ul>	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

**D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi masuk selama triwulan I dan belum ada masih proses tahapan dilaksanaan eksekusi pada triwulan I	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahapan Eksekusi ( Tim Telaah dan annmaning dll)	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan annmaning dan tahap berikutnya sampai pelaksanaan Eksekusi pada Triwulan 2

Situbondo , 28 Maret 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo ,



**ACHMAD RASJIDI, S.H.**  
NIP. 1974091520003.1.001

Lampiran I  
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023  
 Tanggal : 17 Juli 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024  
 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	100%	29%	29%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	86%	79%	92%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	91%	100%	109%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	0%	0%
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	96,07%	109%	

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	➤ Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversifikasi	Pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diajukan diselesaikan dengan diversifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diajukan diselesaikan dengan diversifikasi.</li> <li>➤ Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversifikasi.</li> <li>➤ Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversifikasi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.</li> </ul>	<p>Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversifikasi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> <li>3.</li> </ol>
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana.</li> <li>2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e-litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.</li> </ol>	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.

6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	April Sampai dengan bulan Juni 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	Tersedianya layar visual di Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberika edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Pada Bulan April Sampai dengan Juni 2024 Belum ada perkara pidana yang diputus bebas dan terkait proses Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

#### B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan yang diterima oleh para pihak telah dilaksanakan tepat waktu..	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Ada 11 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, tetapi tidak ada yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.
----	--------------------------------------	--	---	--

**C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	1%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Bulan April Sampai dengan Juni tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Situbondo tidak mendapatkan Anggaran yang tersedia untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo Triwulan 3 – 4 atau tahun tahun 2025
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Bulan April Sampai dengan Juni tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Situbondo tidak mendapatkan Anggaran yang tersedia untuk penanganan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Situbondo bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan</li> <li>➤ Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo Triwulan 3 – 4 atau tahun 2025</li> </ul>



3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan kerjasama dengan Posbakumadin untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. dan telah berjalan dengan baik</li> <li>➤ Berkerja sama dengan POSBAKUMADIN Cabang Situbondo</li> <li>➤ Tersedianya anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud</li> </ul>	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
----	---	--	---	--

**D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Tidak ada permohonan eksekusi masuk selama triwulan II dan ada 1 (satu) permohonan pelaksanaan eksekusi pada triwulan II	Sisa Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahapan Eksekusi ( Tim Telaah dan anmaning dll)	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan anmaning.dan tahap berikutnya sampai pelaksanaan Eksekusi pada Triwulan III

Situbondo, 28 Juni 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo ,



**ACHMAD RASJIDI, S.H.**  
NIP. 1974091520003.1.001

Lampiran I  
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023  
 Tanggal : 17 Juli 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024  
 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	100%	58%	58%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	86%	85%	99%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	91%	100%	109%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	0%	0%
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98%	107%	

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversifikasi	Pada Bulan Juli sampai dengan bulan September 2024, terdapat 1 (satu) perkara anak yang dapat diajukan diselesaikan dengan diversifikasi., namun tidak berhasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada Bulan Juli sampai dengan bulan September 2024, terdapat 1 (satu) perkara anak yang dapat diajukan diselesaikan dengan diversifikasi</li> <li>➤ Namun Tidak Berhasil</li> <li>➤ Ketentuannya Karena ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversifikasi.</li> <li>➤ Apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversifikasi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.</li> </ul>	<p>Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversifikasi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> </ol>
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana.</li> <li>2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.</li> </ol>	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.

6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Bulan Juli Sampai dengan bulan September 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	Tersedianya layar visual di Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberika edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	Bulan Juli Sampai dengan September 2024 Belum ada perkara pidana yang diputus bebas dan terkait proses Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

#### B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan yang diterima oleh para pihak telah dilaksanakan tepat waktu...	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Ada 14 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, tetapi tidak ada Perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.
----	--------------------------------------	--	---	--

**C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	1%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Pada bulan Juli Sampai dengan September tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Situbondo belum tersedia anggaran penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo Triwulan 4 atau tahun 2025
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Pada bulan Juli Sampai dengan September tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Situbondo bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan</li> <li>➤ Mengajukan anggaran untuk penanganan sidang di diluar gedung pengadilan.</li> </ul>

				Triwulan 4 atau tahun 2025
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan kerjasama dengan Posbakumadin untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan menyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. dan telah berjalan dengan baik</li> <li>➤ Berkerja sama dengan POSBAKUMADIN Cabang Situbondo</li> <li>➤ Tersedianya anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud</li> </ul>	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

**D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Ada 3 ( tiga) permohonan eksekusi masuk selama triwulan III dan belum ada pelaksanaan eksekusi pada triwulan III	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahapan Eksekusi (anmaning dll)	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut pelaksanaan tahapan yaitu anmaning pada Triwulan IV

Situbondo , 30 September 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo ,



ACHMAD HASJIDI, S.H.

Lampiran I  
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
 Nomor : 1282/SEK/OT.01.1/7/2023  
 Tanggal : 17 Juli 2023

**MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024  
 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**A. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1. Perdata	100%	65%	65%
		2. Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	86%	79%	92%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	91%	97%	106,6%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	0%	0%
	f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%	98,75%	108%	

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	Pendaftaran berkas perkara telah dilaksanakan secara tertib. Setiap penginputan berkas perkara pidana selalu dilakukan pada hari yang sama dengan pelimpahan perkara setelah melalui proses pemeriksaan oleh meja 1.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

2.	Penetapan Hari Sidang	Penetapan hari sidang telah berjalan dengan baik dan di input di SIPP dengan tertib.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat keterlambatan.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
4.	Penyelesaian perkara melalui diversifikasi	Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diajukan diselesaikan dengan diversifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2024, belum terdapat perkara anak yang dapat diajukan diselesaikan dengan diversifikasi.</li> <li>➤ Ketentuannya ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun jadi tidak dilaksanakan proses diversifikasi.</li> <li>➤ Dan apabila terdapat perkara pidana anak yang ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun, proses diversifikasi selesai di tingkat penyidik maupun kejaksaan.</li> </ul>	<p>Apabila terdapat perkara pidana anak yang dapat dilakukan diversifikasi, upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> <li>2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi.</li> </ol>
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	Pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan secara langsung untuk perkara pidana dan untuk perkara perdata dilaksanakan dengan e- litigasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana.</li> <li>2. Untuk perkara perdata, terkadang para pihak tidak dapat melaksanakan persidangan secara e- litigasi</li> </ol>	Disediakan pojok e-court di Pengadilan untuk membantu para pihak untuk dapat melaksanakan persidangan melalui e- litigasi.



			karena keterbatasan para pihak dalam bidang teknologi informasi.	
6.	Minutasi perkara	Minutasi dilaksanakan 7 hari setelah perkara putus sesuai dengan SOP dan telah dilaksanakan dengan baik.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
7.	Penanganan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Pada bula Oktober Sampai dengan bulan Desember 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan untuk penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.	Petunjuk RJ mengacu kepada SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020	Tersedianya layar visual di Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberika edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat
8.	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	Berkas perkara banding telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat banding.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
9.	Penanganan perkara kasasi di Pengadilan tingkat pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pada bulan Oktober Sampai dengan Desember 2024 Belum ada 2 (dua) perkara pidana yang diputus bebas</li> <li>➢ Yaitu : 1. nomor Perkara 127/Pid.Sus/2024/PN.Sit atas nama terdakwa Moh Sholeh als. Pak Indah Bin Satu alm. Dan 2. nomor Perkara 128/Pid.Sus/2024/PN.Sit atas nama terdakwa Herno als. Pak Astutik bin Pak Busiman alm.</li> <li>➢ Terkait proses Berkas perkara kasasi telah lengkap dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pada bulan Oktober Sampai dengan Desember 2024 Belum ada 2 (dua) perkara pidana yang diputus bebas</li> <li>➢ 1. nomor Perkara 127/Pid.Sus/2024/PN.Sit atas nama terdakwa Moh Sholeh als. Pak Indah Bin Satu alm.</li> <li>➢ 2. nomor Perkara 128/Pid.Sus/2024/PN.Sit atas nama terdakwa Herno als. Pak Astutik bin Pak Busiman alm Tanggal putusan 11 November\ 2024</li> </ul>	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

**B. Sasaran Strategis II : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada para pihak.	Pegiriman petikan / salinan putusan yang diterima oleh kepada para pihak tepat waktu.	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang
2.	Penyelesaian perkara melalui mediasi	Ada 10 perkara gugatan yang dilaksanakan mediasi, belum ada Perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi	Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan perkara melalui mediasi	Hakim mediator memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan membantu para pihak dalam membuat kesepakatan damai.

**C. Sasaran Strategis III : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	1%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Penanganan penyelesaian perkara prodeo	Pada Bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2024, tidak ada perkara prodeo yang masuk.	Pengadilan Negeri Situbondo belum tersedia anggaran untuk penanganan perkara secara prodeo	Mengajukan anggaran untuk penanganan perkara prodeo pada tahun 2025.
2.	Penanganan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan	Pada Bulan Oktober Sampai dengan bulan Desember tahun 2024, tidak ada perkara yang ditangani di luar sidang pengadilan.	Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki tempat khusus untuk pelaksanaan sidang di diluar gedung pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apabila terdapat pengajuan permohonan sidang diluar pengadilan, Pengadilan Negeri Situbondo bekerjasama dengan pemerintah daerah agar menyediakan tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan</li> <li>➤ Mengajukan anggaran untuk penanganan sidang diluar gedung pengadilan pada tahun 2025</li> </ul>
3.	Penyediaan Posbakum untuk para pencari keadilan golongan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan kerjasama dengan Posbakumadin untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum dan meyediakan tempat untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan posbakum. dan telah berjalan dengan baik</li> <li>➤ Berkerja sama dengan POSBAKUMADIN Cabang Situbondo</li> <li>➤ Tersedianya anggaran terkait dengan kegiatan dimaksud</li> </ul>	Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang signifikan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat berjenjang maupun pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang

**D. Sasaran Strategis IV : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	33%	66%

No.	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.	Pelaksanaan eksekusi	Ada 6 (enam) permohonan eksekusi masuk selama triwulan IV dan ada 2 (dua) pelaksanaan eksekusi pada triwulan IV	Permohonan eksekusi yang masuk masih dalam tahapan Eksekusi (telaah , anmaning dll)	Melakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut tahapan eksekusi pelaksanaan telaah anmaning pada Terwulan 1 tahun 2025

Situbondo, 30 Desember 2024  
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo,



ACHMAD RASJIDI, S.H.